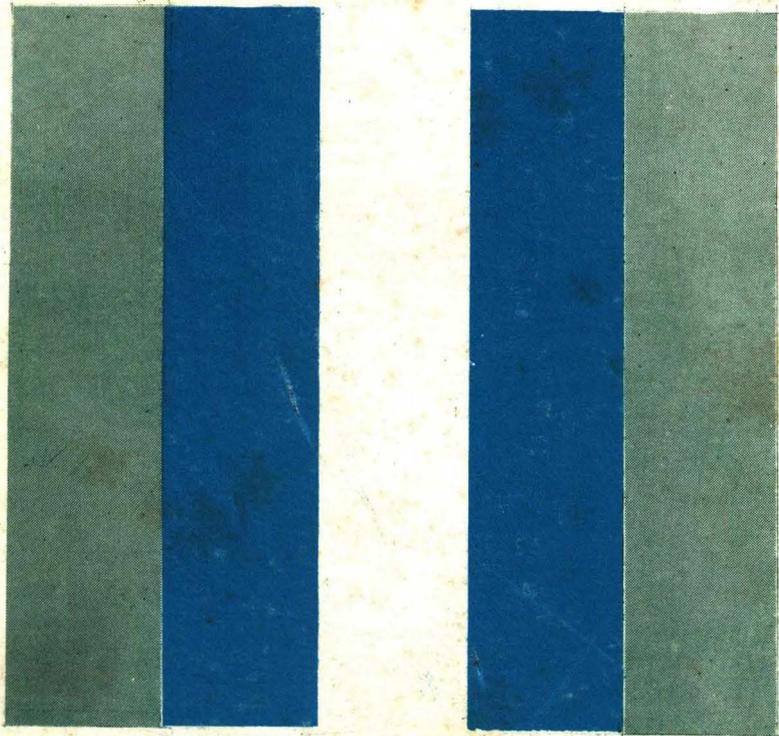


Sejarah Sosial Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOYAKARTA

Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta

Periode Awal Abad XX-an

Oleh :

Drs. Ryadi Goenawan

Drs. Darto Harnoko

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984-1985

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diper-

lukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Desember 1984
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjut-

nya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem keberatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Desember 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN DIRJEN KEBUDAYAAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR SINGKATAN	1
BAB I PENDAHULUAN	23
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA ...	14
A. Keadaan Wilayah Geografis	17
1. Mobilitas Geografis	18
2. Pertumbuhan Penduduk	26
B. Sejarah Pemerintahan Yogyakarta	29
1. Masa Pemerintahan Kesultanan	29
2. Zaman Jepang	31
3. Zaman Republik	32
BAB III PROSES MOBILITAS SOSIAL BAGI MASYA- RAKAT DI KOTA YOGYAKARTA	33
A. Kehidupan Kultural	39
B. Kehidupan Keagamaan	47
1. Agama Kristen Katholik	49
2. Agama Kristen Protestan	57
3. Agama Islam	73

BAB IV MOBILITAS SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA	85
A. Modernisasi Masyarakat Jawa : Gagasan Kaum Liberal	86
B. Pendidikan Moderen di Keluarga Pakualaman .	94
1. Ide-Ide Radikal dari Trah Pakualaman yang menunjang Mobilitas Sosial di Kota Yogyakarta	100
1.1 Sekolah Adhi Dharma	101
1.2 Raden Mas Suwardi dan Sekolah Taman Siswa	103
C. Perkembangan Sekolah di Kota Yogyakarta ...	105
BAB V KESIMPULAN	112
BIBLIOGRAFI	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. PETA PERKEMBANGAN KOTA YOGYAKARTA	126
B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI	130

Penyunting :

1. **Drs. Abdurachman Suryomihardjo**
2. **Drs. A.B. Lopian**

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

DAFTAR SINGKATAN

- BKI* *Bijdragen tot de Tall-, Land-, en Volkenkunde Koninklijk Instituut voor Tall-, Land-, en Volkenkunde, Den Haag.*
- hlm.* halaman.
- TBB* *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, Batavia.*
- TBG* *Tijdschrift voor Indische Tall-, Land-, en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia.*
- TNI* *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Zalt-Bommel, Nijmegen, Bussum, Den Haag, Amsterdam.*
- UGM* Universitas Gadjah Mada.

BAB I PENDAHULUAN

Hanya beberapa saat setelah ditandatangani Perjanjian Gianti¹ pada tanggal 13 Pebruari 1755 dan berdiri kraton yang baru, Pangeran Mangkubumi yang bergelar *Sampejan Dalem Inkgang Sinuhun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Inkgang Kaping Sapisan Senapati Ingalaga Abdurrachman Sajidin Panatagama Kalifatullah Negara Ngajogjakarta Hadiningrat* memindahkan pusat pemerintahannya dari Ambar-ketawang ke Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 7 Oktober 1756². Luas seluruh wilayah benteng dan kraton yang baru ini lebih kurang 4000 meter persegi dengan bentuk menyerupai belah ketupat³. Sejak saat itu dimulailah kehidupan yang baru dalam kota ini.

1. Perjanjian ini berakibat terpecahnya kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni: Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

2. Lihat, *Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta 1756-1956* (Jogjakarta: 1956), hlm. 16; Candrasengkala Memet untuk memperingati berdirinya kraton Yogyakarta ditunjukkan melalui simbol naga yang berbunyi Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani.

3. *Penelitian Awal Tata Kota Jogjakarta* (Jogjakarta: Simposium Perentjanaan Kota Jogjakarta: Arsetektur UGM & PUTL, 1971), Jilid I & II, hlm. 1 & peta no : 1.

Buku ini merupakan usaha menulis Sejarah Sosial Kota Yogyakarta dengan mobilitas sosialnya sejak awal abad 20-an. Disadari oleh penulis bahwa menggambarkan pengertian mobilitas sosial atas Kota Yogyakarta tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan batasan pengertian kota sendiri masih belum sepenuhnya benar mengingat bahwa sejarah pertumbuhan kota di Asia Tenggara relatif masih muda. Menurut Daldjoeni⁴ hakekat kota adalah adanya mobilitas sosial dengan taraf individualisasi yang tinggi serta sekularisasi. Benarkah definisi ini jika ingin diterapkan dalam tulisan atas Kota Yogyakarta? Bagaimana melihat pengertian mobilitas sosialnya? Meski gambaran mobilitas sosial adalah turun naiknya seseorang dalam tangga kemasyarakatan.

Kiranya kita perlu menengok ke belakang oleh karena apakah semenjak berdirinya "Kota" Yogyakarta sampai tahun 1900 tidak pernah mengalami perubahan? Ternyata proses perkembangan luas wilayah memang ada, dari gambaran fakta-fakta yang berkisar antara tahun 1756 hingga tahun 1824. Secara kasar perkembangan luas wilayah ini dapat disebutkan sebagai berikut⁵ :

Pada tahun 1756 luas wilayah 9,7 kilometer persegi.

Pada tahun 1790 luas wilayah 12,5 kilometer persegi.

Pada tahun 1824 luas wilayah 13,5 kilometer persegi.

Dari hal di atas ternyata untuk menulis dalam periode awal abad ke-20-an tim penulis memang "dipaksa" untuk melihat ke belakang. Memang benar tentang masalah perubahan sosial di Yogyakarta telah ada yang menulisnya⁶, akan tetapi tulisan ini menurut hemat kami berlaku bagi pengertian seluruh wilayah Yogyakarta.

4. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 48 dan 108.

5. *Benteng Vredenburg*, jilid II (Yogyakarta: Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978), hlm. 153.

6. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Kusumanto (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1981).

Jika mobilitas sosial atas Kota Yogyakarta dalam periode awal abad 20-an ingin dikemukakan berarti tidak hanya melihat kota inti dari Kesultanan Yogyakarta yang berpagar benteng, maka masalahnya kini bagaimana transportasi dan pasar harus dikisahkan dalam penulisan ini, oleh karena jaringan transportasi terletak di luar lingkungan "kota" inti yang berbenteng. Dari peta kota, Pasar Beringharjo yang terletak di sebelah utara dari pusat kota lama merupakan pasar yang tertua bagi kehidupan ekonomi di daerah Yogyakarta⁷, begitu juga untuk jaringan transportasi khususnya kereta api yang diwakili oleh perusahaan swasta NIS (*Nederlandch Indische Spoorwegmaatschappij*) yang berpusat di Stasiun Lempuyangan⁸, ternyata terletak jauh dari apa yang disebut "kota" pada masa itu.

Berbagai perubahan yang ada baik yang berupa fisik maupun non-fisik sejak awal berdirinya kota hingga tahun 1900 pasti akan berpengaruh atas permasalahan yang dikemukakan. Sebagai contoh, baru mengungkapkan nama Kota Yogyakarta saja tidak diperoleh gambaran yang seragam dan interpretasi yang juga berlainan. Ada pihak yang menyatakan bahwa nama Kota Yogyakarta adalah berasal dari kata *Ayodya* yang berarti kemenangan dan Karta yang berarti kota⁹. Sebuah buku yang dikarang oleh C.F. Winter¹⁰ menyatakan bahwa Ngajogyakarta itu berasal dari kata Jogja yang berarti baik, sedangkan karta berarti aman dan makmur. Mana yang benar tidak dipersoalkan di sini karena kami tidak bermaksud melihat pengertian mobilitas sosial dari "metafora" kata yang ada dan lebih memperhatikan bentuk-bentuk

7. Lihat, F.A. Sutjipto, "Beberapa Tjataan tentang Pasar Pasar di Djawa Tengah abad 17-18" dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudajaan UGM*, no : 3, 1970, hlm. 141; lihat juga Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 tahun Kota Yogyakarta 1756-1956. *opcit*, hlm. 69.

8. Wawancara dengan Soeprapto, Bekas Kepala Stasiun Lempuyangan tahun 1936-1942, tanggal 24 Juni 1983.

9. Wawancara dengan K.R.T. Soemodiningrat, tanggal 30 Juni 1983.

10. C.F. Winter Sr, *Kawi Javaansch Woordenboek*, Z.P. 1928.

lingkup ruang tata kota dengan isi yang berada di dalamnya dalam sebuah proses¹¹. Kesulitan awal sumber-sumber yang menceritakan bentuk Kota Yogyakarta sebelum tahun 1830 sangat langka jika dibandingkan dengan berbagai sumber setelah tahun tersebut ke atas¹². Akibatnya deskripsi atas Kota Yogyakarta yang kami kemukakan di sini, adalah merupakan gambaran setelah tahun 1830. Hal itu didasarkan atas kondisi yang obyektif karena langka dan terbatasnya sumber-sumber itu. Jika pun ada berbagai sumber yang berbahasa Belanda¹³, Inggris¹⁴ ataupun berbahasa Jawa¹⁵ ternyata lebih memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana peran Mangkubumi dalam perjuangannya.

Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan historis¹⁶, dengan ilmu bantu sosiologi¹⁷ dan anthropologi sosial¹⁸ untuk memperoleh gambaran yang diinginkan. Menurut sejarahnya, kemunculan kota-kota di Asia akibat adanya krisis ekonomi di pedesaan dan di dalam kota sendiri terjadi

11. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (Bandung Sumur Bandung, 1956), khususnya bab II.

12. Benteng Vredeburg *op. cit.*, hlm. 153.

13. P.J.F. Louw, *De Derde Javaansche Successie Oorlog, 1746-1755* (Batavia: Alrecht & Rusche, 1889).; G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Overdruk Uit Adatrechtbundel*, XXXIV, Serie D no : 81, 1931.

14. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part II : Ruler and Realm in Early Java* (Brussel: A. Manteau, 1959).; M.C. Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749-1792* (London : Oxpord University Press, 1974).

15. Kyai Yasadipura I, *Babad Gijanti* (Betawi Centrum: Bale Poestaka, 1937-1939), jilid I-XXI.; Tumenggung Ronggo Prawirosetiko, *Babad Kraton Kartosuro sampai dengan Babad Perdjandjian Gijanti* (Jogjakarta: Museum Kraton Jogjakarta, t.t.).

16. Sartono Kartodirdjo, "Modernisasi dalam Perspektif Sejarah", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, no. 5 tahun 1977, hlm. 134.

17. Kai T. Erikson, "Sociology and the Historical Perspective" dalam Michael Drake (ed), *Applied Historical Studies: An Introductory Reader* (London: Methuem & Co Ltd., 1973), hlm. 13-30.; C. Owen *Social Stratification* (London: Routledge & Kegan Paul, 1968) hlm. 33.

18. Robert R. Jay, *Javanese Villagers* (Cambridge: The MIT Press, 1969), hlm. 12-20.

surplus ekonomi dengan sistem transportasi yang semakin berkembang¹⁹. Akibat yang terjadi atas proses perjalanan dan perkembangan kota sendiri, ialah hubungan antar individu lebih bersifat impersonal, formal, realis dan spesialis.

Kemunculan pendidikan pada dasarnya menyangkut prestis sosial dalam keluarga dan akibat pendidikan melahirkan kelompok yang disebut sebagai masyarakat perantara yang pada dasarnya ikut mempercepat proses perubahan sosial atas sebuah tempat yang pada gilirannya menarik untuk diikuti oleh yang lainnya. Proses semacam ini terlihat di beberapa kampung tempat pemukiman penduduk di wilayah Kota Yogyakarta pada masa lalu. Ternyata gambaran yang terlihat menunjukkan kepada kita bahwa agama ikut memainkan peranan penting dalam proses perubahan sosial dan jelas mengarah kepada mobilitas sosial.²⁰ Akibatnya untuk sebuah kota dalam pengertian yang utuh dibutuhkan kondisi-kondisi sebagai berikut²¹:

(1) adanya pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas; (2) organisasi sosial lebih berdasarkan atas pekerjaan dan kelas sosial dari pada kekeluargaan; (3) lembaga-lembaga pemerintahan lebih berdasarkan teritorium dari pada hubungan kekeluargaan; (4) adanya suatu sistem perdagangan dan pertukangan; (5) mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi; (6) berteknologi yang rasional. Dari keenam kondisi yang diperlukan untuk terhadirnya pengertian sebuah kota ternyata faktor penduduk ikut memegang peranan penting untuk terjadinya mobilitas sosial. Kesemua ini dapat terlihat dalam gambaran yang senyatanya atas terbaginya wilayah-wilayah tertentu dalam Kota Yogyakarta melalui birokrasi

19 Daldjoeni, *op.cit.*, hlm. 48.

20 M.P.M. Muskens Pr, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid IV (Ende-Flores: Percetakan Arnلودus, 1973), hlm. 230.; James L Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement Indonesia Islam* (Philipina: The Benyamin/Cummings Publishing Company, 1978), hlm. 53.

21 Daldjoeni, *op.cit.*, hlm. 17.

pemerintahannya.²². Oleh karena itu akankah diingkari jika mobilitas sosial seperti di Kota Yogyakarta pada dasarnya juga menunjuk pada heterogenitas masyarakatnya? Hal ini jelas terlihat semenjak dibukanya sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial yang tergabung dalam *Binnenlands Bestuur* meskipun pada awalnya tempat yang diperoleh hanya di bagian terendah dari suatu sistem birokrasi administrasi pemerintah kolonial. Salah satu keinginan untuk menjadi "priyayi baru", melalui sekolah guru yang telah dibuka di Yogyakarta pada tahun 1897²³. Kenaikan status seseorang telah menggelisahkan golongan atas dalam artian priyayi yang sebenarnya. Terlihat dari adanya tulisan yang berasal dari seorang patih Tulung Agung tertanggal 27 Desember 1890²⁴, serta tulisan Raden Mas Adipati Arya Hadi Ningrat seorang bupati Demak yang tidak menyetujui jika jabatan yang tinggi dalam pemerintahan dipegang oleh orang yang bukan golongan bangsawan. Hal ini dirasakan bertentangan dengan adat²⁵. Akan tetapi jika kita melihat serangkaian tindakan para bekas murid-murid sekolah guru ini nantinya pada masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan ternyata di antara mereka ada yang telah dapat dinyatakan sebagai pemimpin gerakan kebangsaan²⁶. Sudah pasti dari gambaran ini menunjukkan adanya suatu tingkat mobilitas vertikal dalam diri mereka bahwa pada dasarnya

22 Lihat, *Tri Warsa: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jogjakarta* (Jogjakarta: 1953), hlm. 3.

23. Ph. Kleintjes, *Het Staatsrecht Van Nederlandsch Indie* (Amsterdam: J.H. de Bussy, 1912), hlm. 421.

24 Partowidjojo, "Nota. Hal. Pengadjaran (Schola) Djawa" dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur*, deel 5, 1891, hlm. 366.

25 Hadi Ningrat, "De achteruitgang van het prestige der Inlandsche Hoofden en de middelen om daarin verbetering te brengen" dalam *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur*, deel 17., 1899, hlm. 377.

26 Kasus ini terjadi pada Djuwardi, lihat, Ryadi Goenawan "Jagoan dalam Revolusi", *Prisma, Agustus*, 1981, hlm. 46 - 50.; B.R.O.G. Anderson, *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946* (Ithaca: Cornell University Press, 1972), hlm. 354 - 365 & 368.

pendidikan merupakan suatu sarana terbuka pada waktu itu untuk mendapatkan kepastian antar "harapan dan kecemasan"²⁷ dalam perjuangan kehidupan. Oleh karenanya dapat dimengerti bahwa kenyataan semacam ini menunjukkan pada kita jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Pergeseran telah terjadi semenjak nilai-nilai pendidikan berkembang dalam dasawarsa 20-an awal abad ini. Perpindahan semacam ini pada dasarnya menunjukkan juga berubahnya orientasi masyarakat atas nilai-nilai yang ada. *Ascribed Status* berubah ke arah *Achieved Status* dan merupakan mobilitas sosial semenjak bertambahnya golongan "priyayi" baru pada awal abad ke-20. Masalahnya sekarang bagi kita apakah mobilitas sosial di sini juga diikuti oleh naiknya tingkat ekonomi mereka?

Gambaran di atas untuk Kota Yogyakarta akan dapat kita berikan melihat sekitar tahun 40-an dari tulisan-tulisan yang ada²⁸ yang menghususkan atas perekonomian rakyat.

Studi mobilitas sosial menunjukkan perubahan status sosial seseorang, dengan pengertian bahwa setiap orang menginginkan kenaikan dalam *Social Climbing* mereka. Kesemua itu merupakan bentuk dari kehidupan moderen yang sangat karakteristik yang mana bagi seseorang tidak menghendaki kehidupan seperti masa lalunya.²⁹ Menurut Melvin M. Tumin³⁰ problem untuk pembicaraan mobilitas sosial dapat terangkum dalam bidang ekonomi, pendidikan atau prestise dari jabatan yang memperbandingkan antar kehidupan ayah

27 Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu Analisa* (Jogjakarta: Penerbit Karja, 1968), jilid I, hlm. 19.

28 Lihat beberapa nomor dari "Middenstand" dalam *Rerekonomian Ra'jat*, dari bulan Maret hingga Mei tahun 1940.; Lihat juga Teko Soemodiwirjo, "Kaoem Tengahan Priboemi", dalam *Volksalmanak Djawi 1941* (Batavia: Balai Poestaka, 1941), hlm. 139.

29 Ioan Davies, *Social Mobility and Political Change* (London: Pall Mall Press Ltd, 1970), hlm. 12.

30 Melvin M. Tumin, *Social Stratification: the Forms and Functions of Inequality* (New Delhi: Prentice Hall, 1969), hlm. 88 - 91.

dengan anak atau individu terhadap grup pada suatu saat dengan beberapa individu dalam waktu yang berlainan. Masih banyak hal yang berkaitan misalnya faktor dari pekerjaan, pendapatan, buruh dan majikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Jarak mobilitas sosial dinyatakan sebagai kemampuan yang berbeda dari satu pekerjaan antara ayah dan anak yang tanpa hubungan dengan nilai mobilitas itu dan merupakan faktor yang terserap dari perpindahan gerakan pekerjaan itu³¹.

Untuk Kota Yogyakarta periode sekitar awal abad ke-20 an rupanya akan memperlihatkan kepada kita bahwa fakta-fakta yang tersedia tidak harus menunjukkan "kepastian yang tepat" oleh karena jenis pekerjaan individu sebagai ayah sulit dinyatakan akibat untuk jenis pekerjaan bagi golongan bawah lebih ditunjukkan dengan posisi sosial mereka dalam masyarakat sebagaimana yang terlihat di "kota benteng" ini dengan sebutan *ngindong*, *magersari*, *tlosor*³².

Suatu studi kasus atas keluarga per keluarga untuk melihat hal semacam ini akan lebih mudah bagi kami jika melihat kepada rumpun keluarga atau yang dalam bahasa Jawa disebut *trah*³³. Dari gambaran trah dengan tiga keturunan ke atas maupun ke bawah sifat-sifat mobilitas sosial individu dapat terpahami sebagaimana yang diinginkan. Masalahnya kini bagaimanakah memilih trah keluarga yang akan ditulis? Secara emosional dapat kami katakan bahwa pemilihan itu ditentukan oleh faktor-faktor tertentu dengan daya tarik tertentu atas obyek materialnya. Lovejoy, menyebut sebagai faktor *interestingness*³⁴. Untuk etnik cina sebenarnya juga

30 *Ibid*, hlm. 90.

32 Koentjaraningrat, "Tjelapar: A Village in South Central Java", dalam *Villages in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), hlm. 226-270.

33 Sjafrin Sairin, *Javanese Trah: A Preliminary Description of a Type of Javanese Social Organization*, thesis Unpublished ANU, 1980, hlm. 37.

34 Arthur O. Lovejoy, "Present Standpoints and Past History" dalam Hans Meyerhoff (ed.), *The Philosophy of History in Our Time* (New York: Doubleday & Company, Inc, 1959), hlm. 175.

memperlihatkan daya tarik yang tidak kalah mengingat bahwa seorang keturunan etnik ini, Setjodiningrat³⁵, pernah memperoleh jabatan yang tinggi di Kraton Yogyakarta. Apakah yang layak dan pantas diberikan kepada ahli warisnya, kata mobilitas vertikal atau horizontal? Dinyatakan atau tidak, mereka merupakan generasi pewaris daerah pemukiman yang bernama Secodiningratan.

Kemampuan individu untuk mengubah posisi pekerjaan ternyata melahirkan gambaran yang begitu menarik. Kemampuan individu dan merubahnya jenis pekerjaan ternyata memiliki korelasi yang dominan dari apa yang kami sebut sebagai mobilitas yang vertikal³⁶. Perubahan itu ternyata menunjukkan juga bahwa apa yang disebut *ascribed status* mengalami pergeseran³⁷ saat perangkat "moderen" menyentuh sendi-sendi kehidupan sebuah masyarakat. Meski dalam gambaran senyatanya, tembok benteng kraton merupakan pemisah pemukiman etnik Jawa tertentu dengan Cina, Arab atau Eropa, ternyata untuk posisi tertentu terbuka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi sebagai abdi dalem kraton.

Bagaimanakah kondisi perubahan masyarakatnya semenjak munculnya organisasi-organisasi "politik" semacam Boedi Oetomo atau Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan yang lainnya? Secara hipotetis, aspirasi perubahan dan kemajemukan warganya atas etnik, jenis pekerjaan semakin meningkat, dengan melihat banyaknya kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang ditimbulkan oleh para warga organisasi masing-masing itu. Bukankah kesemua ini pada akhirnya membentuk hubungan seperasaan atas dasar ikatan organisasi? Bukankah hal-hal yang mereka lakukan itu akhirnya

35 Wawancara dengan K.R.T. Puspaningrat, sebagai Ketua Seksi Sejarah Pusat Paguyuban Trah Hamengkubuwono I, pada tanggal 2 Juli 1983.

36 Michael Drake, *op.cit.*, hlm. 233-249.

37 Untuk hal semacam ini lihat kasus daerah Timur Tengah, dalam Daniel Lenner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983). hlm. 60 - 90.

dapat dinilai sebagai terciptanya mobilitas sosial kota atas kegiatan para warganya?

Oleh karena itu dengan melihat gambaran di atas sebenarnya Kota Yogyakarta pada masa itu memiliki jaringan sosial bagi warganya baik secara tersembunyi atau tidak yang kesemuanya itu akan muncul pada saat interaksi sosial berlangsung³⁸.

Terlepas dari jumlah pertanyaan yang dikemukakan dan jawaban-iawaban yang diharapkan dapat muncul, mobilitas sosial dalam masyarakat melibatkan penduduk dengan berubahnya ekologi setempat yang merangsang hubungan para warganya dalam kehidupan mereka. Semua sektor yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan kultural berperan dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial itu. Pendekatan historis sebagaimana yang telah kami kemukakan di bagian depan dengan dibantu oleh ilmu sosiologi serta antropologi sosial, dianggap penting agar dengan hal semacam ini terlihat segi-segi struktural masyarakat kota dan bagaimana terjadinya mobilitas sosial atas peranan golongan yang hidup dalam masyarakat dapat terlihat dengan jelas.

Dipergunakannya ilmu bantu sosiologi dalam analisa bertujuan untuk melihat interrelasi antar masing-masing kelompok masyarakat, dan ilmu anthropologi sosial untuk analisa kultural yang menerangkan hubungan antar status yang ada dalam masyarakat.

Untuk memberikan gambaran atas permasalahan, maka uraian dalam penulisan ini akan disusun bab demi bab. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang karakteristik sejarah, yakni menunjuk suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang berurutan agar berbagai perubahan sosial di dalamnya menunjukkan aspek-aspek mobilitas sosial

38 Fredrik Barth (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries* (Boston: Little, Brown and Company, 1969), hlm. 9 - 37.

yang dapat dipahami baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya, bagaimana kita akan dapat memahami sekolah-sekolah yang didirikan oleh Missi tanpa pemahaman atas perkembangan gereja di Jawa Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20?

Penulisan ini dimulai dengan menyusun bab I dan diberi judul pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang alasan atau tujuan penulisan, pendekatan terhadap persoalan penggarapan dan landasan teoritis yang dipergunakan. Bab II merupakan gambaran umum atas keadaan Kota Yogyakarta serta perkembangan geografis wilayah, penduduk dan sistim pemerintahan pada suatu kurun masa tertentu. Bab III mencoba melihat proses mobilitas sosial masyarakat Kota Yogyakarta melalui kontak peradaban dengan kebudayaan barat yang diwakili oleh gereja melalui petugas lapangan dan balai-balai kesehatan yang didirikan untuk masyarakat. Bab IV akan menceritakan mobilitas sosial itu sendiri, saat pendidikan menyerang ke dalam kubu pertahanan kaum feodal dengan mengambil kasus di keluarga Pakualaman. Bersama itu juga digambarkan sekolah-sekolah yang ada dan pernah diakui sebagai sarana mobilitas sosial masyarakat. Bab V yang merupakan kesimpulan akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang pernah terlontar dalam bab-bab terdahulu sehingga bab ini merupakan suatu gambaran sebenarnya bagaimana dan apa yang disebut sebagai mobilitas sosial dalam tulisan ini secara keseluruhan.

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Isi bab ini memberikan gambaran umum atas Kota Yogyakarta yang menyangkut masalah: mobilitas geografis, pertumbuhan penduduk, sejarah singkat pemerintah baik pada masa Belanda, Jepang, Republik. Telah disinggung dalam bab pendahuluan, bahwa berdirinya "kota benteng" Kraton Yogyakarta dilambangkan dalam gambar dua ekor naga yang saling melilitnya, yang menunjuk kepada tahun berdirinya kota benteng ini yakni 1682 tahun Jawa atau 1756 Masehi. Semenjak berdirinya kota benteng ini dan mengalami perkembangan atas luas wilayahnya, ternyata juga banyak peristiwa baik yang besar maupun yang kecil terjadi dalam sejarahnya. Lintasan berbagai peristiwa itu secara garis besar dapat disebutkan sebagai¹ :

1. Periksa buku-buku yang mencatat kejadian itu: P.J.F. Louw, *De Java Oorlog van 1825 tot 1830*, I, Batavia, 1894.; *Babad Ngajogjakarta*, vol. I-III (Jogjakarta: Museum Sanabudaja, 1876).; K.R.T. Mandojokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta, 1977).; *Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1953).; *Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 - 7 Djuni 1962*.; *Kota Jogjakarta 200 tahun* (Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun, 1956).; James L. Peacock, *Perifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (Philippines: The Benyamin/Cummings Publishing Company 1978).

1. Berdirinya Kadipaten Pakualaman pada tahun 1813;
2. Pecahnya perang Diponegoro tahun 1825–1830;
3. Kongres I Boedi Oetomo pada tahun 1908 di Yogyakarta;
4. Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912;
5. Berdirinya Taman Siswo pada tahun 1922;
6. Kongres Wanita I se Indonesia pada tahun 1928 di Yogyakarta; dan
7. Pada awal kemerdekaan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Di bidang pendidikan, ternyata Kota Yogyakarta semenjak dahulu hingga sekarang merupakan tempat yang paling tepat, sehingga kini kota ini memperoleh julukan kota pelajar. Beberapa sekolah itu antara lain : Tamanan, *Kweekschool*, *Technische School*, AMS A, dan Universitas Gadjah Mada yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri Indonesia. Banyaknya prasarana pendidikan itu menjadikan suburnya benih-benih pergerakan nasional, dan Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat gerakan perjuangan bangsa Indonesia di samping Kota Bandung dan Jakarta.

Berbagai kongres atau kegiatan pergerakan nasional yang pernah diselenggarakan di kota ini adalah seperti : Kongres Jong Java, Kongres Serikat Islam, Kongres Boedi Oetomo, Kongres Indonesia Muda, Kongres Taman Siswo, Kongres Wanita serta Kongres Muhammadiyah, memberikan warna-warna tersendiri bagi Kota Yogyakarta dalam perjalanan sejarahnya. Oleh karenanya tidak dapat diingkari jika dari hal yang telah berlangsung di kota ini khususnya yang berhubungan dengan perubahan sosial, mobilitas sosial dipengaruhi oleh pendidikan. Ternyata pendidikan yang dikenyam masyarakat kota ini merupakan motor penggerak perubahan sosial, khususnya melalui tindakan penguasanya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pada tanggal 5 September 1945² bersama dengan Pakualam

² Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta *op.cit*....., hlm. 36.

VIII menyatakan kekuasaannya mulai saat itu masuk dalam wilayah Republik Indonesia maka pada dasarnya sikap-sikap politik yang dimiliki oleh para penguasa wilayahnya membubuhkan suatu konsolidasi kekuatan politik nasional³.

Tindakan perubahan ternyata berlanjut dalam tubuh kraton/kesultanan terhadap berbagai macam upacara yang semula ada semacam *pisowanan gerebeg*, baik *gerebeg mau-lud* atau *gerebeg bakda pasa* serta *gerebeg besar*. Perubahan ini membawa akibat juga dalam masyarakat atas mitos yang selama ini sulit dihilangkan bahwa sultan merupakan pimpinan satu-satunya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Peniadaan berbagai bentuk kegiatan ritual semacam *pisowanan malem selikuran*, *tinggalan ndalem tahunan* baik yang disebut *wivosan ndalem* atau *jumenengan ndalem* ternyata sebenarnya ikut memainkan peranan longgarnya ikatan *trah ndalem*. Bagi para abdi dalem pakaian dalam upacara *pisowanan* juga dirubah, kini cukup jika dalam *pisowanan* harian mereka memakai pakaian yang disebut *pranakan*, sedangkan dalam *pisowanan* khusus cukup memakai *atela* atau yang biasa disebut *beskap putih*.

Salah satu peristiwa yang cukup penting menjelang kemerdekaan tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1945, adalah diberhentikannya KPH Danurejo VIII dari jabatan pepatih dalem⁴. Sejak saat itu terjadi perubahan yang fundamental dalam proses sejarah birokrasi pemerintahan kesultanan sejak awal berdirinya di tahun 1756.

3 Lihat, Atmakusumah (penyunting), *Tahta untuk Rakyat* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 301.; *Tri Warsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota-pradja Jogjakarta 29 Nopember 1950-1953* (Jogjakarta: Panitia Penerbitan buku Tri Warsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jogjakarta, 1953), hlm. 8.

4 K.P.H. Sudarisman Poerwokusumo, *Peranan Kota Yogyakarta Dalam Perjuangan* (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan UGM, 1982), hlm. 5.

A. Keadaan Wilayah Geografis

Kota Yogyakarta secara astronomi terletak lebih kurang antara $110^{\circ} 23' 79'' - 110^{\circ} 28' 53''$ bujur timur dan terletak lebih kurang $7^{\circ} 49' 26'' - 7^{\circ} 50' 84''$ lintang selatan⁵. Kota Yogyakarta dilalui oleh garis paralel $8^{\circ} 18' 4.93''$ lintang selatan dan garis meridian $110^{\circ} 51' 50.87''$ bujur timur, di samping itu juga dilalui oleh tiga buah sungai yakni: Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota; Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota; Sungai Winongo yang mengalir dibagian barat kota.

Bentuk peta Kota Yogyakarta yang mirip belah ketupat⁶ ternyata paralel dengan aliran ketiga sungai tersebut di atas, dan hal ini ternyata berpengaruh terhadap pola jalur jalan raya yang ada. Berbagai jalur jalan yang ada paralel saling tegak lurus antar yang satu dengan yang lainnya kesemuanya ini ternyata berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat di Kota Yogyakarta⁷.

Secara topografi Kota Yogyakarta terletak di zone tengah ini jarang terkena musibah banjir karena tanahnya terdiri atas pasir. Di Kota Yogyakarta air bagi penduduk pada umumnya di dapatkan dengan dua jalan yakni melalui air yang dihasilkan oleh dinas perusahaan air minum serta berbagai sumber air yang diusahakan penduduk yang berupa sumur. Kedalaman sumur hingga sumber mata air yang dibuat penduduk rata-rata berkisar antara 10 hingga 15 meter di bawah permukaan tanah. Curah hujan di Kota Yogyakarta per tahun sebesar 2000 mm hingga 2500 mm dengan perbandingan untuk bulan-bulan yang kering dan yang basah sebesar 33.3% dan 60%⁸. Meskipun curah hujan dianggap cukup be-

5 *Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta*, jilid I (Yogyakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UGM dan Dit. Tata Kota & Daerah DITDJEN Tjipta Karja, 1971), hlm. 1.

6 *Ibid.*

7 *Ibid.*

8 *Laporan Tjurah Hudjan di Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jogjakarta: Dinas Pertanian DIJ, 1965), hlm. 1 - 10.

sar akan tetapi karena kota ini berpasir akan selalu mudah terserap ke bawah tanah.

Secara administratif Kota Yogyakarta yang merupakan pusat propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dengan 163 rukun kampung⁹. Kota ini merupakan kota penghubung ke arah barat dengan Kota Purworejo, kota yang terletak di daerah propinsi Jawa Tengah dan ke arah Timur yang menghubungkan dengan Kota Solo juga termasuk Propinsi Jawa Tengah. Ke arah utara Kota Yogyakarta menghubungkan dengan Kota Magelang yang juga masuk dalam Propinsi Jawa Tengah.

Batas-batas wilayah administratif pemerintahan Daerah Kotamadya Yogyakarta menurut peta wilayah adalah sebagai berikut¹⁰ :

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

1. Mobilitas Geografis

Pertanyaan awal yang muncul untuk mengetahui mobilitas geografis di Kota Yogyakarta adalah secara fungsional kota ini digolongkan sebagai apa? Kota ini berfungsi sebagai kota pelajar yang berarti melihat perkembangan kota semenjak adanya sekolah-sekolah tertentu di wilayah ini atau sebagai kota pemerintahan yang bercorak politik yang harus melihat kota ini pada awal berdirinya? Secara historis pertanyaan di atas mungkin kan lebih tepat jika dimasukkan dalam pengertian kota pemerintahan, oleh karena dengan demikian

9. Bandingkan antar buku: Bintaro, *Geografi Kita* (Jogjakarta: Spring, 1969), yang menyatakan bahwa jumlah rukun kampung kodya Yogyakarta berjumlah 163 dan Peringatan Tri Pantja Warsa*op.cit.*, hlm. 60.

10 *Monografi Kodja Jogjakarta*, 1968.

akan dapat diketahui perkembangan luas wilayah kota ini yang biasa disebut sebagai kota kuno atau kota berbenteng.

Melihat data-data yang tersedia dari sumber-sumber perkembangan kota, secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal kota yang hanya seluas 9,7 kilometer persegi pada tahun 1756, telah menjadi seluas 13,5 kilometer persegi pada tahun 1824¹¹. Bukankah dari gambaran ini senyatanya mobilitas geografis Kota Yogyakarta relatif kecil jika ingin kita bandingkan dengan data-data yang ada semenjak tahun 1950-an? Menurut undang-undang tentang pembentukan haminte kota Yogyakarta pasal I maka batas-batas wilayah Kabupaten Yogyakarta ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 24 Juli 1923 nomer 30.¹²

Menurut dokumen-dokumen yang ada dalam perpustakaan kraton, batas ibukota Yogyakarta adalah sebagai berikut¹³:

Sebelah utara, terletak Kampung Jetis hingga Sagan dan Samirono; sebelah timur, dari Kampung Samirono hingga Kampung Lowano sebelah selatan dimulai dari Kampung Lowano hingga Kampung Bugisan; sebelah barat dari Kampung Bugisan sampai Kampung Tegalrejo.

Dari batas-batas kampung tersebut kini dapat diketahui, kecamatan yang ada dalam Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Jetis,
- (2) Kecamatan Tegalrejo,
- (3) Kecamatan Wirobrajan,
- (4) Kecamatan Mantrijeron,
- (5) Kecamatan Ngampilan,
- (6) Kecamatan Kraton,

11 Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta.....*op.cit.*, hlm.

12 *Himpunan Peraturan-Peraturan dari Sedjarah Kota Yogyakarta* (Jakarta: Penerbit Karja-Pradja, 1952), hlm. 118-120.

13 Kota Jogjakarta 200 tahun*op.cit.*, hlm. 23.

- (7) Kecamatan Gondomanan,
- (8) Kecamatan Danurejan
- (9) Kecamatan Gondokusumo,
- (10) Kecamatan Gedong Tengen,
- (11) Kecamatan Pakualaman,
- (12) Kecamatan Mergangsan,
- (13) Kecamatan Umbulharjo; dan
- (14) Kecamatan Kotagede.

Pembangunan Kota Yogyakarta yang bersamaan dengan istana ternyata memekarkan diri ke arah utara : benteng Kompeni, pasar, tempat tinggal residen, tempat tinggal patih dan kampung-kampung yang mengelilingi istana sebagai tempat tinggal kaum bangsawan dan pegawai istana. Perkampungan orang Cina, perkampungan orang Belanda serta perkampungan orang-orang Arab terletak di luar dari tembok benteng kraton. Bentuk dan keadaan Kota Yogyakarta pada awalnya sulit diketahui, jika keterangan tentang kota ini ada maka biasanya keterangan-keterangan itu berdasarkan apa yang tertera di peta yang dibuat pada tahun 1830¹⁴.

Inti Kota Yogyakarta adalah istana yang dikelilingi benteng berparit. Daerah ini biasanya disebut sebagai *Jeron Benteng* yang terbagi atas daerah-daerah seperti alun-alun utara, *teratag pagelaran*, *sitihinggil*, *kemandungan*, *kedaton*, *manganan*, *kemandungan kidul*, *sitihinggil kidul* dan *alun-alun kidul*. Menurut catatan yang ada benteng berparit yang mengelilingi kompleks istana dan kampung-kampung di sekitar istana sebagai tempat tinggal kaum bangsawan dan kerabat raja serta hamba-hamba istana dibangun pada tahun 1778¹⁵.

Benteng berparit ini berbentuk persegi empat dengan luas keseluruhan lebih kurang lima kilometer. Temboknya

14 *Gegevens Over Djokjakarta*, 1925. hlm. 99.

15 Bandingkan, *pertumbuhan Perkampungan di sekitar dalam Benteng dan Luar Benteng* (Jogjakarta: Seksi Kebudayaan PPK, 1953) dan *Peta Pendataan Letak Nama-Nama Kampung di Jogjakarta* (Jogjakarta: DPU, 1957).

terdiri atas dua lapisan yakni tembok luar dan tembok dalam dengan tebal masing-masing setengah meter. Ruangan antar tembok luar dan tembok dalam diisi tanah sehingga tebal keseluruhan tembok mencapai empat meter. Tinggi tembok luar lebih kurang tiga setengah meter, sedang tinggi tembok bagian dalam dua meter. Di keempat sudut benteng dibuat tempat pengintaian dan benteng itu sendiri memiliki lima pintu gerbang yang disebut *plengkung*. Masing-masing nama plengkung itu adalah Plengkung *Jagasura*, Plengkung *Jagabaya*, Plengkung *Nirbaya*, Plengkung *Madvasura* dan Plengkung *Tarunasura*.¹⁶

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa di dalam benteng juga terdapat pemukiman golongan bangsawan yang merupakan kerabat kraton dan para *abdi dalem*. Mereka pada umumnya berada dalam kampung-kampung di luar kompleks istana dengan masing-masing tugas tersendiri seperti *kampung siliran* yang merupakan tempat tinggal hamba silir yang bertugas mengurus lampu-lampu istana; *kampung gamelan* adalah kampung tempat tinggal yang bertugas memelihara kuda istana; *kampung pesindenan* yang merupakan kampung para wiraswara istana; *kampung langenastran* dan *kampung langenarjan* yang merupakan kampung prajurit pengawal istana; *kampung patehan* yang merupakan tempat tinggal mereka yang bertugas mengurus minuman; *kampung nagan* yang merupakan tempat tinggal para pemukul gamelan serta *kampung suronatan* yang merupakan tempat tinggal golongan ulama istana.¹⁷

16 Kelima plengkung ini sebenarnya merupakan gambaran dari kelima nama-nama pasaran yang ada: Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Hal ini disangkutkan dengan pembangunan masing-masing plengkung yang dimulai pada hari pasaran tersebut di atas. Lihat, K.R. T. Soerjobroto, *Tegese Plengkung lan Beteng ing Kraton Surokarto Hadiningrat lan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat* (Solo: Penerbit Soerjokoka, 1923), hlm. 12 – 37.

17 *Ibid.*, hlm. 45.

Keterangan terhadap pemukiman masyarakat *Jeron Beteng*, sebenarnya merupakan kelompok inti pemukiman bagi Kota Yogyakarta. Di luar dari daerah benteng masih berupa tanah persawahan, ladang dan pemukiman rakyat jelata. Di sekitar benteng kompeni, pasar dan istana kepatihan sebelah utara dari kraton merupakan pemukiman penduduk yang paling padat. Kampung-kampung yang tumbuh di luar benteng yang pada awalnya merupakan tempat pemukiman hamba istana dan tidak melayani rumah tangga istana sehari-hari merupakan kelompok seprofesi dalam bidang pemerintahan, militer, pertukangan, pengrajin, serta golongan bangsawan yang memimpinya. Nama-nama kampung itu adalah sebagai berikut : Kampung Pajeksan merupakan tempat kediaman para *jaksa*. Kampung Gandekan merupakan tempat tinggal pesuruh istana atau *gandek*. Kampung Dagen sebagai tempat kediaman tukang kayu atau *undagi*. Kampung Jlagran sebagai tempat tinggal pengrajin penata batu atau *Jlagra*. Kampung Gowongan adalah tempat tinggal para tukang kayu ahli bangunan atau *gowong*. Kampung Menduran merupakan tempat kediaman orang-orang Madura. Kampung Wirobrajan, Patangpuluhan, Daengan, Jogokaryan, Prawirotaman, Ketanggungan, Mantrijeron, Nyutran serta Surokarsan dan Bugisan merupakan tempat tinggal para pasukan istana semenjak kraton ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II¹⁸.

Kampung Mergangsan merupakan tempat tinggal para tukang kayu bangunan atau *mergongso*. Kampung Keparakan merupakan kampung tempat tinggal pelayan istana. Kampung Gerjeh merupakan tempat tukang jahit atau *gerji*. Kampung Kauman merupakan tempat tinggal kaum ulama istana. Kampung Gedong Tengen adalah kampung hamba istana yang menngurusi kepentingan bagian luar istana, sedangkan Kampung

18 Deskripsi tentang kampung-kampung yang berada di luar dan dalam benteng kraton baik yang menyangkut nama dan artinya, bandingkan, *Rincana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vredeburg* (Yogyakarta: LSPK UGM, t.t.), jilid II, hlm. 149-189. dan *Pertumbuhan Perkampungan di sekitar benteng dan di luar benteng* op.cit., hlm. 23.

Gedong Kiwo merupakan tempat tinggal para hamba yang mengurus harta istana. Di samping nama-nama kampung dari para hamba istana ini ada juga kampung yang merupakan tempat tinggal bangsawan di luar istana seperti Kampung Timuran, Ngabean, Pugeran, Notoprajan, Notojudan dan sebagainya.

Di sektor benteng Kompeni dan pasar tumbuh pemukiman orang-orang Eropa dan di sekitar pasar tumbuh pemukiman orang-orang Cina. Tentang pemukiman orang-orang Eropa di luar benteng kemungkinan dilakukan sejak adanya kaum bangsawan istana yang menyewakan tanah jabatan mereka. Golongan Eropa ini biasanya mengusahakan perkebunan dan mereka merupakan golongan pensiunan Kompeni. Beberapa nama orang-orang Eropa yang terkemuka pada waktu itu dan tercatat sebagai pengusaha adalah Andries Klaring, John Jansen, Pieter Wieseman, Baumgarten, de Ceuvelaire, J. Raaf Wendeling, Emmen, Schalk, Weijnschenk, Dom dan sebagainya. Mereka merupakan penduduk golongan tertua dari bangsa Eropa yang bermukim di Kota Yogyakarta. Perkampungan orang-orang Eropa yang pertama terletak di timur benteng kompeni yang disebut sebagai Kampung Loji Kecil disamping golongan Eropa yang berdiam di Loji Besar. Kelak golongan Eropa ini meluaskan pemukiman mereka ke bagian timur Sungai Code dan kampung itu sekarang bernama Bintaran¹⁹. Awal abad ke-20 orang-orang Eropa membuka daerah pemukiman baru di bagian utara kota dan kampung ini disebut Kota baru²⁰.

19 Nama Bintaran berasal dari seorang pangeran kraton yang bernama Pangeran Bintaro. Di tempat ini juga terletak ndalem (rumah bangsawan) Bintaran.

20 Wawancara dengan mbah Slamet, tanggal 18 Juli 1983 (beliau kini berusia 84 tahun dan dahulu bekerja sebagai penjaga malam rumah sakit Bethesda). Kotabaru yang kini bukanlah merupakan kompleks perumahan bangsa Eropa karena rumah yang ada sekarang telah berbentuk campuran. Jikalau dahulu berjalan ke utara maka akan terlihat dari bangunan yang ada bahwa Kotabaru ini merupakan kompleks "ndoro-ndoro tuwan".

Mobilitas geografis Kota Yogyakarta menurut hasil penelitian sementara kami ternyata dilakukan oleh golongan masyarakat Cina. Pemukiman orang-orang Cina yang ada di sekitar Pasar Beringharjo, sebenarnya menunjuk hubungan kehidupan ekonomi antar pasar dan masyarakat cina itu tidak dapat dilepaskan. Hal ini dikarenakan mata pencaharian golongan cina pada waktu itu sebagai pedagang, pemungut cukai, pemilik rumah-rumah candu. Hal semacam ini merupakan suatu kenyataan yang sering ditemukan dari berbagai arsip kolonial, cukai pasar digadaikan kepada orang-orang cina kaya yang mampu membayar sekaligus untuk waktu satu tahun atau lebih. Pengertian fiskal yang berarti pajak merupakan pengertian yang sama atas nama Kampung Beskalan yang terletak dalam lingkungan dengan Pecinan dan Ketandan. Tugas orang-orang cina yang selalu berkaitan dengan ekonomi masyarakat berakibat juga meluasnya pemukiman cina ke bagian utara kota yakni daerah Kranggan. Hal ini sejalan dengan munculnya jaringan transportasi kereta api antar Yogyakarta dan kota pelabuhan Semarang pada tahun 1872.

Di luar dari golongan Eropa dan Cina, orang-orang Arab berdiam di kampung yang bernama Sajidan. Mereka biasanya mempunyai posisi di bawah golongan Eropa dan Cina tetapi dalam bidang ekonomi mereka memegang peranan dalam dunia cukai.

Perkembangan Yogyakarta terutama sesudah tahun 1870 sangat pesat karena munculnya pabrik-pabrik gula di sebelah selatan dan barat kota khususnya yang dimiliki oleh orang-orang Belanda²¹. Ada 17 pabrik gula pada dekade tahun tersebut di atas yang hidup di daerah Yogyakarta. Mengingat perlunya transportasi ekonomi untuk pabrik-pabrik gula ini akhirnya dibukalah jalur kereta api yang dilakukan oleh NIS

21 Untuk masalah pabrik-pabrik gula di kota Yogyakarta, periksa, *Encyclopaedia van Nederlandsch-Indie*, jilid IV (Leiden: 's-Gravenhage, 1921), hlm. 178.; lihat juga, "Aanteekening en Betreffende Particulier Suikerfabricatie" di dalam *TNI*, 1871, jilid I, hlm. 113 - 128.

(*Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij*) yang secara resmi dibuka pada tanggal 2 Maret 1872²². Stasiun pertama yang dibangun oleh NIS di Kota Yogyakarta terletak di Lempuyan. Akibatnya di sekitar daerah ini tumbuh pemukiman-pemukiman baru dari berbagai golongan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta yang kesemuanya pada dasarnya ikut memberikan andil dalam perkembangan geografis wilayah Kota Yogyakarta. Pada tanggal 12 Mei 1887 dibuka sebuah jalur kereta api yang diselenggarakan oleh pemerintah yang biasa disebut SS (*Staats Spoorwegen*), dengan stasiunnya di sebelah selatan Tugu²³. Perkembangan jalur kereta api dalam kota di bagian selatan, untuk para pedagang kecil dari Pasar Beringharjo, dan NIS membangun stasiun kecil di Ngabean. Akhirnya secara berturut-turut NIS membuka jaringan transportasi kereta api ke arah utara dan timur, berakibat juga perluasan pemukiman penduduk yang diwakili oleh orang-orang cina seperti yang terjadi atas daerah Kranggan. Jika untuk daerah bagian utara kota perkembangan wilayah geografis diakibatkan oleh jaringan transportasi kereta api, maka untuk bagian timur kota, perkembangan wilayah geografis karena pemukiman penduduk akibat adanya *NV Constructie Atelier der Vorsterlanden* (CAV). yang berdiri pada tanggal 30 Nopember 1901 sebagai pabrik konstruksi bangunan dan segala bidang teknik serta usaha dagang yang berbentuk jual beli barang-barang dari logam²⁴. Perusahaan ini mampu menyerap tenaga dalam tahun 1942 sebanyak 450 orang tukang, sedangkan pada tahun 1944 mampu mempekerjakan 2300 orang.

22 Untuk sejarah perkembangan perkereta apian di kota Yogyakarta, lihat, Tjokrosumanto, *Selintas Sedjarah Perkembangan Djawatan Kereta Api* (Djogjakarta: Penerbit Bersoedara, 1951) hlm. 15 - 67.; Brosur *Angkatan Moeda Kereta Api Berjoeang*, tt, hlm. 2 - 8; Soepran Kastomo, *Dari Oeap Menjadi Diesel* (Bandung Pertetakan doea-doea, 1958), hlm. 15 - 28.

23 Tjokrosumanto, *ibid.*, hlm. 8.

24 Lihat, *Sejarah Singkat Perusahaan Besi Daerah Istimewa Yogyakarta "P.D. PUROSANI"*, 1981.

2. Pertumbuhan Penduduk

Sebagai gambaran umum atas penduduk di Kota Yogyakarta selama 50 tahun, dari tahun 1900–1950 maka secara garis besar dapat dikemukakan bahwa etnis masyarakat yang berada di kota ini adalah sebagai berikut²⁵ :

- a. Etnik Eropa, yang terdiri atas bangsa Belanda, Jerman, Perancis dan Spanyol serta Portugal yang biasanya memiliki pekerjaan di bidang keamanan, perkebunan, dan leveransir kebutuhan hidup masyarakat Eropa sekitar Loji Besar.
- b. Etnik Tionghoa dan Arab yang dimasukkan dalam kelompok orang-orang timur asing dan biasanya memiliki pekerjaan sebagai pedagang/bergerak dalam lapangan perekonomian seperti pemungut cukai pasar, jembatan, rumah gadai, serta rumah candu dan merupakan penghubung masyarakat pribumi dengan masyarakat Eropa untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Yogyakarta.
- c. Etnik Pribumi yang secara garis besar diwakili oleh raja dan para kawulanya yang terdiri atas orang Jawa, Madura, Bugis, Bali yang kesemuanya merupakan pasukan-pasukan istana dan telah memiliki hubungan yang cukup lama dengan masyarakat Jawa semenjak munculnya dinasti pedalaman yang menggantikan hegemoni dinasti pesisiran.

25 Untuk serangkaian sumber-sumber penduduk setelah dijumlahkan dan dikurangi, baik dari tahun 1850-an hingga 1950-an, lihat dalam: *Kolonial Verslag* (The Hague: Departement van Kolonien, annual, 1849-1929).; Pauline D. Milone, *Urban Areas in Indonesia Administrative and Census Concepts* (Berkeley: Institute of International Studies University of California, 1966) Masri Singarimbun, *The Population of Indonesia, 1930-1968: A Bibliography* (London International Planned Parenthood Federation, 1969).; *Volkstelling 1930* (Batavia: Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933-1936), 8 vol.; Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1970).; *Pirang Tjatjah sak Temene ing Njobo beteng kuwi?* (Ngajogjakarta, 1923) menyebut bahwa sebenarnya penduduk di luar benteng kraton menurut perkiraan kasar berkisar satu juta lebih.; T.S. Raffles, *The History of Java* (London: Black, Parbury and Allen, 1817), 2 vols.

Pembagian atas golongan²⁶ masyarakat yang menempati ruang dan posisi tertentu atas jenis pekerjaannya di wilayah Kota Yogyakarta semenjak tahun 1900 – 1940 adalah sebagai berikut³⁷ :

Komposisi Golongan Masyarakat tahun 1900 – 1940

No.	Golongan Masyarakat	Jenis Pekerjaan	Lokasi Tempat Tinggal
1.	Europa yang terdiri atas: Orang Belanda Jerman, Perancis serta keturunan Spanyol/Portugal.	Keamanan, perkebunan, administrasi/Keuangan.	Loji Kecil dan Loji Besar, Kotabaru, Bintaran dan Sagan.
2.	Timur Asing yang terdiri atas: orang Cina dan Arab.	Pedagang, Mandor, Penarik pajak.	Pecinan, Sayidan, Kranggan Loji Kecil.
3.	Melayu yang terdiri atas : Jawa, Madura Bugis, Bali, Lombok, Sunda.	Penguasa tradisional, kawulo alit	Dalam benteng kraton dan setiap wilayah kasultanan.

Sumber : Catatan kaki no. 25.

26 Istilah golongan ini dipinjam dari: Abdurrachman Surjomihardjo, "Golongan Penduduk di Jakarta, Sebuah Ikhtisar Perkembangan" dalam: *Seni Budaya Betawi, Pra Lokakarya Penggalan dan Pengemibangannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1976), hlm. 27–35.

27 Komposisi ini dibuat berdasarkan sumber-sumber tertulis sebagaimana yang dipergunakan dalam catatan kaki no. 25, sedangkan untuk jenis pekerjaan dan lokasi tempat tinggal berdasarkan peta wilayah perkembangan pemukiman di Yogyakarta yang dibuat tahun 1924. Perubahan atas luas wilayah untuk kota Yogyakarta terjadi setelah tahun 1910 untuk daerah Kotabaru, sedangkan untuk daerah Bintaran ternyata lebih dahulu. Untuk daerah Sagan yang menurut cerita lama dibangun oleh orang Perancis yang bernama Franzoius Sagan sebenarnya bersamaan dengan perkembangan Kotabaru.

Data-data tentang pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun 1900–1930 adalah sebagai berikut²⁸ :

Tahun:	Jumlah penduduk
1900	1.084.327
1905	1.118.705
1917	1.374.168
1920	1.282.815
1930	1.559.027

Angka kenaikan penduduk dalam jiwa dari tahun 1900–1905 adalah sebesar 34.372 jiwa; dari tahun 1900–1917 sebesar 255.463 jiwa dari tahun 1917–1920 terjadi penurunan sebesar 91.353 jiwa; sedangkan dari tahun 1920–1930 mengalami kenaikan sebesar 276.212 jiwa. Secara total pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta semenjak tahun 1900–1930 adalah sebesar 465.700 jiwa.

Menurut sebuah buku berbahasa Jawa yang terbit tahun 1923 maka data penduduk di luar benteng Kraton Yogyakarta adalah sebagai berikut²⁹ :

Tahun:	Jumlah penduduk
1923	1.123.024
1925	1.124.562
1928	1.427.815
1930	1.320.442

Menurut data yang ada setelah sensus penduduk tahun 1930 klasifikasi golongan masyarakat untuk kota Yogyakarta, sebagai berikut (%)³⁰ :

Indonesia	Eropa dan keturunannya	Cina	lain-lain
89.27	4.09	6.52	0.12

28 Widjojo Nitisastro, *op.cit.*, hlm.; 6.; Bandingkan juga dengan Pauline D. Milone, *op.cit.*, hlm. 116. khususnya untuk jumlah penduduk di kota Yogyakarta pada tahun 1905.

29 Pirang Tjatjah sak Temene ing Njobo Beteng Kuwi*op.cit.*, hlm. 9–12.

30 Pauline D. Milone, *op.cit.*, hlm. 124.

Klasifikasi semacam di atas sebenarnya memang kurang terperinci mengingat bahwa untuk golongan masyarakat Eropa yang ada di Kota Yogyakarta ada orang Jerman, Perancis. Meski demikian minimal data yang disebutkan di atas dapat memberikan gambaran secara umum atas golongan-golongan masyarakat di kota ini³¹.

Jika data-data tentang penduduk terasa kurang hal ini dikarenakan terbatasnya sumber yang dapat dijangkau, serta penuh dilangsungkannya sensus itu sendiri secara "modern" baru pada tahun 1930-an. Sebelumnya untuk kurun waktu abad 19 memang ada bentuk pencatatan penduduk, akan tetapi data yang dapat diperoleh masih merupakan kompilasi catatan secara lokal dari para pamong praja setempat. Demikianlah secara gambaran umum telah dicoba untuk melukiskan hal yang berkaitan dengan penduduk di Kota Yogyakarta selama 50 tahun dari tahun 1900–1950.

B. Sejarah Pemerintahan Yogyakarta

Seperti telah diketahui secara bersama bahwa daerah ini merupakan bekas kerajaan, maka sejarah singkat pemerintahan yang ada di sini akan dimulai semenjak hadirnya kekuasaan yang bernama Kesultanan Yogyakarta. Adapun gambaran secara singkat yang dimaksudkan, agar para pembaca mudah mengerti bagaimana pemindahan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada ini sejak awal perkembangannya hingga masuknya ke dalam pemerintahan Republik Indonesia.

1. Masa Pemerintahan Kasultanan

Berdasarkan isi surat Perjanjian Gianti maka sebenarnya pemerintahan kesultanan ini lebih merupakan sekutu Belanda – atau *Oost Indische Compagnie* yang pada prinsipnya harus selalu membantu kegiatan pemerintah kolonial di dae-

31 Ibid., hlm. 22–23 (kategorisasi atas etnis dirasakan belum tepat karena penggolongan yang dilakukan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial).

rah Jawa. Masa pemerintahan kasultanan pada prinsipnya susunan pemerintahan kasultanan pada waktu itu di bawah pimpinan kanjeng sultan dan dibantu oleh pepatih dalem (*rijksbestuurder*). Segala kebijaksanaan pemerintahan dibebankan di puntak pepatih dalem. Pembantu Sultan HB I yang biasa disebut Pangeran Mangkubumi ialah Patih Danuredjo I yang sebelumnya menjabat bupati Banyumas dengan nama Raden Tumenggung Judonegoro³².

Menurut beberapa catatan dari Hartingh dalam *dag register* dilukiskan bahwa pribadi Patih Danurejo I yang mendampingi sultan secara umum sebagai keris dan warongko yang bersatu memimpin pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.

Secara garis besar susunan pemerintahan kesultanan di bawah pepatih dalem adalah bupati patih kepatihan atau sekretaris satu; kedua, bupati pemerintah atau sekretaris dua; ketiga, bupati yang memerintah kabupaten-kabupaten di wilayah kesultanan Yogyakarta; keempat, di bawah bupati ada jabatan wedono yang secara administratif membawahi kawedanan-kawedanan, dan di bawah kawedanan ada jabatan peneu yang memimpin kepenewon-kepenewon dan akhirnya ada lurah yang memimpin kalurahan³³.

Semenjak Sultan Hamengkubuwono I wafat begitu juga Pepatih Dalem Danuredjo I, maka pemerintahan kesultanan jatuh kepada keturunannya dan hanya beberapa tahun pada awal abad 17 kesultanan Yogyakarta harus membagi diri menjadi daerah pemerintahan Pakualaman dan Kesultanan. Batas-batas daerah administratif keduanya ini hanya dibatasi oleh Sungai Code yang membedakan bagian sebelah barat su-

32 Soekanto, *Sekitar Jogjakarta, 1755-1825* (Djakarta: Mahabarata, 1952), hlm. 35.; lihat juga, *Sarasilah Kadanoeredjan* (Jogjakarta: Museum Sanabudaja).; *Babad Gijanti, Pratelan Nama ning Tijang lan Panggenan* (Batavia : 1939).; TBG, Vol. LXXI, 1931, hlm. 323.

33 Lihat dalam, Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta *op.cit.*, hlm. 29.

ngai merupakan daerah kesultanan, sedangkan daerah timur sungai merupakan daerah milik Pakualaman. Susunan pemerintahan di Pakualaman dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kanjeng Gusti I Pakualaman sebagai penguasa kadipaten Pakualaman dibantu oleh bupati patih yang merangkap sebagai sekretaris dengan asisten wedono kota. Di bawahnya lagi ada pimpinan kabupaten adikarto dan di bawah adikarto ada kepenewon-kepenewon, dan di bawah kapanewon ada kelurahan-kelurahan³⁴

2. Zaman Jepang

Beberapa hal yang terjadi sebagai bentuk perubahan pada masa pemerintahan ini adalah dihilangkannya fungsi pepadat dalem oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada masa sebelumnya. Seperti telah diketahui posisi Kesultanan Yogyakarta yang diatur dalam politik kontrak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menguatkan kedudukan pepadat dalem karena sebelum memangku jabatan pepadat dalem ini harus bersumpah akan membantu Belanda jika terjadi konflik antar raja/sultan dan Belanda.

Begitu juga pada bulan April 1945 kewedanan yang ada di lingkungan pemerintahan kesultanan dihapuskan, sedangkan di pusat dibentuk *Paniradyapati* yang beranggotakan enam orang. Keenam orang ini memimpin bagian kesekretariatan atau yang disebut sebagai *sanapanitra*; bidang pendidikan atau *wiyotoprojo*; bagian perencanaan penerangan atau *pacana pancawarsa*; bagian jawatan pemerintahan umum disebut *ayahan umum*; dan bagian ekonomi serta yayasan umum. Susunan yang membantu Sultan akibat kosongnya jabatan pepadat dalem disebut *utaradyapati* yang membawahi urusan pegawai, pemeriksa keuangan dan pengadilan daerah dalem atau *sridarmayukti*.³⁵

34 *Ibid.*; lihat juga, Kota Jogjakarta 200 Tahun*op.cit.* hlm. 24.

35 Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta *op.cit.*, hlm. 30.; Untuk masalah-masalah Kepamongpraajaan, lihat, Riwayat Pamong Praja da-

3. Zaman Republik

Pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII pada 5 September 1945 menjadikan Kota Yogyakarta utuh tanpa pembagian daerah barat dan timur sungai. Menurut maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 18 tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 1946 sebenarnya berawal dari pokok-peraturan maklumat no. 7 yang dikeluarkan 6 Desember 1945.

Kota Yogyakarta yang terdiri atas daerah kesultanan dan Pakualaman menjadi kotapraja yang bersifat otonom sejak keluarnya undang-undang no. 17 tahun 1947³⁶. Disebut juga sebagai haminte Kota Yogyakarta dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Penyerahan wewenang secara nyata dari Daerah Istimewa Yogyakarta baru dapat dilaksanakan dalam tahun 1951 karena terjadinya Agresi Belanda I dan Agresi Belanda II. Beberapa hal sebagai perubahan kota atas susunan pemerintahannya dapat disebutkan sebagai berikut: Kota Yogyakarta menjadi kota yang otonom dengan hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat Haminte Kota, Dewan Pemerintahan Kota dan Walikota³⁷. Kotapraja Yogyakarta berdasarkan undang-undang pokok no. 22 tahun 1948 ditetapkan sebagai daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta³⁸.

lam tiga jaman yang dikeluarkan oleh *Panitia Pertemuan Kangen-Kangenan Eks Pamong Praja se Daerah Istimewa Yogyakarta*, Minggu wage 8 Juli 1979, di Auditorium gedung LPP Yogyakarta.

36 Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta*op.cit.*, hlm. 17.

37 *Ibid.*, hlm. 17.

38 *Ibid.*, Untuk serangkaian perundang-undangan yang membahas masalah otonomi kota Yogyakarta dapat dilihat dalam berbagai buku seperti berikut: R.W. Prodjosugardo, *Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jogjakarta: Djawatan Pamong Pradja DIJ, 1950).; lihat juga, *Kenang-Kenangan Pekan Raja Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1961 di Jogjakarta*.

BAB III PROSES MOBILITAS SOSIAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

Membicarakan masalah di atas untuk memberikan pengertian atas proses mobilitas masyarakat di Kota Yogyakarta selama awal abad ke-20-an, akan dilihat melalui dua aspek kehidupan yang melingkupi masyarakatnya. Alasan untuk mengkaji perkembangan masyarakat melalui aspek kultural oleh karena fenomena sosial juga menunjukkan bagaimana penting dan berartinya kehidupan secara kultural ini. Begitu juga alasan mengkaji kehidupan keagamaan, oleh karena justru dari sisi ini, masyarakat Kota Yogyakarta terlihat menunjukkan gejala perubahan sosial semenjak munculnya kegiatan Zending atau misi dari agama-agama Kristen Protestan dan Katholik.

Agaknya variasi berbagai perubahan itu harus dikaitkan dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya agar dapat terpahami lebih nyata apa yang ingin dikemukakan dalam bab III ini untuk masuk ke dalam bab IV atas mobilitas sosial di Kota Yogyakarta dengan segala perubahannya¹. Bukankah pernyataan solidaritas sosial yang ada pada waktu dari struk-

1 Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Kusumanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 177-261).

tur masyarakat juga menunjuk pada kondisi tertentu? Masyarakat masih bertipe agraris dengan hubungan sosial atas afiliasi kelompok dan lebih bersifat "primordial" dalam hubungan yang menyangkut keluarga, kepercayaan dalam lokalitas tertentu. Bukankah kehidupan yang senyatanya ini atas masyarakatnya digambarkan masih memiliki apa yang disebut *collective conscience* atau totalitas kepercayaan dan sentimen yang sama? Kehidupan "pedalaman" agaknya juga memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal di bidang pertanian?.

Sejak timbulnya kerajaan-kerajaan di Jawa, kehidupan sosial ekonomi selalu dilibatkan dalam permasalahan pertanahan. Tanah menunjuk pada seseorang akan status tertentu begitu juga semua aspek kehidupan yang melingkupi orang perseorangan atau kelompok selalu berhubungan dengan pemilikan tanah dan hasil kerja atas tanah. Masalah-masalah pengolahan tanah ini membawa juga ke arah pengertian ikatan tradisional masyarakat Jawa sendiri, yaitu ikatan vertikal atau feodal yang kian hari menjadi semakin kuat. Menurut Burger², manifestasi dari ikatan vertikal itu merupakan suatu bentuk atas kekuasaan dan kekuatan dalam pertuanan tanah. Hal ini semakin nampak dengan adanya kewajiban menyerahkan hasil daerah, kerja rodi³ untuk para penguasa yang pada kesempatan lain selalu diperluas.

Ikatan-ikatan tradisional ini telah mengangkat kedudukan golongan⁴ bangsawan ke tingkat yang lebih tinggi lagi sementara kedudukan rakyat biasa menjadi semakin merosot tak berarti. Keadaan seperti ini memuncak pada abad ke-18 dan ke-19 manakala kebudayaan Jawa telah mencapai "senja" kemasyurannya. Masalahnya kinisesejauh mana pengertian di

2 D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, terjemahan Prajudi, jilid I (Djakarta: Pradnja Paramita, 1962) hlm. 94-96.

3 Arminus, "Heerendiensten en Misbruiken", *TNI*. XVI (1854), II, hlm. 256-257.

4 Suatu kelompok masyarakat yang tak dapat ditembus oleh kelompok lain. Lihat, Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa, suatu analisa* (Jogjakarta; Penerbit Karja, 1961), hlm. 2.

atas tetap bertahan sejak dikeluarkannya *Agrarische Besluit* atau *Agrarische Wet* pada tahun 1870 atau jauh sebelumnya semenjak adanya memorandum tahun 1851? Arti dan makna *agraria* mengalami perkembangan, sejak gubernur jenderal diberi wewenang untuk menyewakan tanah yang bukan milik desa atau sawah penduduk kepada pengusaha partikelir atau swasta dengan hak *erfpacht* selama 75 tahun dan dapat diperpanjang kembali jika telah habis waktunya. Memorandum tahun 1851⁵ menguatkan garis kerja gubernur jenderal, meski untuk seluruh Jawa pengaruh politik kolonial ini, khususnya yang berhubungan dengan sosial ekonomi agraria baru dirasakan dan berjalan secara intensif sesudah pertengahan kedua dari abad 19 bersamaan dengan proses pengikisan kefeodalan masyarakat Jawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui sistem pendidikannya.

Hak *domein* atau hak milik raja atas tanah-tanah di wilayah kekuasaannya telah lama dikenal oleh masyarakat dalam suatu kesadaran hukum rakyatnya. Namun apakah hukum ini memang telah ada sejak semulasataukah sesuatu yang baru dan dipaksakan, kesemuanya merupakan masalah yang perlu dipecahkan dahulu⁶.

Telah dijelaskan di bagian depan dari bab III ini bahwa struktur masyarakat golongan atas yang terdiri atas raja dan bangsawan ternyata ikut juga menentukan "hak" atas daerah tertentu yang pada gilirannya akan memberikan arti secara sosial atau ekonomi kepada pemiliknya⁷. Konsekuensi logis atas sistem ini bahwa kepala daerah dapat bertindak semua-

5 Isi memorandum itu: "..... daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda, keuntungan yang memang telah menjadi tujuan penaklukannya", periksa: Sartono Kartodirdjo, "Politik Kolonial Belanda Abad 19", dalam *Lembaran Sejarah*, no. 1 (Yogya : Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM, 1972), hlm. 1.

6 K.P.H. Notojudo, *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta* (Yogya, 1975), hlm. 4 - 5.

7 Sistem ini berjalan dengan pengertian Ministerialis atau pemerintahan perwakilan yang dimulai sejak Amangkurat I memerintah.

nya untuk mengeksploatasi daerah yang bersangkutan demi kepentingan pribadi, yang pada gilirannya tanah-tanah itu terlepas dari hak desa dan merupakan suatu *apanase* baru. Di Yogyakarta tanah semacam ini dikenal sebagai *siti dalem pamahosan*⁸.

Hilangnya perdagangan pantai menjadikan daerah pedalaman berkembang, dengan kekhususan dalam bidang perdagangan hasil agraria. Kesultanan Yogyakarta tak terkecuali. Mengapa saat Mangkubumi mendirikan kraton atau daerah kekuasaan yang baru justru masuk ke daerah hulu sungai? Di samping faktor kesuburan juga berkaitan dengan kebudayaan tradisional yang bertitik tolak dari pemujaan dewi kesuburan berikut mitologi dan religinya yang diangkat menjadi kebudayaan istana yang agung⁹.

Oleh karenanya dapat dikatakan berdasarkan hal-hal di atas pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta¹⁰ yang merupakan daerah terbuka atau tertutup dan dipergunakan sebagai arena kegiatan ekonomi masyarakat sebagai tempat jual beli secara bersama dan langsung antar dua golongan yang saling berkepentingan umumnya merupakan tipe pasar pedalaman, dengan jenis perdagangan hasil produksi agraris, seperti; beras, sayuran, palawija, buah-buahan, serta barang kerajinan rakyat.

8 G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels*, XXXIV ('s-Gravenhage, 1931), hlm. 7.

9 Daerah agraris, kepercayaan terhadap dewi kesuburan sangat menonjol. Dewa kesuburan merupakan "ibu" yang selalu menghidupi semua penduduk - hal ini merupakan pandangan filosofis atas tanah induk, yang dalam gambaran feminim diwujudkan dalam pola sebuah desa yang dilingkari oleh pagar-pagar lengkap dengan jalur-jalur jalan - seperti kraton dengan benteng dan jalur jalan yang berpola papan catur. Di tengah bangunan Kraton terletak sumber kehidupan masyarakat, sebuah pesarean ageng dalam ruangan yang disebut *prabasuwasa* atau rumah yang bersinar terang. Prototipe bangunan ini di rumah desa adalah sebuah lumbung padi tempat bersemayamnya dewi kesuburan yang bernama Si. buah lumbung padi tempat bersemayamnya dewi kesuburan yang bernama Sri.

10 F.A. Sutjipto, "Beberapa Tjataan tentang Pasar-Pasar di Djawa Tengah", dalam: *Bulletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM*, no. 3, 1970, hlm. 136 - 150.

Secara garis besar menurut FA, Sutjipto¹¹, masyarakat Mataram yang merupakan pewaris budaya Jawa dapat dibagi menjadi dua bagian. Lapisan atas atau merupakan kelas elite, priyayi luhur, wong gedhe, merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan serta pejabat kerajaan. Sebenarnya jika dilihat dalam sistem katagorisasi maka kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran priyayi yang berasal dari *darah dalem* serta priyayi yang berasal karna pangkat atau pengabdian. Lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau wong cilik alias kawulo alit yang merupakan mayoritas penduduk merupakan kelas yang diperintah. Di dalam kelas ini rakyat dengan berbagai profesi, seperti: petani, pengrajin, buruh atau tukang.

Secara nyata ada keterpisahan masyarakat dalam artian kultural yang sengaja dibuat untuk membedakan golongan-golongan dalam masyarakat. Keterpisahan ini disahkan dalam ungkapan priyayi luhur versus wong cilik, wong njero versus wong njobo, trahing ngaluhur versus turun pidak pedarakan, dan masih banyak lagi yang lain. Keterpisahan secara kultural ini juga terlihat atas pemakaian simbol-simbol atau lambang, seperti: payung, rumah kediaman, kain yang dipakainya¹². Sewaktu Kerajaan Mataram berjaya dalam kehidupan masyarakat dikenal urutan gelar yang terperinci baik secara hubungan darah, jabatan atau sebutan kebangsawanan berdasarkan darah dan sebutan kebangsawanan berdasarkan jabatan¹³.

Secara nyata strata kehidupan dalam sisi kultural ini terus dipertahankan hingga datangnya penguasa kolonial. Sejak kontak "peradaban" berlangsung antar golongan-golongan yang ada dalam masyarakat di Kota Yogyakarta, ternyata

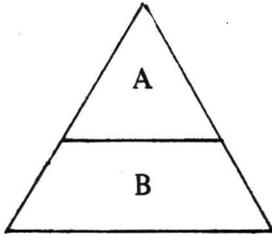
11 F.A. Sutjipto, *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM seri bacaan Sejarah Indonesia, no. 11), hlm. 1 - 2.

12 *Ibid.*, hlm. 3.

13 L.W.C. van den Berg, *De Inlandsche rangen en titels op Java en Madoera* ('s-Gravenhage, 1902), hlm. 2 - 4.

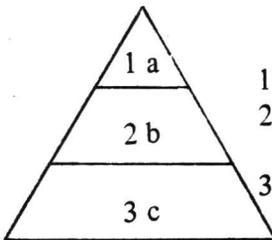
membawa perkembangan sistem kelas yang sejajar dengan struktur yang telah ada. Jelas kesemua ini berlangsung dalam proses sejarah masyarakat Kota Yogyakarta sendiri. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema awal strata masyarakat Jawa :



A = Golongan atas
B = Golongan bawah

Setelah kontak antar golongan dalam masyarakat terjadi, khususnya semenjak datangnya pengaruh kolonial, menjadi:

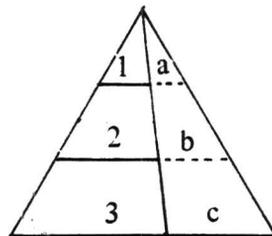


1 = Golongan Eropa a = Penguasa
2 = Golongan Indo + Cina + Arab b = Menengah
3 = Golongan Pribumi c = Bawah

Secara nyata proses ini dapat diartikan sebagai masa evolusi yang bersifat dinamis atau involusi yang bersifat statis

Evolusi = dinamis

Involusi = statis



Garis kultural

Semenjak kapankah strata dalam masyarakat di Kota Yogyakarta itu berubah, akan sulit dapat secara tepat dikatakan, akan tetapi dalam gambaran yang umum¹⁴ dapat dikatakan semenjak bergesernya tindakan kolektif menjadi tindakan individual. Jika hal ini dapat dimengerti, paling tidak perubahan itu terjadi sejak dalam kehidupan masyarakat ada berbagai fungsi yang baru dan berakibat adanya diferensiasi fungsional yang kompleks atas kehidupan masyarakatnya¹⁵.

A. Kehidupan Kultural

Timbulnya berbagai fungsi yang baru dalam kehidupan masyarakat, ternyata melemahkan kehidupan yang sebenarnya terhadap diri masyarakat. Berbagai dasar kehidupan kultural menjadi goyah saat dalam interaksi sosial terjadi kesulitan pemahaman khususnya hubungan manusia dengan tanah, seperti: sistem penggarapan sebagai pertukaran sosial atas tanah dan tenaga serta jasa yang semula merupakan hal-hal bersifat perlindungan, informasi, keamanan dan sistim pertukaran barang berupa sumbangan atau pucungan dalam masyarakat. Resiprositas sebagai prinsip moralitas menjadi melemah¹⁶. Hal semacam ini dikarenakan mundurnya kehidupan kultural karena munculnya priyayi-priyayi baru yang berpendidikan. Gelar priyayi yang "baru" ini mengikis gambaran kehidupan priyayi yang "lama".

Gelar kebangsawanan itu menunjuk juga klas sosial tertentu serta derajat ke beberapa individu itu dekat atau jauh dari raja yang sedang berkuasa, sebenarnya dapat menunjukkan rasa harga diri individu yang bersangkutan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hal seperti ini ditunjukkan dengan sistim perkawinan yang endogami dalam status

14 Soedjito Sosrodihardjo, *op.cit.*, hlm. 9.

15 Andre Beteille, *Social Inequality* (England: Penguin Books Ltd, 1969), hlm. 9 - 42.

16 Lihat pada, Emille Durkheim, *The Devision of Labour* (London: The Free Press, 1964).

tertentu atau atas kehendak raja yang ada pada akhirnya memunculkan gelar jabatan atau kepangkatan menurut keturunan. Saat birokrasi kolonial menjadi mapan, maka berbagai gelar kepangkatan atau jabatan semakin menjadi banyak karena tersedianya posisi semacam itu bagi mereka yang menginginkannya dengan aturan-aturan yang tertentu. Muncul gelar *mas mantri*, *bu sinder*, di samping gelar yang telah ada semacam *mas dono* atau *bu newu*.

Gambaran atas status seseorang yang diperlihatkan oleh rumah kediaman, pakaian kedinasan bahkan payung kepangkatan rupanya merupakan simbol kebanggaan bagi para pengikut bahkan tak jarang menjadi persekutuan kekuatan antar mereka yang sederajat dalam masalah politik atau ekonomi. Akhirnya saat pemerintah kolonial menganggap bahwa perlu dilakukan pengaturan atas kehidupan pejabat di bawah tingkat bupati dengan berbagai bendasupacaranya, kesemua hal itu diatur dalam: *Reglement op de titels, de rangen, de staatsie en het gevolg der inlandsche ambtenaren op het eiland Java aan de Regenten ondergeschikt zijnde*¹⁷.

Sisi lain dari aspek kultural adalah bahasa, yang tidak kalah penting artinya dalam berinteraksi dan mampu menunjukkan dari kelompok mana individu yang bersangkutan itu berasal. Begitu rumit dan sangat ditentukan oleh derajat seseorang baik dari hubungan darah maupun dari jabatannya. Secara garis besar bahasa ini hanya dibedakan menjadi *kromo* dan *ngoko*, meski dalam realisasi pemakaiannya pengertian atas *kromo* sendiri masih terbagi dalam bentuk *kromo inggil*, *kromo madyo*. Hal ini diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sejak seorang individu masih kecil dengan harapan agar

17 Lihat masalah ini dalam berbagai karangan: T.S. Raffles, *History of Java*, jilid I (London: Black, Barbury and Allen, 1817), hlm. 312.; J. Groneman, *Javaansche Rangen en Pajoengs* (Jogjakarta, 1882), hlm. 1 – 12; J.J. Verwijk, "Nota over de staatsie en het gevolg der Inlandsche Ambtenaren in de Gouvernementslanden op Java en Madoera", *TBG*, XVII, 1899, hlm. 452; *Staatblad*, no. 13, tahun 1824.

individu yang bersangkutan mengenal aturan sopan santun sesuai dengan statusnya dalam masyarakat.

Oleh karenanya aspek kultural ini merupakan suatu lembaga kontrol sosial saat berinteraksi bagi masyarakat. Kontrol sosial ini dalam waktu-waktu tertentu terasa sangat ketat bagi seorang individu yang kurang memperhatikan dan berakibat tersingkirnya ia dalam pergaulan masyarakat. Ajaran-ajaran yang merupakan sarana pendidikan untuk hal-hal yang bersifat kultural ini dapat diketemukan dalam berbagai mainan atau tembang-tembangan (nyanyian) kerakyatan khususnya dalam dunia kanak-kanak masyarakat Jawa¹⁸. Pola keseimbangan kosmis ternyata merupakan *paugeran* yang diyakini oleh seorang individu sejak kecil sebagai suatu jalan pembenaran atas kehidupan ini. Jika seorang individu terlalu banyak berbuat melanggar aturan jagad gedhe baik ia sebagai golongan yang memerintah maupun golongan yang diperintah, pasti juga akan berakibat terhadap jagad cilik atau diri individu tersebut. Inilah lingkup gambaran kehidupan kultural yang tumbuh berkembang dan terus dipelihara di Yogyakarta yang pada suatu saat tertentu akan mengalami perbenturan atau penyelarasan saat terjadi kontak kultural dengan orang-orang barat yang diwakili oleh bangsa Belanda.

Semenjak terjadinya kontak dan berakhir dengan dikuasainya kehidupan ekonomi masyarakat Jawa maka sebenarnya telah terjadi pola-pola pertukaran sosial yang pada gilirannya menimbulkan suatu kode moral tertentu dalam tingkah laku anggota masyarakatnya. Menurut Peter Ekeh¹⁹, terjadi pertukaran sosial karena eksistensi diri terlepas dari pertukaran sosial itu sendiri yang mana moralitas pertukaran sosial ini merupakan kekuatan yang mempengaruhi hubungan

18 *Javaansche Meisjesspelen en Kinderliedjes* (Jogjakarta Java Institut, t.t.), hlm. 213-221; lihat juga, Hadisukatno, "Permainan Kanak-Kanak", dalam *Madjalah Budaja*, 1953, hlm. 20 - 27.

19 Lihat pada: Peter Ekeh, *Social Exchange Theory* (London: Heinemann, 1974).

an pribadi baik dalam kerangka ekonomi, sosial ataupun politik. Jangkauan pengaruh dari moralitas semacam ini ternyata luasnya melebihi situasi pertukaran sosial sendiri sebagai dasar hubungan sosial.

Moralitas yang muncul bersamaan dengan proses pertukaran sosial merupakan dorongan atau sangsi pada jaringan komunikasi kultural. Suatu proses pertukaran sosial menciptakan hubungan sosial dan kultural yang pada gilirannya memiliki arti terpisah dan lepas dari tingkat perkembangan ekonomis dan sosial yang ada di dalam masyarakat. Iklim kultural yang muncul menciptakan solidaritas sosial sendiri – gambaran ini melahirkan organisasi Boedi Oetomo dan Gerakan Perguruan Taman Siswa²⁰.

Bagi keduanya, organisasi Boedi Oetomo maupun Perguruan Taman Siswa memiliki akar budaya Jawa, meski golongan priyayi di Boedi Oetomo dianggap lebih rendah golongannya²¹. Perguruan Taman Siswa memberikan dasar pembentukan kepribadian dalam pendidikan dengan amat menghormati tradisi budaya bangsa dalam kerangka mencapai kemajuan nasional. Pertautan antar sendi-sendi keagamaan dan kebudayaan ternyata terlihat dari sistim apa yang disebut *pawiyatan* yang telah dimodernisasikan yang merupakan sendi organisasi Taman Siswa²². Istilah *pawiyatan* sebenarnya menunjuk pada pola hubungan Taman Siswa dan masyarakat Jawa. Alasan ini merupakan hal yang terpenting untuk memasukkan Perguruan Taman Siswa dalam tulisan ber-

20 Ki Soeratman, "Masalah Kelahiran Taman Siswa" dalam *Madjalah Poesara*, djilid XXV, no. 1 - 2, bulan Djanuari - April, 1964, diterbitkan oleh Persatuan Taman Siswa, Jogjakarta, hlm. 34 - 43.; *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922-1952* (Jogjakarta: Panitia Peringatan Taman Siswa 30 tahun, 1952) hlm. 166 - 302.

21 Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism, The Early Years of the Boedi Oetomo, 1908-1918* (Tokyo: Institute of Development Economics, 1972), hlm. 91 - 198.

22 Ki Hadjar Dewantara, "Systeem Pondok dan Asrama itullah Systeem Nasional", *Waskita*, jilid I, no. 2, 1928. hlm. 39-43.

ikutnya, pertautan antar kehidupan budaya dan kehidupan keagamaan dalam kerangka mobilitas sosial di Kota Yogyakarta. Gambaran pemahaman kultural yang dikembangkannya melalui berbagai sarana seperti: tembang, tari dan sistim among adalah merupakan suatu reaksi positif terhadap kolonialisme di bidang pendidikan masyarakat. Ada sekat penahan erosi kultural saat ada penetrasi budaya barat, minimal pertautan antar kehidupan kultural dan agama²³ membuahkan suatu sikap pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya dan melahirkan perubahan sosial yang pada gilirannya akan berguna dalam diri kaum intelegensia di Kota Yogyakarta pada awal abad ke-20 ini.

Perkeberatan dalam masyarakat Jawa dapat dilihat secara nyata dengan pengenalan istila-istilah tertentu untuk menyebut klasifikasi keberatan orang Jawa berdasarkan keturunan. Ada sepuluh urutan generasi ke atas serta sepuluh generasi ke bawah klasifikasi tersebut sebagai berikut :

Generasi ke atas :

1. Wong Tuwo (tiyang sepuh)
2. Embah (eyang)
3. Buyut
4. Canggih
5. Wareng
6. Udheg-udheg
7. Gantung siwur
8. Gropak senthe
9. Debog bosok
10. Galih asem

Generasi ke bawah :

1. Anak (putra)
2. Putu (wayah)
3. Buyut
4. Canggih
5. Wareng
6. Udheg-udheg
7. Gantung siwur
8. Gropak senthe
9. Debog bosok
10. Galih asem

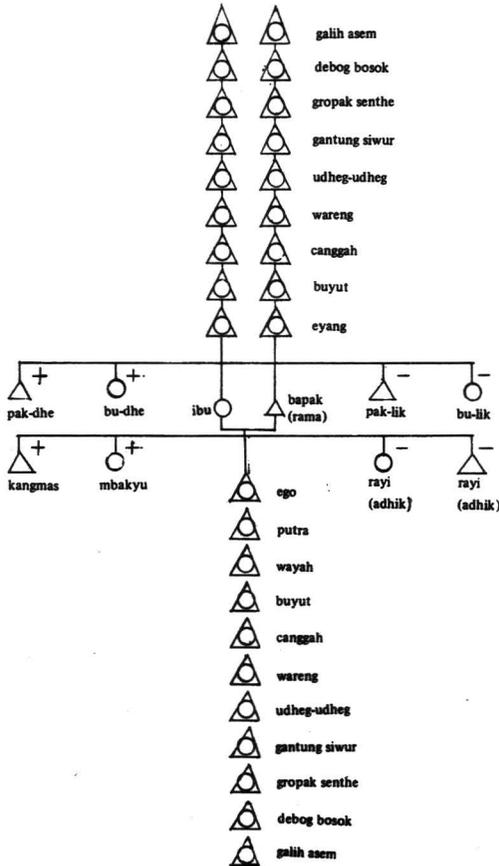
Dari klasifikasi perkeberatan berdasarkan keturunan, sebenarnya kedudukan keluarga batih (*nuclear family*) sangat begitu penting. Tetapi benarkah demikian? Apakah kehi-

²³ Lihat tentang sifat non Islam Taman Siswa, dalam Ruth McVey, "Taman Siswa and the Indonesian National Awakening", *Indonesia*, jilid IV, 1967, hlm. 128 - 149.

dupan dalam keluarga luas (*extended family*) diabaikan? Pertanyaan ini akan diperluas dalam bab IV untuk meninjau kedudukan suatu bentuk kesatuan sosial orang Jawa yang disebut organisasi *trah*.

Untuk lebih jelasnya atas klasifikasi di atas, akan diberikan gambaran istilah kekerabatan orang Jawa berdasarkan keturunan sebagaimana yang tertulis dalam I ini :

Bagan I Istilah Kekerabatan Orang Jawa Berdasarkan Keturunan



Selain istilah kekerabatan berdasarkan keturunan, masyarakat Jawa juga menggunakan istilah-istilah panggilan (menyapa) yang dipakai oleh ego untuk memanggil seseorang kerabat, misalnya:

- Istilah panggilan untuk kakak laki-laki atau perempuan nenek adalah *eyang ageng (embah gedhe)* atau *eyang*.
- Istilah panggilan untuk adik laki-laki atau perempuan nenek adalah *eyang alit (embah cilik)* atau *eyang*.
- Istilah panggilan untuk kakak laki-laki ayah atau ibu adalah *pak-dhe, wa* atau *uwa*.
- Istilah panggilan untuk kakak perempuan ayah atau ibu adalah *bu-dhe, wa* atau *uwa*.
- Istilah panggilan untuk adik laki-laki ayah atau ibu adalah *pak-lik, paman* atau *lik*.
- Istilah panggilan untuk adik perempuan ayah atau ibu adalah *bu-lik, bibi, lik* atau *bi*.
- Istilah panggilan untuk ayah adalah *pak, bapak* atau *rama*.
- Istilah panggilan untuk ibu adalah *bu, ibu, mbok, simbok, biyung* atau *yung*.
- Istilah panggilan untuk kakak laki-laki adalah *kangmas, mas, kakang* atau *kang*.
- Istilah panggilan untuk kakak perempuan adalah *mbakyu, mbak* atau *yu*.
- Istilah panggilan untuk adik laki-laki atau perempuan adalah *adhik, dhik* atau namanya.
- Istilah panggilan untuk seorang laki-laki generasi lebih muda adalah *gus, kelik* atau *lik, thole* atau *le*.
- Istilah panggilan untuk seorang perempuan generasi lebih muda adalah *wuk, genduk* atau *nduk, denok* atau *nok*.
- Istilah panggilan untuk anak laki-laki saudara-saudara-ayah atau ibu yang lebih tua adalah *kangmas, mas, kakang* atau *kang*, sesungguhnya ada kemungkinan bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih muda dari pada yang dipanggil.
- Istilah panggilan untuk anak perempuan saudara-saudara ayah atau ibu yang lebih tua adalah *mbakyu* atau *mbak*,

meskipun ada kemungkinan bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih muda dari pada yang memanggil.

- Istilah panggilan untuk anak saudara-saudara ayah atau ibu yang lebih muda, baik laki-laki maupun perempuan adalah *adhik* atau *dhik*, meskipun ada kemungkinan bahwa *adhik* itu sebenarnya lebih tua dari pada yang memanggil.
- Sedangkan istilah-istilah 'menyebut' misalnya:
- Istilah *keponakan* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari kakak laki-laki atau kakak perempuan.
- Istilah *prunan* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari adik laki-laki atau adik perempuan.
- Istilah *naksanak* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari *pak-dhe* (*bu-dhe*) atau *pak-lik* (*bu-lik*)
- Istilah *misan* digunakan untuk menyebut saudara satu (tunggal) *mbah buyut*.
- Istilah *maratuwa* digunakan untuk menyebut ayah atau ibu suami atau istri seseorang.
- Istilah *besan* digunakan untuk menyebut orang tua menantu.
- Istilah *pripean* digunakan untuk menyebut antara saudara ipar dan ipar.
- Istilah *ipe* digunakan untuk menyebut kakak atau adik suami atau istri.
- Istilah *mantu* digunakan untuk menyebut menantu laki-laki atau perempuan.

Prinsip keturunan di dalam kekerabatan masyarakat Jawa ini telah melembaga. Hal ini diperkuat dengan adanya pengertian keluarga *batih* itu, yang pada dasarnya bagi seorang individu berfungsi sebagai:

- Kelompok yang membantu si individu dan memberikan bantuan yang bersifat utama dan keamanan kehidupannya.
- Kelompok yang mengasuh individu saat kanak-ka-

nak dan pemberi pendidikan awal individu yang bersangkutan.

Sistem perkerabatan yang bersifat *bilateral* dalam masyarakat Jawa, menjadikan seorang individu diperhitungkan untuk mendapatkan warisan menurut garis keturunan ayah maupun ibu. Ada dua macam pengertian harta warisan itu:

1. Harta pusaka
2. Harta pencaharian selama perkawinan

Untuk harta pusaka tidak boleh dijual, harus dipelihara, dan umumnya diturunkan kepada anak laki-laki. Jika seseorang tidak memiliki keturunan dalam perkawinannya, maka harta waris dapat diturunkan kepada kemenakannya. Di dalam hal warisan, masyarakat Jawa mengenal istilah *segendhong-sepikul*. Bagi anak laki-laki memperoleh *sepikul*, sedangkan untuk anak perempuan mendapat *segendhong*. Artinya anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat besarnya harta warisan itu daripada anak perempuan.

B. Kehidupan Keagamaan

Sub bab ini akan menguraikan tentang kehidupan keagamaan yang melingkupi masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk ini harus diperhatikan latar belakang dan perkembangan sejarah penyebaran agama di masyarakat kota ini. Yang dimaksud dengan penyebaran agama ini akan dibatasi bagi agama Kristen Protestan dan Katholik, mengingat bahwa agama Islam sendiri telah lebih awal dipeluk oleh masyarakat Jawa. Proses persebaran agama Islam yang dimulai semenjak abad 16 secara intensif oleh para ulama menjadikan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa mempergunakan gelar yang berkaitan dengan agama Islam, seperti sultan, yang pada prinsipnya sebagaimana dinasti Mataram Islam memanipulasi pengumpulan gelar-gelar itu²⁴.

24 Untuk pembicaraan ini, lihat pada: H.J. de Graaf, "Later Javanese Sources and Historiography", dalam Soedjatmoko, et.al., *An Introduction to In-*

Seperti yang terjadi di Eropa pada awal perkembangan sejarah "keimanan", berbagai agama ikut memberikan andil dalam proses perjalanan masyarakatnya, begitu juga untuk kehidupan di Kota Yogyakarta. Agama Islam yang lebih dahulu dianut masyarakat akhirnya disusul oleh agama Kristen Protestan atau Katholik karena adanya kontak kultural sejak datang orang-orang barat ke daerah ini²⁵. Kesemua itu pada gilirannya ikut memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam proses mobilitas sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialnya baik dalam pembangunan kesehatan dalam bentuk membangun rumah-rumah sakit atau dalam bidang pendidikan. Di bidang kesehatan masyarakat, beberapa rumah sakit yang dikelola oleh agama Kristen Protestan seperti Rumah Sakit Bethesda atau yang dikelola oleh agama Katholik seperti rumah sakit Panti Rapih bahkan yang dikelola oleh agama Islam seperti rumah sakit Muhammadiyah, di kawasan Kota Yogyakarta lebih menunjuk pada "gerakan keagamaan". Kehadiran lembaga-lembaga kesehatan masyarakat itu memang tidak bersamaan, tetapi pada dasarnya merupakan hasil suatu kontak kultural dalam sebuah peradaban manusia dari suatu masa yang dalam gambaran umumnya merupakan usaha transformasi kegiatan manusia dan berpengaruh terhadap struktur-struktur sosial yang ada serta perilaku suatu masyarakat²⁶.

Kuatnya hubungan antar rumah sakit di masyarakat dengan kehidupan agama, menjadikan tulisan ini harus melihat

donesian Historiography (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 128; J.H. Meinsma (ed.), *Babad Tanah Djawi* ('s-Gravenhage, 1941), hlm. 68 & 133; F.A. Sutjipto, "Panembahan dalam Sistem Titulatur Tradisional", *Bulletin Fak. Sastra & Kebudayaan UGM*, no. 1, 1969, hlm. 88.

25 Pengertian kontak kultural ini harus dilihat dalam kerangka perubahan sosio-kultural sebuah masyarakat. Lihat, Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 38 - 49.

26 H. Harta, "Acceleration in Social Change", dalam, F. Allen, *Technology and Change*, (New York, 1957), hlm. 27.

meski dalam gambaran yang serba umum hadirnya beberapa kehidupan agama di atas besertahal-hal yang melingkupinya di Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Agama Katholik

Awal perkembangan agama Katholik di Yogyakarta adalah semenjak adanya kontak pribadi antar pastor van Lith dengan Pangeran Sasraningrat. Akan tetapi kehadiran Gereja Katholik di Yogyakarta, dilakukan oleh seorang missionaris Indo Belanda yang bernama Henri van Driessche SJ²⁷. Suatu sekolah misi yang pertama kali dibuka di kota ini adalah *Standaardschool* di daerah Kumendaman pada tahun 1917. Setahun kemudian berkat bantuan beberapa orang Pangeran, pada tanggal 1 Agustus 1918 dibuka dua HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dengan murid sebanyak 450 orang. Pada tanggal 19 September 1920 dari kongregasi *Santa Perawan Maria yang Terkandung Tak Berdosa* (OO atau FIC) lima bruder tiba di Indonesia dan memulai karyanya dengan mengambil alih kedua HIS. Taman Kanak-kanak dibuka pada tahun 1918 dan sekolah putri Jawa (HIS) dibuka pada tahun 1920 oleh para suster Fransiskanes.

Di samping pastor van Driessche, tugas missionaris di Kota Yogyakarta juga dilakukan oleh pater Frans Strater SJ. Ia memulai tugas di Yogyakarta pada tahun 1918. Pada tahun 1922 ia menjabat pimpinan Novisiat Serikat Jesus yang baru dibuka di Kota Yogyakarta. Ia lebih banyak bergerak di pedesaan sekitar Yogya. Banyak sekolah Katholik yang dibangunnya tanpa harus bersaing dengan sekolah negeri. Sedapat mungkin pastor Strater memulai dengan mendirikan *Staandaardschool* yang lamanya lima tahun dalam daerah yang dianggap strategis. Pembangunan sekolah biasanya berlanjut dengan masuknya sebagian anak didik menjadi

27 Lihat untuk selanjutnya tentang perkembangan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta, di buku: *Sejarah Gereja Katolik Indonesia* (Ende-Flores: Percetakan Arnlodus, 1974), hlm. 860-866.

penganut agama ini, dan berlanjut dengan dibangunnya ge-
reja sederhana. Pola semacam ini yang dilakukan di desa-desa
dengan mendirikan sekolah desa tiga tahun dan kapel-kapel
kecil dengan pelajaran agama serta persembahan misa menjadi
agama Katholik cepat berkembang di masyarakat.

Permulaan tahun 1922 oleh para bruder FIC secara se-
derhana dibuka sebuah percetakan. Ada tiga tujuan pendirian
percetakan ini :

- (1) barang cetakan Katholik dengan harga murah;
- (2) lapangan pekerjaan bagi orang-orang Jawa dengan kon-
disi sosial yang baik;
- (3) sekedar keuntungan finansial bagi sekolah-sekolah ka-
nisius. Meski pada awal pendirian lebih merupakan kerja
sosial, namun pada akhirnya percetakan ini cukup mem-
berikan arti bagi perkembangan agama Katholik di
Yogyakarta. Masih ada dua proyek yang dikerjakan oleh
para missionaris ini, antara lain :
 - a. Proyek pertukangan membuat perabotan dari kayu
untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah Kani-
sius dan gereja-gereja.
 - b. Proyek keterampilan menjahit.

Perkembangan gereja Katholik di Yogyakarta dengan
berbagai kegiatan sosialnya dapat dicatat sebagai berikut: Pada
tahun 1919 berdiri *Katholieke Sociale Bond* (KSB) dengan
anggota 30 orang Jawa dan 50 orang Belanda. Ide pendirian
KSB dari pater Y. van Rijckevorsel di Jakarta. Bahasa yang
dipergunakan adalah bahasa Belanda untuk kegiatan diskusi
maupun ceramah. Kegiatan KSB di tahun 1920 yang dapat
dianggap berguna adalah diselenggarakannya pekan sosial,
dan membicarakan pelbagai persoalan sosial yang berpangkal
pada *ensiklik Rerum Novarum*²⁸.

Kesatuan umat bagi orang Jawa lebih terasakan dengan
dibentuknya *khalwat*, dan melahirkan *Poesara Katholika Wan-*

28 *Ibid.*, hlm. 871.

dawa. Perkumpulan ini berasal dari Katholik Wandawa yang dibentuk pada tahun 1913, dengan anggota pertama sebagian besar guru tamatan Muntilan. Di Kota Yogyakarta pada tahun 1923 akhirnya untuk golongan putri, terbentuk organisasi *Wanita Katolik*.

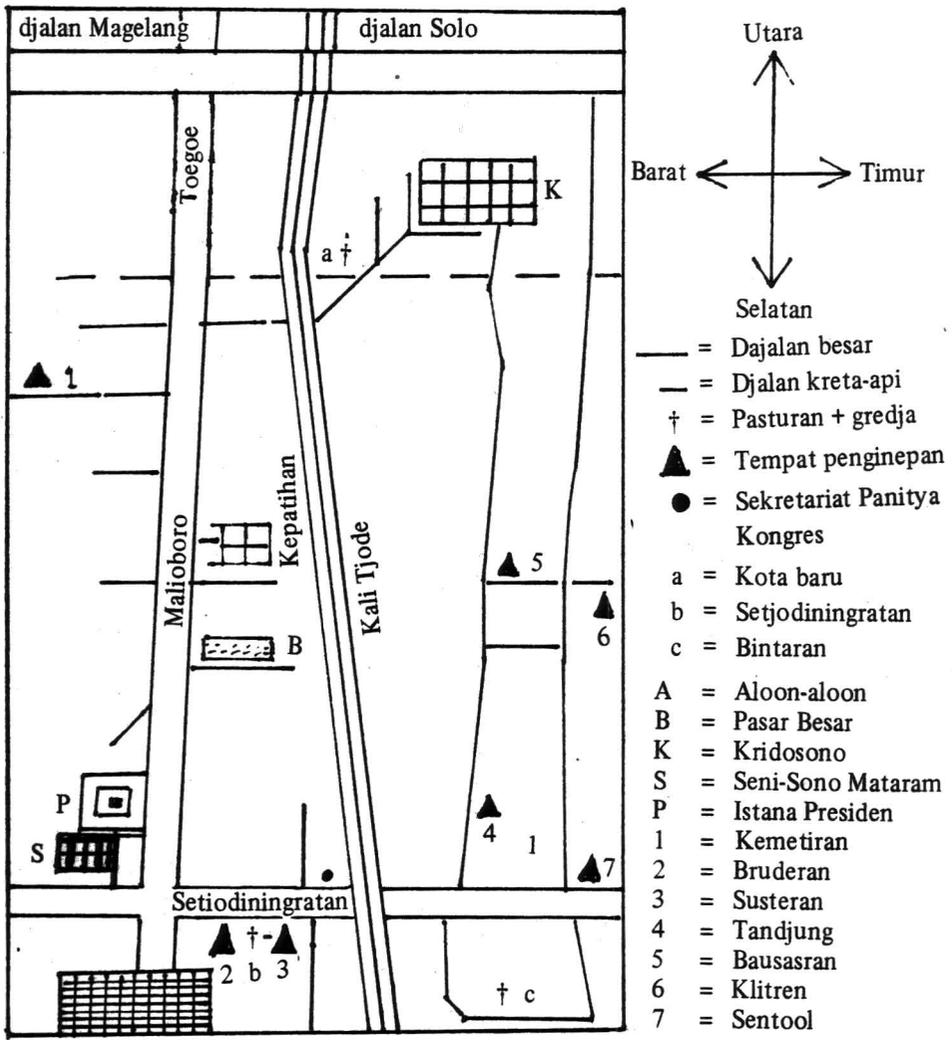
Setahun setelah berdirinya Katholik Wandawa tepatnya pada bulan Januari 1914 diterbitkan sebuah majalah bulanan sebagai media komunikasi antar bekas para siswa Muntilan, dan pada nomor pertama memakai nama Djawi Sraya. Majalah ini merupakan majalah *khalwat* yang pada akhir tahun 1914 memiliki langganan sebanyak 500 orang dan mereka kebanyakan bukan pemeluk agama Katholik. Akhirnya majalah *Djawi Sraya* pada tahun 1920 diganti menjadi majalah *Swara Tama* dan terbit dua bulan sekali. Alasan penggantian karena majalah Djawi Sraya dinilai kurang tepat lagi memaparkan berbagai ajaran sosial ekonomis akibat munculnya berbagai propaganda komunis. Nomor pertama majalah *Swara Tama* beredar ke masyarakat dengan oplag sebanyak 1500 eksemplar, terbitnya tepat pada tanggal 1 September 1920. Kemunduran majalah ini akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan mundurnya agitasi golongan Komunis di masyarakat. Bulan Pebruari 1942 dalam rapat *Poesara Katholika Wandawa* diputuskan bahwa *Swara Tama* menjadi terbitan mingguan dan lebih bersifat Katholik. Majalah ini hidup hingga zaman Jepang.

Perkembangan gereja dalam Kota Yogyakarta membawa juga konsentrasi pemukiman masyarakat pemeluk agama ini. Pada awalnya konsentrasi kegiatan keagamaan berada di gereja Kidul Loji (sekarang di Jalan Panembahan Senopati). Selanjutnya berkembang ke arah utara Gereja Kotabaru²⁹, dan

29 Gereja ini diresmikan tanggal 26 September 1926. Lihat, G. Moedjanto, dan kawan-kawan, *Sejarah Gereja Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan Umatnya* (Yogyakarta: Panitia Peringatan 50 tahun Gereja Antonius Kotabaru, 1976), hlm. 16. Lihat juga untuk perkembangan gereja-gereja dalam *Sint Claverbond Uitgave der P.P. Jezuiten, Ten bate Hunner Missie op Java, 1917 - 1940*.

ke arah timur sebagai gereja Bintaran. Setelah tahun 1930 berdiri gereja Pugeran dan pada tahun 1942 berdiri gereja Kemetiran. Perkembangan gereja ini dapat dilacak melalui schets Kota Yogyakarta sebelum tahun 1930 seperti di bawah ini.

SCHETS KOTA JOGJAKARTA



Sebagaimana telah dikemukakan di bagian depan bahwa pada dasarnya perkembangan ajaran agama dan kesehatan serta pendidikan dalam masyarakat lebih merupakan kontak sosio kultural, maka secara nyata hal ini dapat diterangkan melalui kehadiran sebuah rumah sakit yang dimiliki oleh Missi di Yogyakarta yang bernama *Onder de Bogen*, yang kelak berganti nama menjadi *Panti Rapih*. Berikut ini riwayat singkat rumah sakit itu.

Bulan Januari 1929 di Kota Yogyakarta, hadir lima orang suster kongregasi ST Carolus Borromeus (CB) untuk melayani mereka yang terkena musibah sakit. Nama kelima suster itu adalah : Sr. Gaudentia Brand, Sr. Yudith de Laat, Sr. Ignatia Lemmens, Sr. Simonia, dan Sr. Ludholpha de Groot. Kelima suster ini datang dari jauh, rumah induk biara Suster Carolus Borromeus di Maastricht, Negeri Belanda.³⁰

Sebuah rumah sakit dibangun atas usaha dan prakarsa Direktur Pabrik Gula di Ganjuran yang bernama Ir. Schmutzer. Pembangunan dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Ny. CTM Schmutzer van Rijckeverseel pada tanggal 15 September 1928. Pembangunan rumah sakit ini selesai pada pertengahan bulan Agustus 1929 dan pada tanggal 25 bulan itu, Mgr. van Velsen SJ berkenan memberkati bangunan itu. Tanggal 14 September 1929 secara resmi rumah sakit ini dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan diberi nama Rumah Sakit *Onder de Bogen*. Semenjak tahun 1929 hingga tahun 1950-an beberapa kejadian yang dianggap penting yang berkaitan dengan pembangunan phisik rumah sakit ini adalah

Tahun 1929 : Rumah Sakit *Onder de Bogen* lahir dengan fasilitas yang ada : dua bangsal, perawatan, satu unit kamar bedah, satu unit dapur, sebuah kapel dan rumah biara kecil untuk para suster.

30 Untuk ini, lihat *Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, 1929 - 1979* (Yogyakarta: Penerbit Panitia Pesta emas R.S. Panti, 1979), hlm. 33.

- Tahun : Membangun bangsal Theresia khusus untuk orang miskin, dibangun dengan dana bantuan Broeder FIC.
- Tahun 1939 : Membangun bangsal Anna khusus untuk bagian kandungan.
- Tahun 50-an : Membangun bangsal Carolus, bangsal Albertus, bangsal Yacinta dan Poliklinik umum.

Nama-nama pimpinan rumah sakit dari tahun 1929–1950-an, adalah sebagai berikut:

- Tahun 1929–1932 : Moeder Goudentia CB
- Tahun 1932–1936 : Moeder Ambrosino CB
- Tahun 1936–1939 : Moeder Ignatio CB
- Tahun 1939–1942 : Moeder Agnella CB
- Tahun 1942–1945 : Moeder Sponsaria CB
Tn. Owada + dr. Cucihatsi (pada jaman Jepang).
- Tahun 1945–1947 : Moeder Agnella CB
dr. R.M. Sentral
- Tahun 1947–1950-an : Moeder Cornelianne CB
dr. R.M. Sentral

Onder de Bogen Ziekenhuis merupakan perwujudan nyata dari persambungan ide-ide golongan humanis di Negeri Belanda. Sesuai dengan tema politik etis pada akhir abad ke-19 sesungguhnya rumah sakit ini merupakan juga "niat" yang terkandung di lapisan golongan tertentu dalam masyarakat Eropa. Untuk mengelola rumah sakit ini dibentuklah sebuah yayasan, sedang dalam penyelenggaraan sehari-hari kegiatannya diserahkan kepada para suster dari kongregasi St. Carolus Borromeus. Untuk tidak menyebut para dokter yang pernah bekerja di rumah sakit ini, mungkin akan terasa janggal. Bagaimana dapat diketahui eksis tidaknya sebuah rumah sakit tanpa melihat seluruh aspek yang ada di dalam kehidupannya?

Inilah nama para dokter yang pernah berkarya di bawah atap *Onder de Bogen Ziekenhuis*³² :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Van Der Meulen | 12. dr. Martohusodo |
| 2. dr. Siem Ki Ay, alm | 13. dr. Thio Kiem Djwan |
| 3. dr. R.M. Sentral, alm | 14. dr. FX Tendean |
| 4. dr. Pikauli | 15. dr. Swie Ban Gee |
| 5. dr. Sudarmadji | 16. dr. Suratiman |
| 6. dr. Tan Tjoen Gwan | 17. dr. Suwito |
| 7. dr. Ko Sing Po | 18. dr. Yudono |
| 8. dr. Moh. Salim, alm | 19. dr. Purwonosodo |
| 9. dr. N. Pop | 20. dr. Linawati |
| 10. dr. Ismangun | 21. dr. Sukiman |
| 11. dr. Ong Liang Kiong | |

Berbagai pergeseran tugas dari para suster maupun dokter bangsa Belanda ke tangan orang-orang Indonesia secara nyata terjadi pada zaman pendudukan Jepang³³. Pada masa tersebut nama *Onder de Bogen Ziekenhuis* yang berbau Belanda harus diganti dengan nama Indonesia. Atas usaha Mgr. Alb. Soegijo pranoto, SJ sebagai uskup Semarang memberikan nama yang baru, yakni Rumah Sakit *Panti Rapih*. Artinya rumah penyembuhan.

Gambaran pendidikan paramedis yang diselenggarakan oleh rumah sakit ini adalah:

Tahun mulai Pendidikan	Macam Pendidikan	Dasar Pendidikan minimal	Lama Pendidikan	Keterangan setelah lulus
1939	jururawat	SR	3 tahun	mantri jururawat
1942	bidan	SMP	3 tahun	bidan C
1950-an	perawat	SMP	3 tahun	perawat A

33 Abdul Syukur, *Berbagai hal Perubahan dari istilah sampai Nama Tempat di Beberapa Daerah Semasa Djaman Djepang* (Yogyakarta: Penerbit Muria, 1951), hlm. 12 – 23.

Tabel di atas sebenarnya memberikan gambaran akan pasang surutnya sejarah rumah sakit ini dan makin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pendidikan tenaga paramedis di atas dimaksudkan untuk membantu pengembangan pelayanan kesehatan di bagian-bagian tertentu rumah sakit ini, khususnya di kalangan masyarakat sendiri, melalui pendidikan kesehatan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan untuk berbicara tentang hubungan masyarakat dan pendidikan serta rumah sakit yang didirikan missi ini, ialah mereka yang pernah menjadi pengurus yayasan *Onder de Bogen*. Tanpa keuletan kerja dari mereka, niscaya apa yang dikenal sebagai Rumah Sakit Panti Rapih, kini tidak mungkin akan berkembang sedemikian pesat. Di sini tidak akan disebut kesemua nama-nama mereka yang pernah menjabat sebagai pengurus yayasan ini, cukup jika sampai sekitar 1931 mengingat terbatasnya sumber yang tersedia dan dapat diketemukan khususnya pada zaman pendudukan Jepang.

Sejak 22 Pebruari 1927 – 22 Oktober 1930 susunan kepengurusan yayasan sebagai berikut :

22 Pebruari 1927 :

Ketua	:	L.T.H. Schlattmann
Penulis	:	J.F.M. Strater
Bendahara	:	J.M. Gatzen
Anggota	:	J. van Baal – Pastor C.F.M. Duijzings W.A. Haattink J.R.A.M. Schmutzer.

5 April 1927 :

Ketua	:	Ir. J.R.A.M. Schmutzer
Penulis	:	Ir. J.Th. Rietveld
Bendahara	:	Mr. Th. W.A.F. Versteegh
Anggota	:	H. An. Sterneberg - Pastor Ir. W.A. Hattink.

22 Oktober 1930 :

Ketua : Ir. W.A. Hattink
Penulis : Ir. J.Th. Riefveld
Bendahara : L.B.M. Rattier
Anggota : G.A.M. Schmedding – Pastor

Terjadinya perubahan susunan kepengurusan dari tanggal 22 Pebruari 1927 ke tanggal 5 April 1927, adalah dengan dikurangnya jumlah anggota yayasan menjadi dua orang, sedangkan dari tanggal 5 April 1927 ke tanggal 22 Oktober 1930 juga terjadi pengurangan anggota yayasan dari dua orang menjadi satu orang. Hanya dalam beberapa tahun saja, ternyata yayasan ini telah melakukan penyederhanaan organisasi yang bersifat ke dalam dikarenakan hal-hal tertentu³⁴.

Menurut catatan yang ada semenjak tahun 1931, jabatan penulis ditiadakan jauh sesudah Perang Kemerdekaan. Sesudah perang, rumah sakit ditinggal oleh para pengurus lama dan sebagai pengelola untuk berlangsungnya kehidupan rumah sakit ini, di bawah pengawasan : dr. R.H. Sentral, Mgr. A. Soegijopranto SJ, serta suster Carolus Borromeus.

2. Agama Kristen Protestan

Pertanyaan awal jika ingin melihat perkembangan agama Kristen di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta, adalah: Bagaimanakah Zending pada waktu itu dan siapakah yang menjalin kontak hubungan 'keyakinan' masyarakat Jawa? Pertanyaan ini merupakan dasar pengertian sejarah perkembangan penganut agama Kristen Protestan di lingkungan kehidupan masyarakat Jawa. Bukankah pada awal perkembangannya dari kontak itu, telah dikenal oleh masyarakat Jawa berbagai agama dan telah dianutnya? Mengapa mereka dapat me-

34 Buku Kenangan Lima puluh tahun Rumah Sakit Panti Rapih
op.cit., hlm. 38.

nerima dan akhirnya meyakinkannya? Etnik mana yang paling berperan dalam penyebaran agama ini?

Di bawah ini akan diuraikan serba sedikit tentang proses perkembangan dan penyebaran agama Kristen Protestan di Kota Yogyakarta³⁵. Akan tetapi sebelum itu harus diuraikan terlebih dahulu gambaran umum etnik Tionghoa yang ikut berperan dalam penyebaran agama ini di kalangan masyarakat Jawa.

Orang-orang Tionghoa yang telah bermukim jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat, dan telah menetap beberapa lama biasanya melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli. Hasil perkawinan campuran ini melahirkan sebuah generasi yang biasa disebut sebagai : golongan peranakan Tionghoa³⁶. Sistem kemasyarakatan yang dibentuk oleh orang-orang Barat sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian depan dari tulisan ini menjadikan golongan Tionghoa ini sebagai kelas menengah. Mereka diperlakukan sebagai *vreemde oosterlingen*. Kegiatan perdagangan, dan perusahaan bidang perekonomian menjadikan gerak hidup mereka sangat "mobil", maksudnya, mereka dapat bergerak di kota-kota besar atau kecil³⁷. Tempat-tempat pemukiman mereka yang disebut *Chineesche wijk* menjadikan perkembangan gereja di kalangan orang-orang Tionghoa penganut agama Kristen Protestan mempergunakan bahasa pengantar dalam lalu lintas perdagangan, yakni bahasa melayu danssifat gerejanya menjadi "gereja kota".

Hubungan perdagangan dengan para penguasa khususnya saat pemerintahan Inggris (1811-1815), secara kebetulan

35 Lihat, *Sejarah Perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta* (Yogyakarta: Sekretariat Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, 1983); Th. Muller Kruger, *Sedjarah Gereja di Indonesia* (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959), hlm. 157-161.

36 Liem Kie Hok, *Adanja Orang-Orang Tionghwa dan Keturunannya di Beberapa Kota Pesisiran Djawa* (Semarang: Radjawali, 1937), hlm. 18.

37 *Ibid.*, hlm. 42.

memberikan arti untuk berkembangnya agama Kristen di Indonesia³⁸. *Baptist Missionary Society* dan *London Missionary Society*, sebagai badan-badan Zending Inggris yang bermula akan ditugaskan ke Tiongkok tetapi mengambil perhatian golongan masyarakat Tionghoa yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta dan Surabaya. Para pengabar injil ini, khususnya yang bernama *Medhurst* dari *London Missionary Society* cukup lama bekerja di lingkungan masyarakat peranakan Tionghoa yang berbahasa Melayu. Semangat penginjilan pada pertengahan abad ke-19 menjadikan terhadirnya "perkumpulan untuk pekabaran injil di dalam dan di luar gereja" di wilayah Jakarta. Pimpinan yang terkemuka dari perkumpulan ini ialah Mr. Anthing. Kegiatannya juga melibatkan para pengabar injil golongan pribumi.

Pengabar injil dari golongan masyarakat Tionghoa yang banyak jasanya, bernama Gan Kwee. Ia berasal dari Tiongkok selatan dan menggabungkan diri dalam perkumpulan Mr. Anthing. Ia melakukan kegiatan injil di kalangan Tionghoa totok dan peranakan. Kegiatan ini pada tahun 1866 membuahkan dibaptisnya seorang Tionghoa yang bernama Khouw Tek San, yang pada gilirannya ikut memberikan andil untuk tersebarnya agama ini di daerah Jawa Tengah bagian selatan.

Sejak 1902 kegiatan penginjilan ini untuk daerah Jawa Tengah bagian selatan diambil alih oleh gereja-gereja *Gereformeerd* Negeri Belanda yang memfokuskan kepada orang-orang pribumi dan pembentukan gereja-gereja Jawa. Mulailah perpindahan etnik penginjil dari orang-orang Tionghoa kepada orang-orang Jawa³⁹. Sejalan dengan penginjilan atas orang-orang Tionghoa dibuka pendidikan sekolah seperti: *Hollandsch Chineesche School met de Bijbel* pada tahun 1917.

38 Widyapranawa, *Benih Yang Tumbuh* (G.K.I. Jawa Tengah: BPK, Gunung Mulia, 1973), hlm. 22.

39 *Ibid.*, hlm. 24.

Menurut sejarahnya⁴⁰, perkembangan agama Kristen di daerah Kesultanan Yogyakarta semenjak adanya kontak penduduk di daerah Jawa Tengah dengan agama ini pada tahun 1860. Atas kesadaran sendiri empat orang penduduk diberi sakramen pembaptisan. Pembaptisan ini terjadi di daerah Purworejo, terhadap seseorang yang bernama Khephas oleh pendeta Braams. Alasannya dibaptisnya penduduk itu, karena pada waktu itu untuk kegiatan pembaptisan di daerah kesultanan masih dilarang.

Penduduk yang bernama Khephas atas kesaksian pendeta Lion Cachet mengenal secara baik ajaran Hindu, Budha, maupun Jawa dan disebut :

"Hij is geen gewoon man, die het Nederlandsch even zuiver spreekt als het Malaisch and zijn modertaal, het Javaansch, en daarbij met nog een of twee moderne talenniet onbekend is".

Pada tahun 1891 ada sejumlah 460 jiwa yang minta dibaptiskan, hal ini berkat usaha "gerakan-gerakan keagamaan" yang lebih bersifat kejawan di bawah pimpinan Sadrach⁴¹. "Kebangkitan" masyarakat Jawa untuk memeluk agama Kristen telah dimulai.

Hanya beberapa tahun dari "kebangkitan gerakan itu", pada tahun 1897 perkembangan agama Kristen di Kota Yogyakarta semakin pesat. Hal ini berkat usaha seorang dokter berkebangsaan Belanda yang bernama dr. J.G. Scheurer. Tanggal 1 Juli 1897, ia mendirikan sebuah rumah dengan pendopo untuk membuka praktek perawatan kesehatan bagi siapa yang memerlukannya. Banyak penduduk yang tertarik dan hasilnya masuk menjadi penganut agama Kristen. Usaha

40 Sejarah perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta*op.cit.*, hlm. 1 - 2.

41 Untuk gerakan Sadrah, periksa beberapa buku yang menyinggung masalah ini, seperti; Widyapranawa, *op.cit.*, hlm. 24. Sejarah Gereja Katolik Indonesia*op.cit.*, hlm. 854.; "Proses Identifikasi dan Agama" dalam *Prisma*, LP3ES, no. 6, Juni 1983, hlm. 91 - 93.; Th. Muller Kruger, *op.cit.*, hlm. 156.

sang dokter dibantu oleh seorang penduduk pribumi yang bernama Yoram, sedangkan lokasi prakteknya di daerah Bintaran.

Tahun 1900 di Kota Yogyakarta, kelompok-kelompok pribumisyang menganut agama Kristen telah berkembang. Seluruh penduduk kota yang berjumlah 55.000 orang, penganut agama Kristen sebanyak 900 jiwa. Mereka tersebar di sekitar wilayah Gondokusuman. Semenjak tahun di atas, kebutuhan akan rumah ibadah mulai terasakan, sebagai rumah kebaktian yang permanen. Akhirnya pada tahun 1904 didirikan gereja Mungil yang terletak di sebelah utara simpang tiga dari Kampung *Klitren Lor*. Kapasitas penampungan sebesar 400 pengunjung kebaktian. Bentuk asli dari bangunan gereja itu, kini telah tidak ada. Pada tahun 1953 gedung itu dibongkar diganti dengan bentuk yang baru. Kini merupakan toko buku "Taman Pustaka Kristen" yang terletak di ujung timur Jalan Jenderal Sudirman.

Pembinaan terhadap umat semenjak tahun 1900 ke atas semakin mantap, dan pada tahun 1913 tepatnya pada tanggal 23 Nopember telah memiliki Dewan Majelis untuk mengurus jema'at tanpa bantuan siapa pun juga. Majelis gereja Kristen Jawa Gondokusuman yang pertama memiliki anggota sebagai berikut⁴² :

Sebagai Tua-Tua : Yusup Wasman
Eliada
Kalam Efrayin
Raden Sudikun

Sebagai Diaken : Samuel Wasman
Daniel Wasman

Kemajuan penyiaran agama Kristen semenjak tahun 1913–1920 dilakukan juga melalui didirikannya sekolah-sekolah dasar yang bernapaskan agama Kristen.

42 Sejarah Perkembangan Agama Kristen*op.cit.*, hlm. 3.

Setelah berjalan selama 21 tahun, gedung gereja yang dibangun pada tahun 1904 dirasakan telah tidak dapat menampung umat yang ingin melakukan kegiatan rohani. Jalan tengah yang diambil, menyalurkan kegiatan kebaktian ke daerah Lowanu – Tungkak. Didirikan gereja yang merupakan cabang dari gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Sekarang gereja ini telah berdiri sendiri dengan nama *Gereja Kristen Jawa Mergangsan*.

Meningkatnya mereka yang beribadah di kawasan Gondokusuman mengharuskan adanya tambahan perluasan atas gereja yang lama. Majelis gereja merencanakan dibangunnya sebuah gereja yang baru dengan kapasitas tampung untuk 1000 pengunjung kebaktian. Diusahakan dana dan akhirnya terkumpul untuk awal pembangunan gereja. Peletakan batu pertama pembangunan gereja dimulai pada hari Senin tanggal 18 Nopember 1929 di kampung Klitren Lor. Gedung gereja itu direncanakan selesai pada bulan Mei 1930, tanggung jawab pembangunannya diserahkan kepada Tn. Pluyter.

Akhirnya gedung yang baru ini selesai pada bulan Nopember 1930, berarti mundur beberapa bulan dari rencana semula. Secara resmi gedung gereja baru ini dipergunakan sejak hari Kamis tanggal 11 Desember 1930. Upacara pembukaan dilakukan dengan pelayanan khotbah oleh Pendeta P. Soperter, seorang pendeta Jema'at Kristen Jawa Gondokusuman yang pertama dan pribumi asli yang berasal dari Kotagede Yogyakarta. Setiap minggu kebaktian dilakukan hingga tahun 1940.

Ada masa berkembang ada juga masa suram. Hal ini ternyata berlaku juga untuk gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Semenjak masuknya kekuasaan pemerintahan *Dai Nippon*, umat Kristen di kawasan Gondokusuman mengalami tekanan-tekanan yang cukup berat. Sekolah-sekolah yang bernapaskan ajaran agama Kristen harus ditutup. Bulan Juni 1944⁴³ Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman menda-

43 *Ibid.*

pat perintah dari pembesar *Dai Nippon* agar segera mengosongkan bangunan gereja dan menutupnya. Jika mau melakukan kebaktian pemeluk agama Kristen Jawa Gondokusuman dapat melakukannya di gedung bekas pabrik es yang sekarang menjadi Gedung Bioskop Rahayu. Perintah itu jelas diterima tanpa dapat berbuat apa-apa.

Pada tanggal 5 Juli 1944 semua barang yang dipergunakan untuk kebaktian terpaksa diangkut dan dipindahkan ke gereja yang lama. Ternyata setelah dikosongkan gereja itu dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan keperluan pemerintah *Dai Nippon*. Tanggal 9 Juli 1944 kebaktian dimulai, karena tempatnya begitu sempit terpaksa para pengunjung ada yang berdiri di luar gedung gereja. Selama itu kebaktian dirasakan kurang tenang. Inilah keprihatinan yang dirasakan oleh penganut agama ini pada masa pendudukan Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan mengakhiri keprihatinan itu, gedung gereja Kristen Jawa Gondokusuman di Klitren Lor di kembalikan kepada ummat Kristen dan kembali dipergunakan sebagai kebaktian. Acara kebaktian setelah Proklamasi dilaksanakan pada hari Minggu bulan September 1945, dan ini mengawali kegiatan tugas panggilan bidang kerohanian agar terbina dan tegaknya iman umat Kristen di Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Telah disinggung sebagaimana pada bagian depan bahwa perkembangan agama berkaitan erat dengan dibangunnya perawatan kesehatan masyarakat. Hal ini tak terkecuali dengan perkembangan agama Kristen Protestan di daerah Yogyakarta. Perkembangan rumah kesehatan masyarakat yang dilola oleh agama Kristen ini, sejarahnya adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 27 April 1893 di gereja *Nieuwa Westerkerk* di Rotterdam, dokter J.G. Scheurer diteguhkan sebagai *missionary art* (dokter utusan) oleh pendeta DS. Lion Cochest. Penguatan jabatan tersebut mengambil pernyataan injil

Lukas 10 ayat 9 yang berbunyi : ” . . . dan sembuhkanlah orang sakit di situ, serta katakan padanya Kerajaan Allah sudah dekat denganmu”. Dengan bekal ayat ini berangkatlah dokter J.G. Scheurer sebagai utusan *Ds. Nederlandsche Zendingsvereniging* ke Indonesia untuk ditempatkan di Jawa Tengah.

Pelayaran ke Indonesia dilakukan pada tanggal 13 Mei 1893 bersama seorang pemuda Jawa yang bernama Yoram. Perjalanan memakan waktu selama satu setengah bulan. Tanggal 27 Juni 1893 mereka tiba di Batavia. Mereka berdua merupakan orang-orang pertama yang membangun bidang kesehatan dari Zending, dan telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai Rumah Sakit Bethesda.

Pada awalnya dokter Scheurer harus belajar bahasa Jawa di Surakarta. Izin bekerja sebagai dokter utusan datang, dia dipindahkan ke Yogyakarta. Di kota ini ia bertempat tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Bintaran. 17 Maret 1897 merupakan awal kerjanya saat mendirikan rumah darurat dari bambu di samping rumahnya untuk tempat praktek pengobatan. Bangunan ini selesai pada bulan Juni 1897. Digantungkan sebuah papan bertuliskan ”Gusti Yesus Poenika Djoeroe Wiloedjeng Sedjatos”. Mulailah kerja yang akan dicatat oleh sejarah sebagai gerak perkembangan agama Kristen di daerah Kota Yogyakarta.

Tanggal 1 Juli 1897 poliklinik sederhana itu dibuka dengan pemuda Yoram sebagai pegawainya⁴⁴. Tidak ada upacara pembukaan dan tidak ada pesta, yang ada hanya semangat kerja dan cinta kasih untuk mereka yang menderita serta memerlukan perawatan kesehatan. Pada bulan-bulan pertama orang yang datang ke poliklinik untuk berobat sekitar 10-15 orang. Hanya dalam waktu satu setengah tahun tercatat yang datang berobat sebanyak 15.367 orang. Selama itu dr.

44 *Sejarah Singkat Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta* (Yogya: Humas R.S. Bethesda, 1976), hlm. 1 – 15.

J.G. Scheurer telah berhasil menjalankan operasi dengan *narcose* sebanyak 12 kali hanya dengan peralatan sederhana dan di atas meja makan.

Kebutuhan akan ruangan dalam perawatan orang-orang sakit semakin terasakan. Terpaksa direncanakan membangun sebuah rumah sakit dengan kapasitas 150 tempat tidur. Berbagai instansi membantu keinginan dr. Scheurer ini, khususnya dari Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono VIII. Sebidang tanah di daerah Gondokusuman, seluas 30.000 meter persegi dihadiahkan⁴⁵. Tanah ini sebelumnya merupakan kebun tebu milik *Onderneming Muja-Muja*. Sultan memberikan ganti kepada perkebunan tebu muja-muju untuk menempati daerah lain. Saat itu, tanah yang akan dipakai sebagai bangunan rumah sakit berada di luar dari apa yang disebut Kota Yogyakarta.

Tanggal 20 Mei 1899 peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dilakukan oleh anak dr. Scheurer. Symbolisme ini melambankan keinginan sang dokter agar cita-citanya diteruskan oleh anaknya. Tanggal 1 Maret 1900 dapat diselesaikan 2 *zaal* untuk merawat penderita laki-laki dan wanita. Tanggal 13 Maret 1900 ada 15 pasien yang dirawat di bangunan itu, di antaranya seorang wedono dari Madiun dan harus dioperasi. Kehadiran wedono ini ternyata cukup memberikan arti bagi rumah sakit, masyarakat lebih mengharapkan berperannya rumah sakit ini khususnya bagi mereka yang tinggal di Kota Yogyakarta. Ada kaitan kehadiran seorang pejabat di rumah sakit sebagai pasien dengan penghargaan dan kepercayaan masyarakat yang semakin besar atas usaha-usaha di bidang kesehatan masyarakat dari Zending. Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan bantuan terus mengalir, Pengawasan pembangunan dan perencanaan pmba-

45 *Ibid.*, hlm. 1. menyebutkan seluas 30.000 meter persegi, sedangkan catatan bagi hak tanah Kasultanan menyebutkan lebih kurang 38.000 meter persegi.

ngnan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta yang bernama *Coeverden Andriani*. Permintaan sang pendeta, agar rumah sakit ini diberi nama "Petronella" sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.

Perkembangan rumah sakit yang berawal dari poliklinik di Bintaran, kini telah memiliki 3 *zaal* laki-laki dan 2 *zaal* wanita, hanya dalam waktu beberapa tahun. Nama yang diberikan untuk rumah sakit *Zendingsziekenhuis Petronella*. Masyarakat waktu itu mengenalnya sebagai: *Dokter Pitulungan* atau *Dokter Tulung*.

Tahun 1904 ruwat perawatan penderita penyakit kusta dan orang-orang miskin milik kesultanan yang terletak di daerah Tungkak, diserahkan kepada *Petronella* untuk dipergunakan sebagai tempat merawat penderita yang tidak memerlukan pengawasan dan pengobatan secara kontinu di bawah bimbingan dokter. Setelah dipugar, rumah sakit ini dapat menampung dan merawat 50 orang pasien dan akhirnya dijadikan rumah sakit pembantu Tungkak yang merupakan cabang dari *Petronella Hospital*.

Rumah sakit pembantu di Tungkak pada awalnya diserahkan di bawah pengawasan seorang pimpinan yang bernama mas mandor Sambiyo. Julukan semacam di atas bertahan hingga tahun 1925. Selanjutnya oleh Kasultanan, di sebelah selatan rumah sakit pembantu Tungkak itu dibangun sebuah tempat untuk penampungan orang-orang miskin atau gelandangan. Penyelenggaraan dan pengawasan diserahkan kepada rumah sakit pembantu Tungkak ini, tak terkecuali masalah makan mereka.

Tugas dr. Scheurer begitu banyak, selain mendidik tenaga perawat kesehatan juga berdialog dengan para pasien tentang "kasih Allah". Para perawat kesehatan umumnya belum memiliki ijazah. Sarat diterima sebagai perawat kesehat-

an adalah mereka yang pernah dirawat dan harus penuh cinta kasih terhadap sesamanya. Kerja keras dan udara tropis yang bertahun-tahun tidak dihiraukan suatu waktu harus diperhitungkan juga. Hal ini terjadi pada diri dr. Scheurer. Tahun 1906 beliau terserang penyakit beri-beri yang melemahkan badannya. Ia harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Negeri Belanda. Pekerjaan yang telah digelutinya selama bertahun-tahun harus ditinggalkan. Penggantinya ditunjuk dr. H.S. Pruys. Beliau semula dokter militer dan pembantu dr. Scheurer. Pergantian hanya bersifat sementara. Tetapi rupanya penyakit yang diderita dr. Scheurer tidak pernah sembuh sehingga pimpinan rumah sakit Petronella tetap dipegang oleh H.S. Pruys hingga tahun 1918. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta, maupun pemerintah daerah dan pusat, dituntut sekali lagi kerja keras. Hasilnya dana mengalir dari Pemerintah Daerah Yogyakarta dan pabrik-pabrik gula untuk membangun rumah sakit pembantu di sekitar daerah Yogyakarta.

Pendidikan untuk para juru rawat semakin diintensifkan dan untuk pendidikan jenis ini diterbitkan buku pelajaran dalam bahasa Jawa. Pendidikan di bidang kebidanan mulai dirintis. Selama bertugas di rumah sakit Petronella, dr. H.S. Pruys tidak pernah mengambil cuti ke negeri Belanda. Pada tahun 1918 harus meninggalkan kerja yang dicintainya karena menderita sakit. Ditunjuk dr. J. Offringa⁴⁶ yang sejak tahun 1912 telah mendampingi dr. H.S. Pruys.

Kebaikan dari pimpinan dr. J. Offringa membuahkan semakin banyaknya orang-orang yang membutuhkan perawatan kesehatannya datang ke rumah sakit Petronella⁴⁷. Bantuan tidak hanya datang dari dalam kota tetapi juga datang dari luar kota, seperti Boyolali, Salatiga, Delanggu, Klaten, Kutoarjo, yang pada umumnya pernah sebagai pasien rumah sakit

46

47 *Ibid.*, hlm. 3.

ini dan menyatakan terima kasih dengan memberikan sumbangan material. Kesulitan merupakan hal yang harus dapat diatasi, seperti, kurangnya bahan makanan di masyarakat dan epidemi yang silih berganti menjadikan kerja Zending yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat membuahkan banyak pengikut di berbagai daerah tak terkecuali di sekitar Kota Yogyakarta. Kesemuanya jelas berkat: "kepercayaan dan doa kepada Tuhan Allah", berbagai kesulitan itu dapat diatasi.

Keramahtamahnya sangat terkenal di antara para penderita, hal ini jelas berkaitan dengan pesan-pesan sebelum tahun 1912 dari dr. Scheurer yang selalu diingatnya: "*Naar Javaan, gaan goed, naar dan moot je minder zijn dan de minste Javaan*". Banyaknya pasien yang berobat ke Petronella menjadikan perlunya penambahan ruangan atau perluasan rumah sakit ini. Tahun 1920 dr. J. Offringa mengajukan rencana kepada *Gereformeerde kerken in Nederland* di Amsterdam untuk memperbesar *Petronella Hospital* agar dapat menampung 500 pasien. Rencana ini diterima oleh *Gereformeerde Kerken in Nederland*, bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memberikan tanah yang luas membujur ke barat dan berbatasan dengan Jalan Bedog, dan di bagian selatannya dengan *Militaire Hospital*. Tahun 1924 pembangunan dimulai dan selesai pada tahun 1925. Bantuan ini didapatkan tidak saja dari pemerintah daerah dan pusat tetapi juga dari pabrik-pabrik gula, *onderneming-onderneming* tembakau, perusahaan kereta api *de Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*. Selesaiannya pembangunan gedung baru itu tepat juga 25 tahun usia rumah sakit ini sejak peletakan batu pertama pada tanggal 20 Mei 1899. Rumah seorang pangeran yang bernama Gondokusumo dibeli dan dipergunakan sebagai asrama putri. Letaknya tepat di sebelah barat *Petronella Hospital*.

Tahun 1926 dibeli sebuah rumah di Jalan Lempuyangan. Setelah diperbaiki dipergunakan sebagai klinik bersalin. Rumah sakit bersalin ini dikepalaisoleh suster Enserinok. Tahun 1928 suster ini meninggal dunia dan diganti oleh suster J.

Prins. Hingga kini masyarakat umum mengenal klinik bersalin cabang Petronella Hospital ini sebagai klinik *Suster Prins*.

Bertambahnya pasien, perluasan bangunan ternyata juga mengharuskan semakin teraturnya kegiatan administrasi rumah sakit ini. Untuk hal itu, pekerjaan dalam bidang administrasi dipercayakan kepada seorang akuntan negeri yang bernama L. Gogzen. Sebuah mesin penghitung pembukuan merek *National Cash Register* dibeli seharga 10.000 gulden. Pemeriksaan kas dilakukan oleh kepala kantor.

Semua perawat mendapat julukan *mandor*, setelah tahun 1925 berubah menjadi *pak* atau *den mantri*. Hal ini bermula dari mantri *verpleeger* atau *ster*. Semua perawat yang menuntut pendidikan dan memiliki ijazah dari ujian negeri disebut *mantri verpleeger* untuk golongan pria dan *mantri verpleegster* untuk golongan wanita. Sebelum ujian negeri berlaku, Rumah Sakit Petronella mengadakan ujian sendiri bagi perawat medis tersebut. Mengapa terjadi perubahan sistem ujian bagi perawat? Ternyata hal ini disesuaikan dengan Peraturan pemerintah yang baru tentang pemberian subsidi atau permintaan subsidi. Bagi rumah sakit yang menghendaki subsidi pemerintah diwajibkan melampirkan daftar nama para juru rawat yang telah lulus dalam ujian negeri. Sejak tahun 1926 *Petronella Hospital* menyelenggarakan ujian mantri *verpleeger* yang pertama dihadapan panitia ujian negeri untuk urusan kesehatan yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan (*Dienst der Volksgezondheid*). Pengikut ujian negeri pertama ini diikuti oleh mereka yang telah memiliki masa kerja sekitar 15 – 20 tahun lebih.

Tahun 1930, dr. J. Offringa dipanggil oleh pemerintah untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (*Hoofd van den Dienst der Volksgezondheid*), dan berakhirilah masa dinas beliau sebagai pimpinan *Zendingsziekenhuis Petronella*.

Sebagai penggantinya ditunjuk dr. K.P. Groot, yang sebelumnya memimpin *Zendingszuikenhuis Surakarta*⁴⁸. Bertepatan dengan pergantian pimpinan rumah sakit Petronella ini, pada tahun 1930, merupakan awal krisis ekonomi. Penghematan di segala bidang harus dilakukan. Tahun 1932 diberlakukan peraturan gaji baru yakni mengurangi sebanyak 10% dari gaji lama untuk para pegawainya. Pegawai yang tidak cakap diberhentikan atau dipindah ke tempat yang lain. Kegiatan poliklinik auto's yang semula diadakan untuk melayani masyarakat pedesaan ditiadakan. Ternyata penghematan ini juga tidak banyak menolong. Hal ini ternyata dari sikap beberapa pabrik gula. Semula mereka membiayai secara nyata tapi krisis ekonomi tidak dapat ditolerir sehingga bantuan biaya untuk Petronella Hospital juga harus dikurangi sebanyak 25% setiap tahun Akibatnya beberapa cabang rumah sakit ini hanya tinggal merupakan poliklinik. Usaha Dr. K.P. Groot untuk mengatasi kesulitan keuangan, menaikkan pungutan bagi orang-orang yang berobat ke rumah sakit ini dan mengedarkan sumbangan dalam berbagai bentuknya. Tahun 1934 dibangun *zaal* kelas satu untuk golongan mampu dengan memakai sebagian dana pensiunan.

Tahun 1939, Eropa terlibat dalam Perang Dunia II. Negeri Belanda tak luput juga. Akibat didudukinya Negeri Belanda oleh Jerman maka tertutuplah bantuan untuk *Petronella Hospital*. Menghebatnya perang dunia kedua juga melibatkan kesiagaan mereka para golongan penduduk Eropa di Indonesia. Tahun 1941 oleh pemerintah, Petronella Hospital supaya mempersiapkan rumah sakit darurat di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Dibutuhkan 4000 tempat tidur dari kayu jati yang dapat dilipat komplit dengan kasur, bantal, sarung, sprei dan pakaian orang sakit, hingga piring, sendok dan perlengkapan dapur. Jangka waktu yang pendek, harus juga disiapkan obat-obatan dan bahan makanan yang tahan

⁴⁸ *Ikhtisar pergantian pimpinan Petronella Hospital*, stensilan, Yogyakarta, 1973, hlm. 8.

lama. Jawatan gedung-gedung negeri, membangun rumah sakit darurat di sekitar Pingit⁴⁹, dengan kapasitas 500 pasien. Di Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Mata dr. Yap, dibangun beberapa *zaal* dengan perlengkapan yang memadai. Pendidikan jururawat di perbanyak. Tugas semacam ini diserahkan kepada *Petronella Hospital*, sedang biayanya ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya persiapan telah selesai tepat pada waktunya.

Perang Asia Timur Raya berkobar dan pada akhir bulan Desember 1941 korban-korban peperangan mulai berdatangan. Kebanyakan serdadu Amerika. Sebelumnya, telah ada persetujuan antar komandan tentara Amerika dan dr. K.P. Groot untuk mengatasi korban perang ini. Tentara Amerika yang luka dan membutuhkan perawatan dapat dirawat di rumah sakit ini, para perwira menempati bagian klas, sedangkan para bintaran di bagian *zall*. Membanjirnya jumlah korban peperangan mengharuskan semua penderita yang dirawat di *Petronella Hospital* harus dipindahkan ke rumah sakit darurat di Pingit, kecuali bagi mereka yang harus dioperasi.

Tahun 1942, Jawa berhasil diduduki pemerintahan militer Jepang, Yogyakarta tak luput dari hal ini. Sebelum itu semua tentara Amerika yang dirawat di *Petronella Hospital* berhasil dipindahkan ke tempat lain. Kerugian yang diderita oleh *Petronella Hospital* akibat perang ini adalah diambilnya rumah sakit Pingit beserta perlengkapan oleh tentara pendudukan ini. Berakhirlah pimpinan yang dipegang oleh dr. K.P. Groot. Untuk sementara pimpinan dipegang oleh dr. L.G.J. Samalo hingga beberapa bulan.

Semenjak datangnya beberapa dokter dan dua perawat wanita ke rumah sakit ini, maka praktis rumah sakit telah dikuasai pemerintahan pendudukan. Digantilah nama *Petronella Hospital* menjadi *Jogjakarta Tjuo Bjoin*. Berakhirlah azas dan

49 Riwayat Singkat Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.....*op.cit.*, hlm. 6.

nama *Petronella Hospital*. Harus mulai merintis kembali napas rumah sakit Kristen. Masa-masa itu merupakan kemunduran yang hebat, semua rumah sakit pembantu dan berbagai poliklinik dikuasai oleh pemerintah daerah.

Kemerdekaan tiba juga. Akhirnya pada tanggal 25 September 1945, beberapa dokter Indonesia dan para kepala bagian mengadakan rapat. Memutuskan bahwa rumah sakit *Jogjakarta Tjuo Bjoin* harus kembali ke azas semula, yakni rumah sakit Kristen yang dikelola oleh swasta. Putusan rapat ini diajukan ke rapat umum pada tanggal 26 September 1945, pukul 08.00. Keputusan disepakati secara bersama, kembali ke azas semula. Pada awalnya pemerintah Jepang enggan mentaati permintaan ini, setelah diancam dengan akan dilakukan tindak kekerasan, baru diserahkan. Akhirnya secara aklamasi disepakati bahwa rumah sakit ini akan dipimpin oleh dr. L.G.J. Samalo (sebagai direktur); dr. J.O. Ricauly (sebagai wakil direktur); sdr. Foertanus (sebagai kepala kantor); sdr. R. Soetoyo (sebagai kepala perawat) Rupanya tanggal 26 September merupakan hari bersejarah bagi bekas Rumah Sakit *Petronella*. Hari itu juga nama rumah sakit berganti menjadi *Rumah Sakit Pusat*. Bantuan untuk mengembalikan nama "dokter tulung" harus dicari kembali. Setelah pemerintahan berjalan, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bantuan diberikan kepada Rumah Sakit Pusat ini. Selama subsidi belum diterima, rumah sakit menyediakan pelayanan cuma-cuma kepadaspasien yang tidak dapat membayarnya.

Tahun 1948, kembali rumah sakit yang telah banyak mengalami perubahan jaman diuji kembali, Tentara kerajaan Belanda menyerbu Yogyakarta, rumah sakit mengalami kekurangan biaya karena semua instansi pemerintah tidak berjalan alias ditutup. Gaji untuk para pegawainya terpaksa ditunda begitu juga untuk membeli perlengkapan obat-obatan. Bantuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan arti ter-

sendiri. Sokongan pribadi berupa uang. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta, berbagai kesukaran masih dialami oleh rumah sakit ini. Banyak usaha dan tawaran dari berbagai pihak ditolak: Rumah sakit pusat harus kembali menjadi rumah sakit Kristen. Akhirnya pada rapat tanggal 28 Juni 1950 diputuskan agar umum mengetahui bahwa rumah sakit pusat itu rumah sakit Kristen, maka namanya diganti menjadi Rumah Sakit *Bethesda*. Sejak saat itu kepengurusannya diserahkan kepada swasta. Terjadi sekali lagi pemindahan kekuasaan pimpinan rumah sakit, dr. L.G.J. Samalo yang telah menjadi dokter negeri harus menyerahkan jabatannya kepada dr. Kasmolo Paulus. Berikut ini urutan Direktur Petronella Hospital – Rumah Sakit Bethesda.

Tahun	1897 – 1906	dr. J.G. Scheurer
Tahun	1906 – 1918-	dr. H.S. Pruys
Tahun	1918 – 1930	dr. J. Offringa
Tahun	1930 – 1942	dr. K.P. Groot
Tahun	1942 – 1945	dr. L.G.J. Samalo (Zaman Jepang)
Tahun	1945 – 1949	dr. L.G.J. Samalo
Tahun	1949 – 1957	dr. Kasmolo Paulus.

3. Agama Islam

Ajaran agama Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa pada masa pertumbuhan dan perluasan Kerajaan Hindu Majapahit⁵⁰. Sejalan dengan adanya kontak-kontak perdagangan dari para pedagang Islam India terjadi proses pengislaman. Mengapa kini dari proses kontak itu gambaran terhadap para penganut masih kurang dalam pengetahuan doktrin-doktrin Islam pada abad ke-16⁵¹? Relatif masih sa-

50 Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm. 8.

51 T.S. Raffles, *The History of Java*, vol. II (London: Black, Berbury and Allen, 1830), hlm. 2.

ngat terbatas, kontak di pedalaman Jawa dengan negara-negara Islam di luar daerahnya. Hegemoni Belanda merupakan salah satu alasan mengapa Islam di Jawa mengalami kelambatan penyesuaian sebagaimana di tempat asalnya. Kehadiran perusahaan dagang Hindia Belanda (VOC) yang pada gilirannya mampu mengembangkan kekuasaannya atas bidang kehidupan ekonomi dan politik di dua pertiga dari seluruh wilayah daerah Jawa⁵², berakibat kehidupan agama ini yang selaras dengan jalur perdagangan juga mengalami hambatan. Menurut Raffles⁵³, kegiatan Belanda itu tidaklah semata-mata berdasarkan konsep penyebaran agama Kristen tetapi lebih jauh ke bidang masyarakat Jawa untuk kelangsungan ekonomi dan politik pemerintahan Belanda.

Masalahnya kini, apakah dengan pembatasan gerak yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda⁵⁴ kepada perseorangan atau kelompok atas kegiatan keagamaan juga membawa akibat yang mendasar bagi proses penyebaran agama Islam itu sendiri di pedalaman Jawa? atas gejala kehidupan masyarakat waktu lampau, hal-hal ini dapat dipertanyakan kembali akibatnya bagi orang banyak dalam penghayatan keagamaan itu. Kegiatan ritual yang lama bukanlah lebih dominan dalam kehidupan masyarakat yang senyatanya?

Pengokohan kehidupan ritual yang lama lebih dapat dikatakan sejalan dengan pengokohan kekuasaan tradisional itu

52 B.H.M. Vlekke, *Nusantara, A History of East India Archipelago* (Cambridge: Massachusetts, 1945), hlm. 146 - 163.

53 *Raffles*, *op.cit.*, hlm. 3.; Untuk masalah ini lihat juga bukunya F. de Haan, *Priangan* (Bataviassch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912), hlm. 12 - 13. (pernyataan ini sering ditolak oleh para sarjana Islam di Indonesia. Mereka pada umumnya menyatakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda menyokong gerakan berbagai organisasi misi Kristen di Indonesia khususnya di pulau Jawa pada periode abad 19 hingga pertengahan abad 20).

54 Lihat pada: F. de Haan, *op.cit.*, hlm. 474 dan 747.; Jacob Vredendrecht, "The Hadj, Some of Its Features and Functions in Indonesia" dalam *BKI*, jilid 118, 1962, hlm. 98.; J. Eisenberger, *Indie en de Bedebaart naar Mekka* (Leiden, 1928), hlm. 188.

sendiri. Hal semacam ini akan lebih dapat terpahami manakala melihat proses islamisasi di Jawa dalam kerangka global. Agama Islam ternyata menyebar ke masyarakat Jawa dengan proses yang tidak mudah, penuh tantangan dan bertahap⁵⁵. Tahapan awal yang bermula, pada awal abad ke-15 sampai abad 16. Pengislaman hanya dalam bentuk kuantitasnya, belum segi-segi kualitas⁵⁶. Tahap selanjutnya pemantapan yang bertahap untuk mengganti kepercayaan lama tetapi berakhir dengan terpotongnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa sehingga mengalami "kekurangsempurnaan". Mengapa hal itu dapat terjadi? Donald K Emmerson⁵⁷ mengatakan:

"Sejauh Islam dianggap anti Kolonial, kaum priyayi lebih cenderung untuk mengembangkan pola kehidupan keagamaan yang lebih bersifat kejawaan daripada memilih menjadi santri. Ketakutan Belanda kepada orang-orang yang sangat condong kepada Islam mempengaruhi struktur dan kesempatan dalam administrasi kepegawaian pribumi; pada waktu seorang patih yang dilaporkan menghina Islam oleh Belanda dinaikan pangkatnya menjadi bupati, maka hal itu jadi pelajaran yang jelas bagi teman-temannya"

Kutipan di atas menunjukkan secara nyata bagaimana sebenarnya posisi seseorang ditentukan oleh batas dirinya dengan jarak pemahaman agama yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupannya itu. Kenyataan seperti ini lebih merupakan gambaran yang senyatanya atas simbil-simbol kekuasaan seperti "sultan" yang telah mengalami degradasi arti yang tersimbol di dalamnya. Akankah diingkari jika akhirnya dinamika ajaran agama Islam juga semakin kehilangan "elanvital"

55 Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 12.

56 Oemar Sahidu, *Sedjarah Perkembangan Agama Islam, Wujud dan Tjitra untuk bermasyarakat* (Surabaya: Badan Usaha Penerbit Islam, 1963), hlm. 34 - 39.

57 Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1976), hlm. 39.

nya saat penguasa daerah seperti sultan pada abad ke-18 dan 19 tidak begitu berambisi meningkatkan pengetahuan dan ke-taatan pendudukan terhadap ajaran agama Islam seperti sema-sa pemerintah Kesultanan Demak dan Pajang? Untuk Yogya-karta, tak terkecuali. Kekuatan politik di kota-kota yang telah diambil alih penguasa kolonial Belanda ternyata juga membatasi aktivitas Islam sebagai sebuah kekuatan utuh dari gambaran sosial, politik atau kultural, masyarakat yang ber-agama Islam. Menurut Zamakhsyari Dhofier⁵⁸ penyebab se-macam di atas, menjadikan kekuatan Islam lebih berada di pedesaan. Hal ini juga berlaku di sekitar daerah Yogyakarta hingga awal abad ke-20.

Bukan maksud mengecilkan arti dan sumbangan agama Islam untuk terjadinya pengertian mobilitas sosial di Kota Yogyakarta. Hal semacam ini harus dikemukakan mengingat terbatasnya kemampuan jangkauan berbagai sumber yang ada tentang peranan Islam dalam kehidupan masyarakat kota ini. Jika ada tentang berbagai sumber yang membicarakan agama Islam, tak dapat diingkari lebih merupakan gambaran dari ke-hadiran "Islam Muhammadiyah" yakni suatu gerakan sosial keagamaan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada awal abad ke-20 di Kota Yogyakarta.

Untuk itulah uraian dalam sub bab tentang agama Islam maka fokus pembicaraan akan lebih dilibatkan terhadap or-ganisasi ini, minimal pada awal pergerakannya kesemuanya bersumber dari ketidakpuasan para pemimpinnya atas kehi-dupan agama Islam yang senyatanya dalam lingkungan dan tradisi kraton. Hal ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi tinjauan perkembangan dan kehadiran organisasi keaga-maan Islam yang bernama Muhammadiyah⁵⁹. Berawal dari

58 Zamakhsyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 13.; Lihat juga, Clifford Geertz, *Islam Observed* (New Haven and London: Yale University Press, 1968), hlm. 11-12.

59 James L. Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Move-ment in Indonesia Islam* (Philippines: The Benyamin/Cummings Publishing Company, 1978), hlm. 29.

Yogyakarta perkembangan ini menyebar ke berbagai daerah dis luar batas wilayah Kota Yogyakarta dan pada gilirannya membawa sikap-sikap tertentu bagi para anggotanya dalam menatap kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Akan-
kah diingkari jika pada awalnya pendirian sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah ini bermula hanya dari lingkungan kerabat dekat pencetus ide dan dari warga Kampung Kauman, Yogyakarta akhirnya menjadi suatu kekuatan yang mampu mengadakan suatu bentuk perubahan kehidupan ?

Kelahiran organisasi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari gambaran perjalanan hidup Mohammad Darwis, yang kelak berganti nama menjadi Achmad Dahlan. Ia merupakan anak yang Keempat dari Kiai Haji Aboebakar bin K.H. Sulaiman, seorang khotib masjid besar Kesultanan Yogyakarta. Darwis melakukan pengembaraan jasmani maupun rohani⁶⁰ ke berbagai tempat lembaga pengetahuan Islam di luar Indonesia⁶¹, dan pada tahun 1905 kembali ke Indonesia⁶². Ia mengganti namanya sebagai seorang muslim yang telah kembali dari Mekkah, dan menerjunkan dirinya ke pergerakan ke masyarakat dan keagamaan. Di samping menjadi pengurus Boedi Oetomo kring Kauman, beliau juga menjadi *adviseer* Serikat Islam, serta anggota *Djamijah Chorijah Jakarta*⁶³.

Perkembangan agama Islam dalam lingkungan masyarakat dinilai begitu lamban dan senantiasa berada dalam "zaman Jahiliah"⁶⁴. Harus ada perubahan ke arah dinamisasi ummat.

60 Junus Salam, *K.H.A. Dahlan, Amal dan Perjuangannya* (Jogjakarta: Dokrah P.P. Muhammadiyah, 1968), hlm. 61.

61 Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900 1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 85.

62 *Benteng Vredeburg*, jilid II (Yogyakarta: Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978), hlm. 192.

63 Junus Salam, *op.cit.*, hlm. 10.

64 Pengertian ini memiliki kaitan dengan kebodohan, kemiskinan dan tiadanya kesehatan baik lahir maupun batin. Lihat Hamka, *Pengaruh Muhammad Abdul di Indonesia* (Djakarta: Tinta Mas, 1961), hlm. 5.

Sebagai khotib masjid besar kesultanan dengan gelar "Ketib Amin" persoalan kehidupan ummat Islam dapat ditangkap secara jelas, bahwa dibutuhkan suatu "kegairahan kehidupan" dalam ajaran Islam jika agama ini tidak ingin menghadapi kemandegan-kemandegan atas berbagai persoalan kemasyarakatan⁶⁵.

Uraian di sini tidak akan mengetengahkan gambaran Achmad Dahlan secara terperinci, oleh karena telah banyak orang baik sarjana asing maupun dalam negeri yang melakukan studi kemasyarakatan di lingkungan Kota Yogyakarta menyinggung apa yang mau diuraikan. Disadari bahwa uraian semacam di atas hanya lebih merupakan "gambaran pengulangan" maka di sinipun pengkisahan tentang organisasi ini hanya menyangkut masalah yang dianggap relevan dengan apa yang ingin dibahas.

Beberapa tindakan yang cukup bernilai untuk diuraikan dari pribadi Achmad Dahlan adalah, berkeinginan membersihkan atau tepatnya memurnikan ajaran Islam kepada landasan pokok tuntunan dari Al Qur'an dan Hadist. Di samping itu, berkeinginan memperbaiki pendidikan dan pengajaran serta penyebaran kebudayaan Islam dalam masyarakat. Semangat Ukhuwah Islamiyah dihidupkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi dan politik, yang pada garis besarnya kesemua itu berguna untuk menghadapi aktivitas dari agama Kristen dan Katholik di masyarakat⁶⁶.

Perlawanan atas ide-ide yang dikembangkan oleh Achmad Dahlan tidak hanya datang dari luar kelompoknya seperti dari kelompok Zending dan Missi, tetapi juga datang dari

65 *Peringatan 40 tahun Muhammadiyah* (Djakarta: Panitia Peringatan 40 tahun Muhammadiyah, 1952), hlm. 367 - 368.

66 Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam yang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah* (Jogjakarta: Penjelenggara Publikasi Pembaharuan Pendidikan/Pengajaran Islam, 1962), hlm. 54.

kelompok Islam⁶⁷. Hal ini terjadi saat keinginan membenarkan kiblat shalat dengan serong ke arah utara. Biasanya shalat menghadap lurus ke barat.

Kelahiran organisasi Muhammadiyah tanggal 18 Nopember 1912, pada dasarnya memberikan suatu koreksi atas dunia Islam sendiri di Kota Yogyakarta. Para penganjur gerakan organisasi ini bermula hanya dalam lingkaran kecil, dan mereka adalah : Abdullah Sirat, Haji Achmad, H. Abdurrachman, RH Sarkowi, H. Muhammad, R H Djaelani, H. Anies dan RH Fekih⁶⁸. Ijin berdiri pada mulanya hanya oleh pemerintah kolonial untuk lingkungan dalam Kota Yogyakarta. Kebangkitan gerakan organisasi keagamaan ini dijiwai oleh semangat Surat Ali Imrom ayat 104⁶⁹ yang bermakna :

”Bangunlah di antara kamu ummat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan untuk berbuat baik, serta melarang berbuat jahat. Ummat yang demikian itulah ummat yang berbahagia”.

Pengikut Muhammad yang berkumpul dalam organisasi Muhammadiyah, menyadari bahwa gerakan itu lebih bersifat⁷⁰ :

- a. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
- b. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
- c. Lapang dada luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam.
- d. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang syah.

67 Tantangan yang sangat keras datang dari penghulu Kraton Kasultanan Yogyakarta yang bernama Kyai Haji Mohammad Halil Terlepas dari cara dan bentuk pertentangan ternyata sebenarnya hal itu memperlihatkan suatu gambaran khas budaya Jawa atas "kekuasaan dan wewenang" seseorang atas pengikut-pengikutnya.

68 L. Stoddard, *Dunia Baru Ilam* (Djakarta: Panitia Penerbit, 1966), hlm. 308.

69 Benteng Vredeburg, *op.cit.*, hlm. 206.

70 *Pedoman Pendjelasan Tentang Kepriabdian Muhammadiyah* Jogjakarta: P.P. Muhammadiyah, 1963), hlm. 15.

- e. Amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang serta menjadi contoh yang baik.
- f. Kerjasama dengan setiap golongan Islam dalam usaha menyiarkan dan menegakkan agama Islam serta membela kepentingannya.
- g. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.
- h. Membantu pemerintah dan bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi Allah swt.
- i. Aktif dalam masyarakat dengan maksud Islam dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam.
- j. Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Hal di atas akhirnya melahirkan pandangan yang utuh atas kerja di dalam organisasi ini. Akhirnya dalam beberapa saat saja, gerakan keagamaan ini mampu memberikan andil yang nyata terhadap gerak perubahan masyarakat Kota Yogyakarta. Pendidikan dan sarana kesehatan yang dikelolanya merupakan rangkaian kerja nyata atas ide-ide yang pernah muncul pada awal abad ke-20. Proses selanjutnya menunjukkan bahwa ide-ide yang telah direalisasikan itu sebagai wadah gerakan ummat Islam di Kota Yogyakarta mampu bersaing dan sejajar dengan Missi atau Zending untuk memajukan masyarakat.

Proses perkembangan organisasi Muhammadiyah ke seluruh Indonesia pada dasarnya melalui dua jalan. Pertama, organisasi ini tersebar secara organisatoris atau kelembagaan resmi melalui berdirinya cabang-cabang serta ranting-rantingnya. Kedua, tersebar sebagai faham atau ajaran tentang kemurnian Islam di kalangan ummat Islam Indonesia⁷¹.

Meski penekanan atas usaha Muhammadiyah tidak pada banyaknya cabang-cabang dan ranting-ranting yang berdiri te-

71 Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 86 - 89; Wawancara H. Achmad Adaby Darban, tanggal 26 September 1983.

tapi bagaimana faham dan cita-cita semula dapat tersebar luas di masyarakat⁷³. Disadari secara utuh oleh para pendukungnya, organisasi Muhammadiyah adalah alat bukan tujuan, yakni alat untuk berdakwah, berjuang serta beramal dalam strategi menjunjung keluhuran agama Islam⁷³.

Usaha yang dikerjakan oleh KH Achmad Dahlan memiliki nilai tersendiri, sebagai pelopor usaha bidang pendidikan pribumi yang diusahakan sendiri dan bersifat "moderen". Sebelum awal abad ke-20 pendidikan pribumi yang berkaitan dengan ajaran Islam lebih terfokus ke lembaga-lembaga pesantren⁷⁴, maka dalam periode 1900-an pendidikan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah lebih berorientasi pada kata: membentuk intelektual ulama dan ulama intelektual⁷⁵.

Keberhasilan dari usaha yang dirintis oleh beberapa pemuka Islam dengan tokoh sentralnya KH Achmad Dahlan, dapat terlihat juga bagaimana sistem kegiatan Missi direduksi menjadi suatu kegiatan kepanduan yang bernama *Hisbul Wathan*⁷⁶. Berbagai kegiatan yang menyingkup dan menggerakkan organisasi ini semakin terkenal di masyarakat, adalah tak lain karena ikatan dari ketujuh lembaga yang ada di dalamnya dan biasa disebut sebagai Majelis, seperti :

- Majelis Pendidikan dan Pengajaran
- Majelis Tarjih/lembaga Hukum Islam
- Majelis Hikmah (lembaga Kebijaksanaan)
- Majelis Penolong Kesengsaraan Umum (PKU)
- Majelis Ekonomi

72 *Ibid.*

73 *Makin Lama Tjinta* (Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1963), hlm. 164.

74 Dawam Rahardjo, "Kyai Pesantren dan Desa: Suatu Gambaran Awal", *Prisma*, no. 4, 1973; lihat juga; *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974).

75 Istilah ini dilontarkan oleh Delier Noer dalam bukunya: *Intelektual Ulama dan Ulama Intelektual*.

76 Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 92.

- Majelis Wakaf dan kehartabendaan
- Majelis Da'wah

Beberapa organisasi yang otonom seperti: Aisiyiah, Nasyiatul Aisiyiah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada dasarnya memberikan gambaran yang senyatanya bagaimana ide-ide perkembangan gerakan keagamaan ini semakin hari semakin memantapkan diri melalui berbagai bidang kegiatan masing-masing.

Muhammadiyah sebagai sebuah perkumpulan yang selalu berusaha untuk menyempurnakan bidang pendidikan masyarakat, membantu orang miskin, menolong orang sakit dan segala pekerjaan sosial yang menjadi keperluan masyarakat sehari-hari pada dasarnya dituntut oleh ajaran-ajaran agama Islam⁷⁷. Sebelum berbicara tentang peranan pendidikan yang telah dilakukannya dan yang takan terangkum dalam bab IV, ada baiknya jika diketahui juga awal terbentuknya dan perkembangan dari balai kesehatan organisasi Muhammadiyah yang kini bernama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, yang terletak di sebelah barat Kantor Pos Yogyakarta.

Menurut sejarahnya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah⁷⁸ yang didirikan pada tanggal 15 Pebruari 1923 adalah lanjutan dari organisasi Penolong Kesengsaraan Umum. Organisasi ini didirikan padastahun 1918 untuk menolong meringankan korban akibat letusan Gunung Kelud. Organisasi ini memang didirikan oleh beberapa *person* pimpinan Muhammadiyah, dan masuk ke dalam lingkup Muhammadiyah semenjak tahun 1921, ikut berperan dalam menolong korban kebakaran yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Sejak didirikan pertama kali, berupa klinik memiliki kapasitas untuk merawat orang sakit sebanyak 10 orang. Letak

⁷⁷ D.M.G. Koch, *Menuju Kemerdekaan* (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951), hlm. 120.

⁷⁸ *Sejarah Singkat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah* (Jogyakarta: Bagian Tatausaha R.S. PKU Muhammadiyah; 1982), hlm. 2.

poliklinik ini secara menyewa di Jalan Notoprajan dengan luas lebih kurang 150 meter persegi. Tahun 1928 – 1935, pindah ke Jalan KHA Dahlan 12b secara sewa dan pada saat itu kapasitas penampungan bagi penderita telah mencapai 70 pasien. Tahun 1936 kembali pindah tempat ke jalan yang sama tetapi nomor 14. Tempat ini merupakan hasil pembelian seharga 5600 gulden atas nama Bapak H. Abdul Hamid. Kapasitas untuk menampung pasien sebanyak 75 orang.

Struktur organisasi rumah sakit ini yang merupakan proyek PP Muhammadiyah, menjadikan pimpinan tertinggi berada di tangan PP Muhammadiyah, pimpinan pusat ini menunjuk pengurus untuk mengelola. Pengurus menunjuk direksi untuk melaksanakan dan mengemudikan rumah sakit dengan dibantu oleh bagian tata usaha, bagian rumah tangga, bagian keuangan, bagian medis, bagian kerohanian, dan bagian pendidikan⁷⁹. Kenyataan perkembangan yang bermula dari beberapa orang saja, pada akhirnya memberikan suatu gambaran bahwa adanya hubungan pribadi di antara masing-masing *person* lebih memudahkan kerjasama antar organisasi Penolong Kesengsaraan Umat dengan pusat pimpinan Muhammadiyah sendiri, dan merupakan kerja nyata yang dapat dinikmati oleh warga Kota Yogyakarta. Akan tetapi benarkah kehadiran PKU ini pada dasarnya hanya atas prakarsa para pimpinan, tanpa ada faktor lain yang menjadikan beberapa *person* pimpinan itu bergairah?

Pertanyaan di atas hanya dapat dijawab dengan "kemungkinan" jika tidak terdapat sumber-sumber tertulis. Masalahnya kini dengan munculnya berbagai organisasi dari Zen-ding dan Missi di lingkungan warga Kota Yogyakarta rupanya juga ikut merasakan bagi gerakan organisasi sejenis Muhammadiyah⁸⁰.

79 Bagan Struktur Organisasi, (sebagai lampiran).

80 Beberapa kalangan intelektual muslim berpendapat bahwa kesadaran K.H.A. Dahlan terhadap situasi abad 20 mencerminkan adanya "kesadaran historis" atas perjalanan umat dan agama Islam di masyarakat Indonesia saat pe-

Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh organisasi ini di dalam kehidupan sehari-hari disertai pengabdian yang sungguh-sungguh dari para pimpinannya menjadikan organisasi ini cepat mendapat pendukung. Tahun 1925 organisasi ini telah memiliki cabang sebanyak 29 dengan anggota sebesar 4000 orang⁸¹.

Kongres silih berganti setiap kali memberikan hasil keputusan untuk kemajuan organisasi ini. Terbentuknya Hisbul Wathan hingga didirikannya Majelis Tarjih atau keharusan memakai kerudung bagi guru-guru wanita di sekolah Muhammadiyah pada dasarnya semakin menjadikan organisasi ini memiliki kesatuan pikiran baik ke luar maupun ke dalam dari para pendukungnya.

netrasi peradaban barat semakin kokoh dan lancar masuk ke lingkungan penduduk yang sejak awal abad ini terkonsentrasi dalam bidang pendidikan.

81 Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 95.

BAB IV MOBILITAS SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA

Telah dikemukakan dalam bab III bahwa aspek kultural dan agama yang hidup alam masyarakat telah memberikan pengaruh yang tidak kecil atas proses mobilitas sosial masyarakat di Kota Yogyakarta. Kedudukan raja dan kraton sebagai pusat orientasi masyarakat Jawa semakin memainkan peranannya sebagai "katalisator" pertemuan budaya antar barat dan timur saat raja memberikan bantuan kepada Missi dan Zending. Kontak secara langsung antar masyarakat Jawa dan orang-orang barat terjadi, di antaranya ialah saat terbukanya bangsal-bangsal pengobatan masyarakat sebagai sarana kesehatan. Hal ini memberikan kemungkinan atas proses perubahan pandangan masyarakat Jawa terhadap kebudayaan barat. Ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat Jawa yang begitu berminat untuk mengubah posisi kehidupan mereka, dan hal ini harus dilakukan melalui sarana pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial.

Melihat pada kenyataan bahwa pada tahun 1818 sekolah Eropa yang diselenggarakan pemerintah kolonial bagi anak-anak bangsa Eropa di Indonesia¹ masih belum mampu mena-

1 I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, 1938), hlm. 97.

rik minat kalangan pribumi, maka sebenarnya bukankah pendidikan "tradisional kejawaen" masih begitu menyungkup kehidupan masyarakat Jawa di Kota Yogyakarta? Hal semacam ini harus dilihat kembali kepada kenyataan strata masyarakat sendiri sebagaimana yang pernah dikemukakan di bagian depan dari bab ini. Kelas yang memerintah lebih merupakan kelas yang pasif.² Seiring dengan tuntutan kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan politik tanam paksa, pintu pendidikan bagi masyarakat bumiputera secara perlahan telah dibuka. Sebenarnya kenyataan semacam ini lebih merupakan berkuasanya golongan liberals dalam pemerintahan dan pendidikan yang diadakan itu lebih merupakan suatu bentuk tuntutan politik kolonial golongan liberal³.

A. Modernisasi Masyarakat Jawa : Gagasan Kaum Liberal

Beberapa peristiwa penting baik langsung atau tak langsung yang ikut berpengaruh atas terjadinya perkembangan pendidikan di Hindia Belanda ini adalah :

1. Pada tahun 1863 dan 1864 di Negeri Belanda dilaksanakan program pembaharuan pendidikan oleh Fransen van de Putte
2. Tahun 1869 Terusan Zues dibuka dan berakibat mudahnya pengangkutan produksi rempah-rempah dan komoditi perdagangan lain yang laku di pasaran Eropa. Kapal uap sebagai sarana angkutan laut muncul dalam dunia pelayaran. Maskapai pelayaran di Belanda dibuka pada tahun 1870
3. Tahun 1870 terjadi suatu tatanan sosial ekonomi baru yang melanda Eropa dan di dalamnya juga negeri Belanda. Hal ini juga berakibat bagi daerah jajahan, di Hindia

2 B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, jilid I (Bandung: Sumur Bandung, 1960), hlm. 172.

3 Sartono Kartodirdjo; et.al., *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V (Jakarta: Blai Pustaka, 1977), hlm. 15.

Belanda dengan keluarnya Undang-undang Agraria de Waal yang memberikan kebebasan berusaha bagi perkebunan swasta. Tahap ini terkenal sebagai dilaksanakannya liberalisme⁴

4. Jalan kereta api dibuka bagi daerah Jawa. Maksud dan tujuan dibangunnya jalan kereta api ini untuk membuka daerah-daerah pedalaman Jawa dan menghubungkan daerah perkebunan besar yang kebanyakan terletak di pedalaman dan kota-kota pelabuhan terdekat : Batavia di Jawa Barat dan Semarang di Jawa Tengah
5. Tahun 1888 dibuka usaha pengiriman barang oleh *Paketvaartmaatschappij*, untuk pengiriman barang inter-insuler⁵

Berbagai usaha dari kelompok liberal ini atas politik baru bagi daerah jajahan adalah perubahan sistem pemerintahan ala barat tanpa disertai kenyataan atas kondisi masyarakat yang ada slogan kaum liberal: "lebih banyak memberikan arti kemakmuran bagi golongan pribumi dengan cara mengurangi hak-hak feodal para kepala-kepala bumiputera", sebenarnya memunculkan pertanyaan untuk membatasi permasalahan yang ingin dibicarakan dalam bab IV ini. Pernyataan itu berkisar kepada : sejauh mana golongan penguasa juga memperhatikan pendidikan moderen ala barat itu dalam kaitannya dengan kepentingannya? Akibat apa yang ditimbulkan oleh golongan masyarakat elit itu sendiri atas diperkenalkannya sistem pendidikan moddren ini? Se jauh mana aspek kultural yang menyungkup kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat Jawa ini ikut memberikan andil atas proses diselenggarakannya pendidikan moderen ini?

Keinginan pemerintah kolonial atas pendidikan bagi masyarakat pribumi dilaksanakan melalui surat keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda pada tanggal 30 September 1848.

4 *Ibid.*, hlm. 28.

5 I.J. Brugmans, *op.cit.*, hlm. 157.

Kweekschool atau sekolah guru bagi bumiputera didirikan dengan biaya sebesar 25.000 gulden⁶. Realisasi keputusan ini diwujudkan dengan dibukanya secara resmi untuk yang pertama kali di Surakarta pada bulan April 1852⁷. Peraturan yang menjamin pendidikan bagi warga bumiputera secara tegas baru dicantumkan dalam *Regering Reglement* pada tahun 1854. Anehnya berbagai keinginan itu sendiri sebenarnya mencerminkan sikap pemerintah kolonial atas usaha pendidikan itu. Tahun 1864 saat dibuka kemungkinan bagi anak bumiputera yang akan mengikuti pendidikan di sekolah Eropa, ternyata tidak setiap anak dapat diterima dengan mudah. Bagi mereka, para anak kepala pemerintahan pribumi harus mengajukan permohonan ke Pemerintah Belanda. Sebelum uraian ini masuk lebih lanjut, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu beberapa gambaran yang ada tentang pendidikan dalam masyarakat Jawa sebelum pendidikan moderen itu diselenggarakan.

Sistem pendidikan pada awalnya dalam masyarakat Jawa lebih disebut sebagai sistem ajaran yang membentuk watak manusia yang bersangkutan menjadi satria. Hal ini jelas menurut proses sejarahnya, sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Hindu atas kasta tertentu yang diambil oleh penguasa praja kejawen untuk membentuk tipe ideal sifat ksatria atas pribadi individu yang bersangkutan yang dibentuk menjadi seorang priyayi. Berbagai padepokan sebagai tempat sarana mendapatkan pendidikan, saat agama Islam mulai berkembang ternyata juga diintrodusir menjadi lembaga yang bernapaskan ke Islaman. Berbagai perubahan juga terjadi terhadap berbagai mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan ini. Berkembangnya agama Islam dan dominasi dari agama ini dalam kehidupan masyarakat pendukungnya menjadikan sistem pondok yang terlihat hingga kini lebih merupakan bentuk adaptasi dari sistem padepokan da-

6 *Ibid.*, hlm. 128.

7 *Ibid.*, hlm. 129.

lam kerangka sistem pendidikan bagi masyarakat. Peranan *ajar* dan *peranan kiai* yang mendasari lembaga pendidikan itu merupakan kaitan yang terpenting, untuk terhadirnya jenis lembaga pendidikan tertentu dalam masyarakat.

Berbagai isi *Serat Piwalang* yang hingga kini dapat di-kaji dan merupakan karya sastra ternyata lebih merupakan suatu petunjuk bahwa pendidikan moral, pada masa praja kejawen masih berada dalam tingkat perkembangannya merupakan syarat utama bagi seorang yang ingin mendapatkan posisi tertentu untuk mempelajarinya. Apa kegunaannya serta bagaimana seharusnya "menginterpretasikan" ajaran dalam kehidupan sehari-hari harus diketahui juga⁸. Dari hal semacam ini sebenarnya, apakah yang diinginkan dari sistem pendidikan kejawen itu? Menurut Niels Mulder⁹ pandangan hidup orang Jawa ternyata lebih menekankan pada ketenteraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap narima terhadap segala peristiwa yang terjadi, sambil menempatkan individu yang bersangkutan berada di bawah masyarakat, sedangkan masyarakat berada di bawah alam semesta.

Kenyataan di atas memberikan arti yang besar bagi bertahannya kultur Jawa terhadap berbagai intervensi yang datang dan menghampirinya. Salah satu tindakan yang lebih merupakan jawaban atas intervensi kultur barat dalam pendidikan, dijawab juga pada awal abad ke 20-an dengan munculnya sekolah Taman Siswa. Pengetahuan sastra merupakan kelengkapan yang harus dimiliki di samping diajarkan juga sifat sabar, berada di jalan yang lurus, bersyukur dan menerima karunia yang diberikan kepadanya, usaha, teguh hati, berani, setia akan kejujuran, gagal berani dan berilmu serta waspada¹⁰!

8 Wawancara dengan K.R.T. Puspaningrat, tanggal 15 Oktober 1983.

9 Niels Mukler, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977). Hlm. 14.

10 Ki Hadjar Dewantara, *Boefening van Latteren een Kunst in het Pakoe Alamsche Geslacth* (Djogja: Drukkerij en Uitgevers Firma v.h.H. Buning, 1931), hlm. 25.

Bermula dari sistem yang berakar dari budaya setempat, pendidikan di praja kejawaan Yogyakarta, sebenarnya lebih memberikan arti dalam kaitannya dengan *tatakrama* dan mengatur hubungan individu tersebut dengan Tuhan serta kaidah-kaidah moril yang menekankan sikap narima, sabar serta mawas diri, *andhap asor* dan *prasaja* yang juga pada gilirannya kesemua hal itu untuk ngatur dari gejolaksdorongan emosi-emosi yang ada dalam diri pribadi seorang individu¹¹.

Karya sastra menjadi pegangan bagi para priyayi untuk melanjutkan tradisi dalam sikap kehidupan sehari-hari. Tak jarang bagi seorang penguasa selalu berusaha untuk menurunkan karya-karya mereka pada jamannya¹² agar tindakannya itu menjadi suri teladan bagi keturunannya serta masyarakat pendukungnya. Isi materi pendidikan ini dalam arti tradisional itu diajarkan melalui bentuk wejangan yang diberikan secara lisan dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan luas serta kewibawaan dan selalu dihormati. Cara pemberian pengetahuan itu adasjuga yang berbentuk *sarasehan*, yakni beberapa orang berkumpul dan salah satu di antara mereka yang dianggap paling banyak mempunyai pengetahuan tentang berbagai masalah akan bertindak sebagai juru penerang. Otomatis dengan begitu bagi individu yang bertindak sebagai juru penerang ini sekaligus dapat dianggap sebagai pemimpin kelompok di dalam pertemuan sejenis itu. Model semacam ini lebih merupakan bentuk pembahasan isi buku, yang diawali dengan pembacaan isi buku baik yang berasal dari *babad* atau *serat*. Kegiatan semacam ini memang tidak dapat dilakukan setiap saat, akan tetapi biasanya dikaitkan dengan hari-hari yang dianggap memiliki makna tertentu, seperti : *malem Selasa Kliwon* atau *malem Jum'at Kliwon* bahkan hari lain yang menurut pengamatan orang Jawa memiliki arti tersendiri. Hari-hari tersebut berkisar pada

11 Niels Mulder, *op.cit.*, hlm. 14.

12 Sangat banyak karya sastra semacam ini, seperti: Kyai Sujarah Dhar-mo Sujayeng resmi, Serat Piwulang, Serat Ambya Yusup, Serat Darmawirayat.

hari kelahiran atau peringatan suatu peristiwa penting lainnya, seperti hari naik tahtanya seorang raja atau sebagai hari *tingalan ndalem*.

Gambaran atas pendidikan di atas, sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari yang dapat dilacak atas sistem pendidikan masa lampau dalam kehidupan masyarakat Jawa. Disadari bahwa pendidikan pada awalnya, hanya diperkenankan bagi golongan atas dalam masyarakat karena mereka berada di lingkungan istana. Bagi seorang individu, kraton memberikan gambaran yang menarik, di samping gambaran lingkungan kehidupan kraton merupakan "pusat pengetahuan dari isi budaya Jawa". Seperti telah disinggung di bagian depan, mata pelajaran *bahasa* dan *kesusasteraan Jawa* merupakan syarat utama¹³ di samping hukum ketatanegaraan, seperti : Undang-Undang Sepuluh, *angger pradata* (hukum perdata) dan *angger pidana* (hukum pidana).

Tak dapat diingkari pada akhirnya jika peranan bentuk kesenian¹⁴ seperti tembang mocopatan, wayang kulit, wayang orang dan berbagai tarian yang merupakan bagian integral atas pendidikan kejawen di samping sebagai media penerangan juga mampu mengekspresikan pandangan hidup orang Jawa, yang di dalamnya banyak terkandung ajaran serta falsafah kehidupan Jawa.

Sejak terjadinya proses Islamisasi di berbagai daerah dan praja kejawen, pengertian Sultan merupakan simbol kehadiran penguasa Islam atas kebudayaan Jawa¹⁵. Sejak saat itu pendidikan di lingkungan kraton juga harus menghadirkan

13 Hal di atas biasanya dinyatakan dengan bahasa setempat yang berbunyi: kangge ing jaman semanten inggih sampuh anyekapi, sakugi jangkep titikan saha pipilahanipun, inggih punika mantep, temen, utami bebudenipun, saha ageng manahipun.

14 De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1976), hlm. 37.

15 Clifford Geertz, *Islam Observed* (New Haven and London : Yale University Press, 1968), hlm. 11 - 13.

mata pelajaran pengetahuan yang berkaitan dengan keagamaan Islam dan bahasa Arab. Pendidikan ini juga diberikan di masjid-masjid atau pondok-pondok pesantren baik yang dilakukan oleh seorang mubaliq atau guru ngaji. Pendidikan jenis ini di kalangan kraton menghasilkan golongan pemetak atau putihan dan biasanya menempati jabatan dalam kaitannya dengan kepenghuluan kraton.

Inti dalam bidang pendidikan yang disebut sebagai pendidikan tradisional ini, dan dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat Jawa adalah : pendidikan agama yang umumnya bersifat agama Islam, serta pendidikan Kejawen. Khusus untuk pendidikan kejawen yang di dalamnya berisi tentang ajaran dari kehidupan dan pandangan hidup masyarakat Jawa dijabarkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang mengatur tindakan manusia dan berpusat di sekitar istana raja.

Ada alasan lain yang sebenarnya cukup dianggap memiliki korelasi antar prestige sosial dan gaya kehidupan feodal, bahwa keengganan para bangsawan atau *darah dalem* atas pendidikan Eropa itu dikarenakan tertutupnya sifat kehidupan masyarakat Jawa sendiri¹⁶ dalam kaitannya dengan pandangan bahwa hal-hal yang datang dari luar tersebut lebih merupakan cermin dari ketidakmampuan meraih prestige sosial atas gaya kehidupan feodal.

Kebutuhan akan pemenuhan tenaga terdidik dalam kehidupan moderen, ternyata juga ikut mempengaruhi munculnya kehidupan pendidikan moderen pada masa itu. Hal ini mengingat bahwa pendidikan moderen yang dibawa oleh peradaban barat, pertama kali menyentuh atau berkontak dengan lapisan atas dari masyarakat Jawa. Golongan priyayi ini lebih awal mengenal kebutuhan akan pendidikan moderen tersebut meskipun pada awal proses pengenalan pendidikan barat itu tidak seluruhnya merupakan gambaran atas *darah*

16 *Mengajuh antar dua karang dalam Pendidikan Masyarakat* (Jogjakarta: Penerbit Kentjana, 1951), hlm. 17.

dalem mengingat bahwa pendidikan kejawaen masih dianggap memiliki nilai tersendiri¹⁷.

Istilah atas pendidikan moderen ini sebenarnya hanya menunjuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengajaran yang lebih ditekankan dalam suatu ruang tertentu dengan waktu tertentu juga¹⁸. Menurut sejarahnya semenjak sistem pendidikan moderen ini diintrodusir ke masyarakat Jawa, melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di praja Kejawaen, sebenarnya lebih merupakan saingan dari sekolah tradisional yang telah ada dan hidup sertasdikenal oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari kenyataan ini adalah dari gambaran kehidupan sekolah yang ada di kota Yogyakarta, yang biasa disebut sebagai sekolah *Taman-an*. Pendidikan semacam itu memang mampu memberikan legitimasi buat seorang individu untuk bermasyarakat. Oleh karena pendidikan ini memang hanya terbuka untuk golongan tertentu yang pada gilirannya melahirkan ikatan solidaritas juga¹⁹. Ikatan ini jelas mampu menjalin kerjasama bagi para anggotanyas dalam berbagai persoalan kehidupan, hubungan di dalamnya akhirnya menunjuk juga seberapa jauh tingkatan mobilitas sosial yang dicapai oleh para anggotanya saat mereka telah selesai menamatkan pendidikan di sekolah tersebut.

Aspek mana yang paling berperan untuk menjalin hubungan perkerabatan dalam sistem pendidikan semacam di atas apakah aspek kultural atau agama²⁰ kiranya sulit diten-

17 *Ibid.*, hlm. 28 – 34.

18 Bandingkan: Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan*, bagian I (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977), hlm. 20; dengan "Education" dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company, 1957), hlm. 403.

19 Wawancara dengan K.R.T. Puspaningrat, 15 Oktober 1983, menyatakan bahwa sekolah itu juga merupakan suatu elemen dari persambungan kehidupan kultural.

20 Sjafri Sairin, *Trah dan Masalahnya: Sebuah Studi tentang Organisasi Sosial Orang Jawa*, kertas Kerja untuk seminar HPPIA di ANU Canberra, 1980, hlm. 47.

tukan oleh seorang peneliti yang berasal dari luar lingkungan semacam ini. Ada korelasi yang menunjuk bahwa memudarnya kegiatan pendidikan di bawah kesultanan sebenarnya justru mengikat para alumni sekolah tersebut ke dalam suatu *esprit de corps* yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dari gaya kehidupan pangreh praja. Oleh karena itu sekolah sejenis *Tamanan* harus dilihat dalam konteks kebudayaan Jawa dan perkembangan pendidikan moderen di Kota Yogyakarta. Mengapa sekolah ini mundur dan para murid lebih senang menerima mata pelajaran yang lebih moderen? Kiranya jawaban itu harus dilihat juga dalam situasi pemenuhan ketenagakerjaan yang dilahirkan oleh sistem pemerintah kolonial atas gagasan golongan liberal juga.

B. Pendidikan Moderen di Keluarga Pakualaman

Perang Diponegoro telah usai. Secara berangsur-angsur keamanan dan ketertiban dalam masyarakat telah dapat dipulihkan. Pada tahun 1831 diadakan reorganisasi tanah-tanah praja kejawaan dan status tanah atas Praja Pakualaman semakin nyata batas-batasnya. Hal ini memungkinkan untuk segera dilakukannya pengaturan pemerintahan. Terbuka formasi jabatan administratif dalam pemerintahan praja bagi keluarga Pakualaman.

Kebutuhan akan tenaga yang terdidik secara moderen untuk mengelola pemerintahan menjadikan Pakualaman IV, penguasa waktu itu segera mengirimkan dua orang abadinya untuk dididik secara barat. Mereka dikirimkan ke sekolah yang mempergunakan sistem Eropa dengan harapan kelak setelah kembali akan mampu mengabdikan di lingkungan keluarga Pakualaman. Kedua abdi ini, yang terdiri atas putra dan putri masing-masing dikirim ke Solo dan Batavia. Pendidikan yang mereka tempuh adalah **Kweekschool** di Solo dan sekolah **Broedvrouw** di Batavia²¹.

21 *Gedenkschrift Uitgegeven bij Gelegenheid van het 25 Jarig Bestuursjubelieum van Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Ario Pakoe Alam VII Hoofd van het Pakoe Alamsche 1906 - 1913*, hlm. 24.

Hal di atas merupakan langkah awal dari salah seorang penguasa di praja kejawen untuk berkontak langsung dengan budaya barat melalui sistem pendidikannya. Tak banyak hal-hal yang dapat digali dari kegiatan Pakualaman IV dalam hubungannya dengan pendidikan. Setelah Pakualaman IV meninggal, kedudukan penguasa praja kejawen ini jatuh kepada Kanjeng Pangeran Surjodilogo yang dinobatkan pada tanggal 9 Oktober 1878. Beliau adalah putra Pakualaman II dari istri yang bernama Bandoro Raden Ayu Resminingdyah. Sebagai seorang yang selalu berpandangan jauh ke depan, semenjak muda telah melihat bahwa pendidikan moderen sangat diperlukan untuk memajukan keluarga praja Pakualaman. Beberapa orang putranya diberi pendidikan melalui sekolah Belanda dengan harapan agar kelak dapat memperoleh posisi yang baik dalam masyarakat. Untuk satu hal ini, masalah pendidikan, beliau sangats keras²². Juga terhadap saudara-saudaranya beliau menuntut agar meraih pendidikan pada sekolah Eropa, meski banyak dari parassaudara beliau belum menyadari akan pentingnya mengikuti pendidikan moderen itu. Usul dan saran dari Pangeran Surjodilogi atas pendidikan terhadap para saudaranya ini tidak ditanggapi dikarenakan pemerintah Belanda memberikan persetujuan untuk meningkatkan jumlah anggota Legium Pakualaman. Hal ini berarti memberikan kesempatan kerja bagi keluarga Pakualaman.

Sebagai putra dari Pangeran Surjodilogi, Raden Mas Notokusumo dan Raden Mas Hario Notodirodjo, awal sekali menerima pendidikan ala barat di sekolah *Europesche Lagera Schoolen* (ELS). Salah seorang di antara mereka, Bendoro Raden Mas Notodirodjo kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Hoogere Burger School* (HBS) di Jakarta, dan kemudian pindah ke Semarang hingga tingkat IV. Setelah kembali ke Praja Pakualaman ia ditempatkan ke dalam Legium Pakualaman²³.

²² *Ibid.*,

²³ Ki Hajar Dewantara, *Karya K.H. Dewantara, bagian IIA Kebudayaan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1976), hlm. 342.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualaman V sadar saat naik tahta bahwa keadaan praja amat buruk kondisinya, kas keuangan kosong, shutang bertumpuk²⁴, dan banyak keluarga yang jatuh miskin akibat beberapa kebiasaan yang buruk²⁵, serta intrik keluarga yang selalu muncul karena kekecewaan atas pergantian tahta sebagai kepala praja yang selalu tidak berjalan baik. Harus dilakukan suatu perubahan yang mendasar dari pola kehidupan yang seperti ini. Jalan pintas diambil oleh beliau melalui pendidikan barat yang dianggap mampu memberikan harga diri bagi setiap individu untuk mengabdikan lebih nyata bagi Praja Pakualaman.

Pangeran Notodirodjo, sebagai salah seorang putra KGPAA Pakualaman V ternyata mempunyai peran yang besar dalam pemerintahan ayahnya. Kenaikan pangkatnya dalam Legium Pakualaman begitu cepat. Bermula sebagai *Wachtmeester*, lalu *Kwartiermeester*, dan pada tahun 1883 menjadi *Luitenant Kwartiermeester II*. Pada tahun itu jugasatas usul residen van Baak mendapat gelar Kanjeng Pangeran Ario dengan tugas baru mengurus bagian keuangan praja Pakualaman. Ayahnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Surjodilogo mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualaman V.

Salah satu program yang merupakan perpaduan antar ayah dan anak untuk mengembalikan kehidupan Praja Pakualaman ini adalah melalui pendidikan. Putra dan putri Pakualaman harus mendapatkan pendidikan dan ini merupakan prioritas yang utama. Pembatasan pembangunan yang menelan biaya banyak di samping melakukan penghematan pengeluaran bagi praja Pakualaman menimbulkan sikap pro kontra dari para pejabat lain atas tindakan Pangeran Notodirodjo, meski secara nyata hasil yang diperlihatkan cukup mengagumkan hanya dalam waktu yang singkat pada tahun

24 *Ibid.*, hlm. 347.

25 Gaya kehidupan feodal: Judi, Minuman keras dan candu lihat dalam *Gedenkschriftop.cit.*, hlm. 22.

1889 semua hutang kepada pihak swasta dapat dilunasi kecuali kepada Pemerintah Hindia Belanda²⁶.

Penertiban di segala bidang dalam pemerintahan praja kejawan Pakualaman, khususnya di bidang keuangan memberikan arti yang positif bagi kelancaran roda pemerintahan. Akan tetapi hal ini tidak berjalan lama, karena pada bulan Agustus 1892 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membubarkan Legium Pakualaman. Hal ini jelas menjadi beban keuangan Pemerintah Praja Pakualaman, khususnya penyaluran tenaga legium ke berbagai bidang kehidupan pemerintahan Praja Pakualaman.

Ambisi dan cita-cita Pakualam V sebagai penguasa pemerintahan praja atas pendidikan moderen, juga terlihat dari tekanan yang dilakukannya atas penerimaan dan pemberian kedudukan kerabat. Bagi yang tidak mendapatkan pendidikan formal sulit untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan Praja Pakualaman. Hasil nyata dari ambisi Pakualam V atas pendidikan moderen adalah berhasilnya salah seorang kerabat menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1892. Kerabat yang bernama Raden Mas Sukardi tersebut akhirnya berhasil menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Kejadian ini sangat menarik minat kerabat Pakualam untuk memasukkan putra-putri mereka ke berbagai sekolah-sekolah Belanda.

Penolakan atas kerabat yang tidak memiliki pendidikan formal untuk bekerja di lingkungan Praja Pakualaman menimbulkan perbedaan pandangan. Hal ini tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Pakualam V mengingat memang terbatasnya lapangan kerja di lingkungan pemerintahannya. Dianjurkan bagi para kerabat yang mendapatkan pendidikan formal untuk bersedia juga bekerja di luar lingkungan istana Pakualaman, khususnya di gubernemen. Tindakan dan anjuran ini dilakukan untuk mendorong para kerabat mendapatkan posisi

26 Ki Hajar Dewantara, *op.cit.*, hlm. 349.

ekonomi yang lebih baik dalam kehidupan atas kerja di luar lingkungan Praja Pakualaman itu.

Tahun 1891 Pakualam V mengirim seorang putranya, Bendoro Raden Mas Kusumojudo dan seorang cucunya yang bernama Raden Mas Soortijo ke Negeri Belanda. Beberapa tahun kemudian dikirim kembali putranya yakni Bendoro Raden Mas Surjoputro ke Belanda, bersamaan dengan lima orang cucunya yang menuntut ilmu di berbagai bidang seperti kedokteran, hukum dan pendidikan teknik.

Tanggal 6 Nopember 1900 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam V wafat. Penggantinya, Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam VI pada tanggal 27 Pebruari 1901. Penggantinya ini ternyata tidak dapat memerintah secara baik karena kesehatannya sering terganggu. Hakekat pemerintahan ternyata berada di tangan adiknya yakni Pangeran Notodirodjo yang pada masa Pakualam V sebagai tangan kanan dalam mengendalikan pemerintahan Praja Pakualaman. Kondisi ini menyebabkan Pakualam VI usul kepada Residen Cuperus untuk menyetujui diangkatnya Bendoro Raden Mas Surjaningrat yang sekolah di HBS dan berada di tingkat IV dijadikan pengganti putra mahkota, Bendoro Raden Mas Soortijo yang meninggal di Negeri Belanda. Usul ini diterima oleh residen. Surat permohonan ke gubernur Jenderal di Batavia dibuat dan saat pengiriman surat itu ke Batavia pada tanggal 8 Juni 1902 Pakualam VI juga meninggal dunia. Di bidang pendidikan belum ada perubahan.

Kekosongan penguasa pemerintahan Praja Pakualaman terjadi, dan untuk hal ini terpaksa diangkat Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat sebagai pejabat Wakil Kepala pemerintahan praja kejawen Pakualaman dengan tugas menyelesaikan urusan harian²⁷.

27 Tindakan ini diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, mengingat bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Pengangkatan itu sendiri tertuang dalam surat keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 29 Agustus 1902. Periksa, *Pustaka Djawi* (Jogjakarta: Java Instituut, 1931), hlm. 178.

Berbagai perubahan di bawah pemerintahan wakil kepala Praja Pakualaman berjalan. Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat menambah pegawai baru dan berbagai jabatan baru dalam pemerintahannya, tak terkecuali dalam masalah keuangan. Akibatnya, kebijaksanaan dalam bidang keuangan ini tak dapat disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat dimintai pertanggungjawaban sebagai wakil kepala pemerintahan Praja Pakualaman.

Tanggal 20 Agustus 1903 dalam sebuah pertemuan antara residen Pemerintah Hindia Belanda dan para asisten residen dari Mataram diberitahukan bahwa Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Raden Mas Surardjo sebagai pengganti Pakualam VI. Di samping itu dibentuk juga komisi pengawas masalah keuangan praja Pakualaman yang di dalamnya terdapat nama-nama seperti : Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat, Kanjeng Pangeran Adipati Notodirodjo. Kemunculan arti komisi pengawas keuangan ini berakibat baru bagi kehidupan administratif pemerintah praja Pakualaman. Anggaran praja yang berisi anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran harus dipisahkan. Hal ini berarti praja Pakualaman meninggalkan sistem feodal dan mulai memasuki sistem yang baru pada tahun 1904. Pendapatan praja harus dipisahkan dengan pendapatan pribadi. Hal ini disebut sebagai *civile lijst*. Peristiwa ini merupakan yang pertama bagi daerah praja kejawen. 17 Desember 1906 Raden Mas Surardjo dinobatkan sebagai kepala Praja Pakualaman dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Ario Prabu Surjodilogo VII. Di bidang pendidikan ternyata banyak hal yang dilaksanakan oleh penguasa praja Pakualaman ini. Ia memberikan bea siswa bagi kerabat yang ingin melanjutkan sekolah dan membuka sekolah bagi penduduk bumi putera di daerah Adikarto. Menurut catatan biaya pengeluaran keuangan rumah tangga istana, pada tahun 1907 ada enam Sekolah Dasar bagi bumi putera yang dibuka dan tersebar di empat kecamatan.

Organisasi pergerakan yang bertujuan meringankan kehidupan orang Jawa dengan jalan pendidikan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa STOVIA di Jakarta, sangat didukung oleh Pakualam VII, Kongres terbuka yang diselenggarakan oleh Boedi Otomo di Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 1908 yang dipimpin oleh dr. Wahidin Sudirohusodo, dan menghasilkan berbagai keputusan disambut baik oleh penguasa praja kejawaan Pakualaman ini²⁸.

Keterlibatan keluarga Pakualam atas gerakan pendidikan melalui organisasi Boedi Oetomo²⁹ membuat pergerakan nasional semakin menunjukkan arah yang sebenarnya dan hal ini cukup menggelisahkan beberapa pejabat Belanda.

1. Ide-ide Radikal dari Trah Pakualaman yang Menunjang Mobilitas Sosial di Kota Yogyakarta

Seperti telah diketemukan di bagian depan bahwa pendidikan moderen yang dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan para kerabat Pakualaman sebenarnya pada gilirannya menunjukkan kesadaran historis atas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Sebagai "gusti" yang melihat banyak terjadi kepincangan-kepincangan sosial akibat sistem masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang pada prinsipnya untuk menjaga stabilitas kekuasaannya, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk tenaga-tenaga terampil yang terdidik melalui sistem pendidikan yang dikembangkan dalam satu korps yang disebut *Binnenlands Bestuur*. Akan tetapi pembentukan korps tetap dirasakan adanya ketergantungan dari para *Inlandsch Bestuur*, meski-

28 S.L. van der Wal, *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie* (Uitgaven van de Commissie voor Bronnen Publicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch-Indie, 1967), hlm. 42.

29 Pada tahun 1911 KPA Notodirodjo terpilih sebagai ketua dengan pendukung suara sebanyak 62 dari 66 suara yang ada. KPA Notodirodjo waktu itu masih sebagai penasihat Pakualam VII Lihat, Ki Harjar Dewantara, *op.cit.*, hlm. 351.

pun pendidikan yang mereka peroleh dianggap telah mampu menembus hirarkhi *Binnenlands Bestuur* yang merupakan motor utama pemerintah Kolonial. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan sekelompok kecil orang-orang yang termasuk korps *Binnenland Bestuur* diantaranya kerabat Pakualaman.

Kecenderungan ketidakpuasan dari para kerabat atas sistem kemasyarakatan yang berlaku sebenarnya merupakan suatu hasil dari pendidikan liberal yang diintrodusir oleh pemerintah kolonial Belanda sendiri atas golongan masyarakat yang disebut tradisional³⁰.

Hal semacam ini di atas merupakan suatu penunjuk akan adanya perubahan sikap dari golongan masyarakat yang terhormat atas lingkungan dan mereka berusaha membentuk suatu komunitas tersendiri melalui ide-ide mereka dalam bidang pendidikan. Bukan suatu kebetulan jika keduanya dari kerabat Pakualam ini merupakan saudara kandung. Yang jelas, keduanya telah menjawab persoalan kemasyarakatan yang ada pada waktu itu dengan mendirikan sekolah Adhi Dharma dan Taman Siswa yang akan diuraikan secara selintas di bawah ini. Ide pendirian sekolah jelas banyak memberikan arti bagi adanya perubahan sosial masyarakat di Yogyakarta yang pada gilirannya juga memberikan arti bagi terhadirnya pengertian mobilitas sosial dalam masyarakat.

1.1. Sekolah Adhi Dharma

Sekolah ini didirikan oleh seorang kerabat Pakualam yang bernama Raden Mas Iskandar yang kelak lebih terkenal dengan sebutan Surjopranoto. Sebagai seorang yang berpen-

30 Suatu masyarakat disebut tradisional jika cara bertingkah laku di dalam masyarakat itu berlaku terus menerus dari generasi ke generasi dengan sedikit sekali mengalami perubahan-perubahan. Tingkah laku di sini diatur oleh adat, bukan oleh hukum. Struktur sosialnya bersifat hirarkhis, posisi seseorang diperoleh karna hasil kecakapan. Lihat, Everett E Hagen, *On the Theory of Social Change* (Horwood : The Dorsey Press, 1962), hlm. 55.

didikan sekolah pertanian, pada tahun 1908 ia diangkat sebagai kepala Dinas Pertanian Wonosobo hingga tahun 1914. Ia ke luar dari pekerjaannya karena protes atas tindakan pemerintahan kolonial Belanda terhadap pegawai pertanian yang dipecat karena beranggotakan Serikat Islam. Ia menceburkan dirinya dalam gerakansnasional dengan ikut menjadi anggota Boedi Oetomo³¹.

Tanggal 12 Pebruari 1912 atas prakarsa Dwidjosewojo dalam kongres Perserikatan Guru Hindia Belanda di Mage-
lang, terbentuk *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij*. Surjopranoto terpilih sebagai salah seorang anggota komisaris, *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* selanjutnya berubah menjadi *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Bumiputera*. Tahun 1915 aktivitas Surdjopranoto semakin luas dengan didirikannya *Arbeidslager Adhi Dharma* atau barisan kerja untuk kebaktian yang bertujuan menolong para petani buruh di daerah Yogyakarta, meringankan beban kehidupan merekasakibat meluasnya penanaman modal asing di sektor perkebunan.

Organisasi Adhi Dharma bergerak di bidang ekonomi serta pendidikan dengan usaha-usaha meliputi tabungan, koperasi, pertukangan, kesehatan, bantuan nasihat serta pendidikan. Berasas gotong royong dan tolong menolong. Di bidang pendidikan pada tahun 1917 untuk meningkatkan pendidikan anak-anak tani dan buruh didirikan sebuah sekolah HIS Adhi Dharma. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang pertama dan bercorak nasional, di Indonesia. Kelak kemudian hari dikembangkan sampai tingkatan MULO: *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Tujuan HIS Adhi Dharma agar rakyat berpengetahuan yang kelak dipakai sebagai alat perjuangan menentang penjajah.

31 Sejak tahun 1908 ia menjadi anggota Boedi Oetomo dan pada masa kepemimpinan Dwidjosewojo ia menjabat sebagai sekretaris Boedi Oetomo.

1.2. Raden Mas Suwardi dan Sekolah Taman Siswa

Raden Mas Suwardi adalah putra keempat dari Kan- yang Pangeran Adipati Surjaningrat yang dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di dalam lingkungan ke- luarga bangsawan. Ia mendapat pendidikan kesusasteraan serta kesenian Jawa dengan napas agama Islam yang kuat. Ia dilahirkan dan tumbuh di masa keluarga Pakualam sedang giat-giatnya mendidik para kerabat ke arah pendidikan Ero- pa, dan sempat mengecap pendidikan ELS, sebelum melan-jutkan ke *STOVIA*. Sifat-sifat pendidikan yang diterima se- jak kecil ini sangat mempengaruhi jiwa Suwardi, demikian pula sifat ksatria yang mengilhami gerak revolusionernya di dalam membela kepentingan rakyat Indonesia³².

Pada tahun 1904 ia masuk sekolah *STOVIA* di Jakarta. Ia hidup dan belajar dengan para pelajar yang datang dari ber- bagai penjuru daerah di Indonesia. Di Jakarta pengetahuan dan rasa nasionalnya lebih terpupuk, oleh karena di sini tidak dikenal tingkat kedudukan seperti di daerah asalnya di kota Yogyakarta. Kegiatan kebangsaan yang menentang penjajah mulai dilakukan olehnya, semenjak terbentuknya Boedi Oe- tomo, ia terlibat di dalamnya dan kesadaran politiknya sema- kin bertambah. Saat Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912, Suwardi masuk ke dalamnya sebagai anggota dan berhasil menjadi ketua Serikat Islam cabang Bandung Bersamaan wak- tunya dalam tahun 1912 bersama dengan dr. Tjipto Mangun- kusumo dan Douwes Dekker mendirikan Partai Politik yang pertama di Indonesia yang disebut *Indische Partij*.

Ada beberapa alasan mengapa ia meninggalkan bangku sekolah pada tahun 1909, alasan pertama, karena ketiadaan biaya sekolah, sedang alasan kedua, jiwa "radikal" menuntut kehadiran dirinya dalam kancah yang lebih nyata. Selama satu tahun ia bekerja di Pabrik Gula Bojong di daerah Probo-

32 Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdeka- an Indonesia* (Jakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1959), hlm. 36.

linggo. Setelah itu kembali ke Yogyakarta dan bekerja di Apotik *Ratkamp*. Namun akhirnya hal itu tidak lama kembali meninggalkan Yogyakarta menuju Bandung untuk memenuhi permintaan Douwes Dekker sebagai pekerja jurnalistik. Tahun 1913 ia bersama dr. Tjipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumiputera yang selalu melancarkan serangan politik kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Sebuah karangannya yang cukup keras dan menyerang pemerintah Belanda berjudul *Als ik eens een Nederlander Was* (Jika Aku seorang Belanda). Pada tahun itu juga ia ditangkap bersama Tjipto Mangunkusumo, kemudian diasingkan ke Negeri Belanda. Pada masa pengasingan ini ia ditemui istrinya Raden Ajeng Sutartinah Sosroningrat putra Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat. Selama di negeri Belanda ia ikut aktivitas politik dan mulai mempelajari ilmu pendidikan hingga berhasil mendapatkan ijazah. Suwardi mulai mengenal pikiran tokoh-tokoh pendidikan seperti Montesori, Rudolf Steiner dan Rabindranath Tagore. Ketiganya merupakan tokoh pendidikan yang mempengaruhi jalan pikirannya.

Sementara itu perang dunia pertama mulai berlangsung 1914 – 1918, penghidupan di Eropa semakin sulit, sampai akhirnya pada 17 Agustus 1917 pemerintah Belanda menca-
but putusan pengasingan Suwardi, tetapi ia belum dapat se-
gera pulang karena hubungan pelayaran ditutup. Baru pada
tanggal 6 September 1919 ia dan keluarganya pulang ke I-
ndonesia. Ia terjun kembali ke dunia politik sebagai sekretaris
dan kemudian sebagai ketua pengurus besar *National Indische
Partij*. Suwardi memandang perlu merintis perjuangan kemer-
dekaan di lapangan lain yakni kebudayaan Pertama kali ia
membantu kakaknya Surjopranoto yang telah lebih dahulu
membuka sekolah Adhi Dharma dengan HIS-nya. Di tempat
ini Suwardi kurang cocok, dianggap masih kurang bercorak
nasional. Atas bantuan kakaknya juga dan kerabat Pakualam-
an lainnya yang berpandangan progresif antara lain Raden
Mas Sutatmo Suryokusumo putra Kanjeng Pangeran Adipati

Surjokusumo cucu Pakualam III dan Bendoro Raden Mas A. Surjoputro, ia mendirikan lembaga pendidikan baru yang lebih bercorak nasional. Ia berhasil mendirikan Perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan wujud modal satu kelas Taman Indria berisi 20 orang anak³³. Perguruan Taman Siswa ini diasuh oleh Pengurus Perguruan Taman Siswa, dan untuk pertama kalinya Raden Mas Sutatmo Surjokusuma dipilih sebagai Ketua, sedang Wakil Ketua di tempati oleh Bendoro Raden Mas A. Surjoputro. Suwardi sendiri duduk sebagai sekretaris. Suwardi segera menentukan cara kerja yang mencerminkan kepribadiannya, bagi "yang setuju dengan usaha kita boleh membantu yang tidak setuju atau memusuhi kita biarkan, tidak usah kita layani"³⁴. Banyak ejekan dan cemoohan yang terlontar, tetapi ia tetap bekerja dengan diam.

Setelah delapan tahun sejak didirikannya, Perguruan Taman Siswa yang merupakan embrio sistem pendidikan nasional ini berkembang amat pesat, menjelang meletusnya perang dunia kedua Taman Siswa sudah mempunyai 200 buah cabang yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia antara lain di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ternate dan Ambon, dengan 20.000 orang murid, dari berbagai tingkatan kelas dan jenis sekolah. Oleh karena merasa kurang cocok dengan namanya yang berbau kebangsawanan itu, Raden Mas Suwardi Surjaningrat beralih nama menjadi Ki Hadjar Dewantara yang lebih bersifat kerakyatan. Hal itu dilakukan pada tanggal 23 Pebruari 1928.

Gubernur van der Plas sangat khawatir melihat perkembangan Taman Siswa yang demikian pesat, sehingga dalam sebuah rapat rahasia yang berlangsung pada tahun 1931 berkata: "Jika sistem sekolah negeri tidak diubah, dalam waktu

33 *Ibid.*, hlm. 53.

34 *Ibid.*,

10 tahun lagi suasana Indonesia akan menjadi suasana Taman Siswa³⁵

C. Perkembangan Sekolah di Kota Yogyakarta

Semenjak gagasan kaum liberal menjadi kenyataan dengan mengintroduksi pendidikan bagi masyarakat hanya dalam waktu yang relatif singkat, Kota Yogyakarta diramaikan oleh kehadiran lembaga-lembaga sekolah baik yang diorganisir oleh agama Katholik, Kristen, Taman Siswa, yang pada dasarnya kesemuanya memberikan arti dalam proses perubahan masyarakat kota dan menunjuk pada mobilitas sosial dalam kehidupan golongan-golongan masyarakat selama waktu-waktus tertentu yang dapat ditunjukkan melalui tabel-tabel di bawah ini :

Beberapa Perkembangan Sekolah Modern di Yogyakarta.

KATOLIK
Schakel-School
1924-1930

Yogyakarta	Berdiri tahun						
	1924 guru murid	1925 guru murid	1926 guru murid	1927 guru murid	1928 guru murid	1929 guru murid	1930 guru murid
		2 78	3 106	4 147	4 144	4 153	5 168

35 *Ibid.*, hlm. 54.

**KATOLIK
HOLLANDSCH INLANDSCHE SCHOOL
1917 – 1930**

Sekolahan	Berdiri tahun	1922	1923	1925	1926	1927	1928	1929	1930
		guru murid							
1. Kemundaman	1917	4 300	5 306	5 250	6 257	7 261	7 279	8 296	9 300
2. Gowongan	1918	2 146	3 184	3 136	5 177	6 193	5 220	6 271	6 297
3. Yogyakarta I	1918	3 267	4 295	4 265	8 281	8 318	8 319	8 340	9 360
4. Yogyakarta II	1918	2 253	3 267	4 272	7 254	7 251	8 261	7 281	7 288
5. Yogya ZZ Franciscanes	1920	2 120	3 131	4 192	7 191	7 188	7 222	9 256	8 288
6. Mangkukusuman Lor	1922	2 48	2 67	3 138	4 149	5 161	5 193	6 234	6 239
7. Wirobradjan	1922	2 46	2 65	3 118	5 208	4 144	5 158	4 166	5 229
8. Malay Chinesche School, Loji Kecil	1929	– –	– –	– –	– –	– –	– –	1 33	2 37
9. Trijasa	1930	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	2 39

Sumber : Sint Cloverbond 1917 – 1930.

**KATOLIK
RK MULO YOGYAKARTA**

berdiri tahun	1925 guru murid	1926 guru murid	1927 guru murid	1928 guru murid	1929 guru murid	1930 guru murid
1923	3 62	5 82	5 79	4 93	7 135	8 165

Sumber : Sint Claverbond 1923 – 1930.

**KATOLIK
PHILOSOPHIE (SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE)**

Yogyakarta	berdiri th	1926		1927		1928		1929		1930	
	1925	murid	guru								
	12	3	12	3	12	3	14	3	16	4	18

Sumber : Sint Claverbond 1925 – 1930

KLEIN SEMINARIE

Yogyakarta	berdiri th	1926		1927		1928		1929		1930		
	1925	guru	murid									
	4	13	4	26	6	43	7	61	9	68	11	86

Sumber : Sint Claverbond 1925 – 1930.

SEKOLAH KRISTEN DI YOGYAKARTA

No.	Nama dan alamat	Jumlah seko- lahan	tahun berdiri	1945		1946	1949 Nama sekolah	Jumlah sekolah
				Nama Sekolah	Juml. murid			
1.	Holandsch Javaansche School Jl. Sultan Agung 2 & 4 Hollandsch Javansche School Jl. Suryodiningratan	2	1919	I. SD Ungaran	300 (laki-laki + perempuan = 3 : 2) 60	berdiri SGTK	Taman Ka- nak-kanak (TK) SR	9
				II. SMP Ungaran				
2.	Hollandsch Chineesche School (bhs. pengantar Bhs. Belanda) di Gembakan Malaische Chineesche School (bhs. pengantar Bhs. Melayu) di Ngupasan.	1	1919	III. SMA Ungaran	75		SMP	12
		1	1919				SKKP	1
3.	KWS di Jl. Simanjuntak (SMP 8)	1	1919				SGB	1
4.	Frobel Scholen di Bintaran Wetan & Kulon.	2	1919				SMEA SMA	1 4
5.	MULO (Neer Uitgebreid leger Onder- wijs) di Jl. Wardhani II Yk.	1	1919					
6.	ELS (Europeesche lagere School) di Gondolayu 24 dan Bintaran Tengah 6 Yk.	2	1919					

Sumber : Arsip SMA BOPKRI III YOGYAKARTA.

**JUMLAH MURID-MURID DAN GURU-GURU TAMAN SISWA
1935 – 1940**

Nama Sekolah.	Tahun berdiri	Banyaknya Murid				Guru			
Taman Siswa Yogyakarta	1922	1935/ 1936	1936/ 1937	1938/ 1939	1939/ 1940	1935/ 1936	1936/ 1937	1938/ 1939	1939/ 1940
		356	—	356	450	21	—	27	—

Sumber : Majelis Luhur Taman Siswa.

BAB V. KESIMPULAN

Masuknya pendidikan moderen di kalangan masyarakat kota Yogyakarta memiliki akibat yang positif dan negatif. Akibat positif, masyarakat kecil dapat meraih status pegawai pemerintah kolonial untuk mendapatkan predikat "priyayi". Oleh karena itu semenjak pendidikan moderen merasuk dalam kehidupan masyarakat, arti dari kata "priyayi" menjadi luas tidak hanya "kaum bangsawan" tetapi juga mereka yang bekerja sebagai korps *Binnenlands Bestuur*. Kenyataan ini menunjuk pada gambaran mobilitas vertikal. Akibat negatif, pendidikan kesusastraan dan pendukung pendayaan Jawa mengalami "kepuaran" saat dari golongan priyayi yang berdasarkan hubungan darah dengan raja mulai meninggalkan orientasi mereka ke kraton, beralih ke pemerintah kolonial akibat pendidikan moderen dengan berbagai alasannya. Perpindahan status pekerjaan atau fungsi mereka dalam masyarakat menunjuk pada gambaran mobilitas horizontal.

Kemerosotan status sosial golongan bangsawan atau priyayi menimbulkan terbentuknya *trah*, khususnya *trah* keturunan bangsawan. Keberhasilan mencapai status sosial tertentu dalam masyarakat dari golongan wong cilik, juga menimbulkan kebanggaan tersendiri dari para keturunannya dan me-

reka membentuk *trah* yang pada gilirannya mengacu pada tokoh leluhur sebagai orang yang berhasil dalam kehidupannya.

Organisasi trah baik dari wong cilik atau priyayi umumnya berpusat kepada tokoh leluhur. Tokoh ini menjadi begitu penting untuk penentu nama resmi trah. Trah menjadi suatu bentuk kesatuan sosial orang Jawa yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Tujuan dari pembentukan trah untuk memudahkan komunikasi dan berinteraksi sesama mereka. Kiranya kebutuhan akan adanya persatuan dalam keluarga yang menjadikan organisasi trah dapat dianggap menunjuk kepada cikal bakal keturunan mereka di samping juga dapat memperlihatkan kepada masyarakat tentang mobilitas sosial yang senyatanya.

Kiranya bukanlah suatu perkembangan jika tanpa proses, pada hal pengertian proses adalah kejadian dari tantangan dan jawaban yang pada akhirnya menjadikan kehidupan ini lebih dinamis atas jalannya sejarah sebuah masyarakat di tempat tertentu serta dalam waktu tertentu, dari gambaran mobilitas sosial di Yogyakarta.

BIBLIOGRAFI

- Aanteekeningen Betreffende Particuliere Suikerfabricatie, dalam *TNI*, Jilid I, 1871.
- Abdul Sjukur, *Beberapa Hal Perubahan dan Istilah sampai Nama Tempat di Beberapa Daerah Semasa Djepang*. Jogjakarta: Penerbit Muria, 1951.
- Abdurrachman Surjomihardjo, "Golongan Penduduk di Jakarta, sebuah Ikhtisar Perkembangan", dalam *Seni Budaya Betawi, Pra Lokakarya Penggalan dan Pengembangannya*. Jakarta : Pustaka Jaya, 19976.
- Allen, F. (ed.), *Technology and Change*. New York, 1957.
- Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengadjaran Islam jang diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*. Jogjakarta : Penjelenggara Publikasi Pembaharuan Pendidikan Pengadjaran Islam, 1962.
- Anderson, B.R.O.G., *Jawa in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- Atmakusumah (penyunting), *Tahta Untuk Rakjat*. Jakarta: P.T. Gramedia, 1982.

- Armius, "Heerendiensten en Mesbruiken", dalam *TNI*, XVI, 1854.
- Babad Gijanti, Pratelan Namaning Tijang lan Panggenan*. Batavia, 1939.
- Babab Ngajogjakarta*, vol. I – III. Jogjakarta: Museum Sana budaja, 1876.
- Barth, Fredrik (ed.), *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown and Company, 1964.
- Benteng Vredeburg*. Jilid II, Yogyakarta: Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978.
- Berg, L.W.C. van den., *De Inlandsche Rang en Titels op Java en Madoera*. 's-Gravenhage, 1902.
- Beteille, Andre., *Social Inequality*. England: Penguis Books Ltd 1969.
- Bintarto, *Geografi Kita*. Jogjakarta: Penerbit Spring, 1969.
- Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Jogjakarta*. Jogjakarta, 1956.
- Buku Kenang-Kenangan 50 Tahun Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, 1929–1972*. Yogyakarta: Panitia Pesta Emas R.S. Panti Rapih, 1979.
- Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta: Pamong Pradja D.I.J., 1950.
- Buku Peringatan 30 Tahun, 1922–1952*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Taman Siswa, 1952.
- Brugmans, I.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*. Batavia: J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij, 1938.
- Burger, D.H., *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, jilid I, terj. Prajudi. Djakarta: Pradnja Paramita, 1962.
- Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Pusparagam Sosiologi Kota*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.

- Davis, Loan., *Social Mobility and Political Change*. London: Pall Mall Press, Ltd., 1970.
- Dawam Rahardjo, "Kyai Pesantren dan Desa, Suatu Gambaran Awal" *Prisma*, no. 4, 1973.
- Drake, Michael. (ed.), *Applied Historical Studies: An Introductory Reader*. London: Methuen & Co Ltd., 1973.
- Durkheim, Emile., *The Division of Labor*. London: The Free Press 1969.
- "Education", dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*. New York: The Macmillan Company, 1957.
- Eisenberger, *Indie en de Bedebaart naar Mekka*. Leiden: 1928
- Ekeh, Peter., *Social Exchange Theory*. London: Heineman, 1974.
- Emmerson, Donald K., *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca Cornell University Press, 1976.
- Encyclopaedia van Nederlandsch Indie*, jilid IV, Leiden : 's-Gravenhage, 1921.
- F.A. Sutjipto, "Beberapa Tjatan tentang Pasar-Pasar di Jawa Tengah abad 17-18", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, no. 3, 1970.
- , "Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu". Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM, 1928.
- , "Panembahan dalam Sistem Titulatur Tradisionil" dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, no. 1 tahun 1969.
- G. Moedjanto, dan kawan-kawan., *Sejarah Gereja Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan Ummatnya*. Yogyakarta: Panitia Peringatan 50 tahun Gereja Antonius Kotabaru, 1976.

Gedenkschrift Uitgegeven bij Gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs-Jubelieum van Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Ario Pakoe Alam VIII Hoofd van het Pakoe Alamsche 1906 – 1913.

Geertz, Clifford., *Islam Observed*. New Haven & London: Yale University Press, 1968.

Gegevens over Djokjakarta, 1925.

Groneman, J., *Javaansche Rangen en Pajoengs*. Jogjakarta: 1882.

Haan, F. de., *Priangan*. Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912.

Hadi Ningrat, "De Achteruitgang van het prestige der Inlandsche Hoofden en de Middelen om daarin Verbetering Tebrenge" dalam *TBB*, deel 17, 1899, halaman 377.

Hadisukatno, "Permainan Kanak-Kanak", *Madjalah Budaya*, 1953.

Hagen, Everett, E., *On the Theory of Social Change*. Hornwood: The Dorsey Press, 1962.

Hamka, *Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia*. Djakarta: Tinta Mas, 1961.

Himpunan Peraturan-Peraturan dan Se
Himpunan Peraturan-Peraturan dan Sedjarah Kota Jogjakarta.
Jogjakarta: Penerbit Kotapradja, 1952.

Javaansche Meisjesspelen en Kinderliedjes. Jogja: Java Institut t.t.

Jay, Robert. R., *Javanese Villagers*. Cambridge: The MIT Press, 1969.

Jong, de., *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1976.

Junus Salam, *K.H.A. Dahlan, Amal dan Perjuangannja*. Jogja: Dokrah P.P. Muhammadiyah, 1968.

Kenang-Kenangan Pekan Raja Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1961 di Jogjakarta. Jogja: 1961.

Ki Hajar Dewantara, *Beoefening van Letteren een Kunst in het Pakoe Alamsche Geslacht.* Djogja: Drukkerij en Uitgevers Firma v,h,H. Buning, 1931.

----- *Karya K.H. Dewantara, bagian II A, Kebudayaan.* Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1976.

----- *Pendidikan, bagian I,* Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.

----- "System Pondok dan Asrama itulah System Nasional", *Waskita*, jilid I, no. 2, 1928.

Ki Soeratman, "Masalah Kelahiran Taman Siswa", *Pusara*, jilid XXV, Djanuari/Pebruari - Maret/April, 1964.

Kleintjes, Ph. *Het Staatsrecht van Nederlandsch Indie.* Amsterdam: J.H. de Bussy, 1912.

Koch, D.M.G., *Menudju Kemerdekaan.* terj. Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951.

Koentjaraningrat, "Tjelapar: A Village in South Central Java", dalam *Village in Indonesia.* Ithaca: Cornell University Press, 1967.

Koloniaal Verslag. The Hague: Departemen van Kolonien, annual, 1929.

Kota Jogjakarta 200 Tahun.

Kota Jogjakarta 200 Tahun. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta, 1950.

Kruger, Muller., *Sedjarah Geredja di Indonesia.* Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959.

Kyai Jasadipura I, *Babad Gijanti.* Betawi Centrum: Bale Pustaka 1937 - 1939.

- Laporan Tjurah Hudjan di Daerah Istimewa Jogjakarta.* Jogja: Dinas Pertanian D.K.J., 1965.
- Lelampahipun dokter J. Offringa lan Sesambetanipun dening para kawoela alit.* Jogjakarta: 1928.
- Lerner, Daniel., *Memudarnya Masyarakat Tradisioal*, terj. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Liem Kie Hok, *Adanja Orang-Orang Tionghwa dan Keturunnja di Beberapa Kota Pesisir Djawa.* Semarang: Radjawali, 1931.
- Louw, P.J.F., *De Derde Javaansche Successie Oorlog 1796—1755.* Batavia: Albrecht & Rusche, 1889.
- , *De Java Oorlog van 1825 tot 1830,* I, Batavia: 1891.
- M.P.M. Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid IV. Ende-Flores: Percetakan Arnlodus, 1973.
- Makin Lama Makin Tjinta.* Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1963.
- Mandjokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat* Yogyakarta: 1977.
- Masri Singarimbun, *The Population of Indonesia 1938—1968: A Bibliograpny.* London: International Planned Parenthood Federation, 1969.
- Meinsma, J.H., *Babad Tanah Djawi.* 's-Gravenhage: 1941.
- Mengajuh antar Dua Karang dalam Pendidikan Masjarakat.* Jogiakarta: Penerbit Kentjana, 1951.
- Meyerhoff, Hans., (ed.), *The Philosophy of History in Our Time.* New York: Doubleday & Company Ind, 1959.
- Milone, Pauline D., *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts.* Berkelay: Institute of

International Studies, University of California,
1966.

Monografi Kodja Jogjakarta, 1968.

Mulder, Niels., *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
1977.

Notojudo, *Hak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta*. Yogya-
karta 1975.

Oemar Sahidu, *Sedjarah Perkembangan Agama Islam, Wudjud
dan Tjitra untuk bermasyarakat*. Surabaya: Badan
Penerbit Islam, 1963.

Owen, C., *Social Stratification*. London: Routledge & Ke-
gan Paul, 1968.

Partowidjojo, "Nota. Hal Pengadjaran (Schola) Djawa", da-
lam *TBB, deel 5*, 1891.

Peacock, James L., *Purifying the Faith: The Muhammadiyah
Movement in Indonesian Islam*. Philipina: The
Benyamin/Cummings Publishing Company,
1978.

Nagazumi, Akira., *The Dawn of Indonesian Nationalism: The
Early Years of the Boedi Oetomo, 1908-1918*.
Tokyo: Institute of Development Economic,
1972.

Pedoman Pendjelasan tentang Kepribadian Muhammadiyah.
Jogja: P.P. Muhammadiyah, 1963.

Penelitian Awal Tata Kota Jogjakarta, Jilid I, II. Jogjakarta
Arsitektur UGM & PUTL, 1971.

Perekonomian Ra'jat, Mei 1940.

Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta, 7 Djuni
1947 - 7 Djuni 1962.

Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah. Djakarta: Panitia Pe-
ringatan 40 Tahun Muhammdijah, 1952.

- Pertumbuhan Perkampungan di sekitar dalam Benteng dan Luar Benteng.* Jogjakarta: Seksi Kebudayaan P.P.K., 1953.
- Peta Pendataan Letak Nama-Nama Kampung di Jogjakarta.* Jogjakarta: D.P.U., 1957.
- Pirang Tjatjah Sak Temene ing Njobo Beteng Kuwi?.* NgaJ-Jogjakarta: 1923.
- "Proses Identifikasi dan Agama", *Prisma*, no. 6, 1983.
- Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.* Djakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Pustaka Djawi.* Jogjakarta: Java Instituut, 1931.
- Raffles, T.S., *The History of Java.* 2 vols. London: Black, Berbury and Allen, 1817.
- Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta.* Jogja: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953.
- Ricklefs, M.C., *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792.* London: Oxford University Press, 1974.
- 'Riwayat Pamong Praja dalam tiga Jaman" dalam *Panitia Pertemuan Kangen-Kangenan Eks Pamong Praja se DIY.* Yogyakarta: 1979.
- Rouffaer, G.P., "Vorstenlanden" *Overdruk uit Adatrechtbundels XXXIV*, seri D, no. 81, 1931.
- Ryadi Goenawan, "Jagoan dalam Revolusi", *Prisma*, Agustus 1981.
- Sarasilah Kadanoeredjan.* Jogjakarta: Museum Sanabudaja, t.t.
- Sartono Kartodirdjo, "Modernisasi dalam Perspektif Sejarah", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, 1977.

- , "Politik Kolonial Belanda abad 19",
Lembaran Sedjarah, no. 1, Jogjakarta: Djurusan
Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM,
1972.
- , *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V.
Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies, Part II, Ruler
and Realm in Early Java*. Brussel: A Manteau,
1959.
- Sejarah Singkat P.K.U. Muhammadiyah*. Yogyakarta: R.S.
P.K.U.
- Sejarah Perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta*: Yogya-
karta: Sekretariat Gereja Kristen Jawa Gondo-
kusuman, 1983.
- Sejarah Singkat Perusahaan Besi Purosani*. Yogyakarta: 1981.
- Sejarah Singkat Rumah Sakit Bethesda*. Yogyakarta: R.S.
Bethesda, 1980.
- Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan
Kusumanto. Yogyakarta : Gadjah Mada Uni-
versity Press, 1981.
- Sjafri Sairin, *Javanese Trah: A Preliminary Description of
a Type of Javanese Social Organization*. Thesis
Unpublished ANU, Canberra, 1980.
- , *Trah dan Masalahnya: Sebuah Studi
Tentang Organisasi Sosial Orang Jawa*. Kertas
Kerja untuk Seminar HPPIA di ANU Canberra,
1980.
- Sint Claverbond Uitgave de P.P. Jezuiten te bate Hunner
Missi op Java, 1917 – 1940*.
- Soedjatmoko, et.al., *An Introduction to Indonesian His-
toriography*. Ithaca: Cornell University Press,
1965.

- Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu Analisa*, jilid I & II. Jogjakarta: Penerbit Karja, 1968.
- Soekanto, *Sekitar Jogjakarta, 1755–1825*. Djakarta: Mahabarata, 1952.
- Soepran Kastomo, *Dari Oeap Mendjadi Diesel*. Bandung: Per-tjetakan doea-doea, 1958.
- Soerjobronto, *Tegese Plengkung lan Beteng ing Kraton Soerakarto Hadiningrat lan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat*. Solo: Penerbit Soerjoloka, 1923.
- Staatblad*, no. 13, 1824.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Djakarta: Panitia Penerbit, 1966.
- Sudarisman Poerwokusuma, *Peranan Kota Yogyakarta dalam Perjuangan*. Yogyakarta, Pusat Studi Kebudayaan UGM, 1982.
- Teko Soemodiwirjo "Kaoem Tengahan Priboemi", dalam *Volksalmanak Djawi, 1941*. Batavia: Balai Poes-taka, 1941.
- Tjokrosumanto, *Sektiar Sedjarah Perkembangan Djawatan Kereta api*. Djokjakarta: Penerbit Bersaudara, 1951.
- Tri Warsa: DPRD Kotapradja Jogjakarta*. Jogjakarta: 1953.
- Tumenggung Ronggo Prawirosetiko, *Babab Kraton Karto-soera sampai dengan Babab Perdjangjian Gijanti*. Jogjakarta: Museum Kraton Jogjakarta, t.t.
- Tumin, Melvin M., *Social Stratification: The Forms and Functions of Inequality*, New Delhi: Prentice Hall, 1969.
- Verwijk, J.J., "Nota Over de Staatsie en het Gevolg der In-landsche Ambtenaren in de Gouvernements-landen op Java en Madoera", *TBG*, XVII, 1899.

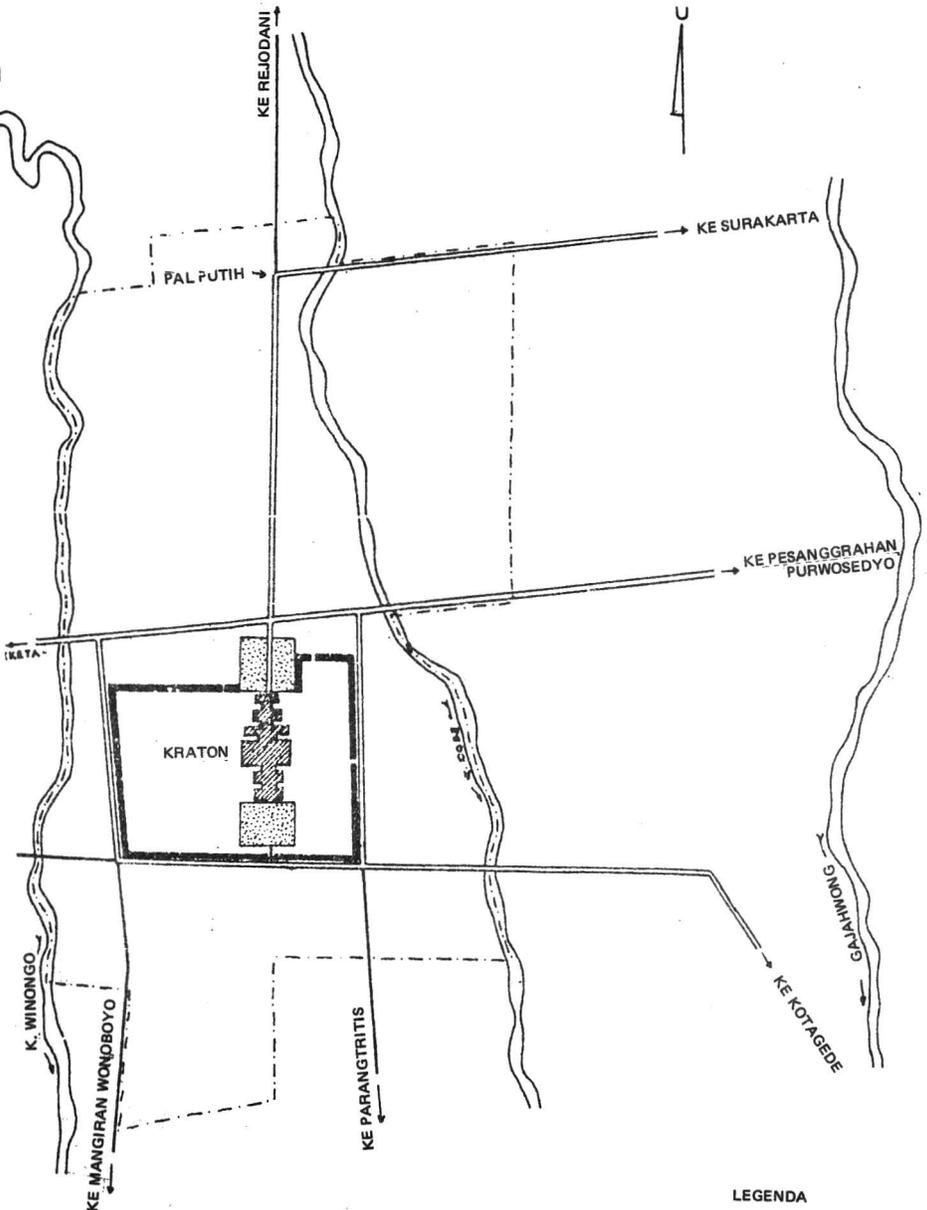
- Vey, Ruth Mc., "Taman Siswa and the Indonesian National Awakening", Indonesia, IV, 1967.
- Vlekke, B.H.M. *Nusantara, A. History of East Indie Archipelago*. Cambridge: Massachusetts, 1945.
- Volkstelling 1930*, 8 vols. Batavia: Departement van Landbouw Nijverheid in Handel, 1933-36.
- Verdenbregt, "The Hadj, Some of its Features and Functiona in Indonesia", *BKI*, deel 118, 1962.
- Wal, S.L. van der., *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*. Uitgaven van de Commissie voor Bronnen Publicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch Indie, 1967.
- Wertheim, W.F., *Indonesian Society in Transition*. Bandung: Sumur Bandung, 1956.
- Winter Sr. C.F., *Kawi Javaansch Woordenboek*. Z.P., 1928.
- Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

DAFTAR WAWANCARA

K.R.R. Partahadiningrat	Jln. Kadipaten Wetan Yogyakarta.
K.R.T. Puspaningrat	Jln. Siliran Kidul Yogyakarta.
K.R.T. Sumodiningrat	Jln. Kratonan Surakarta.
Soeprapto	Perumahan PJKA Lempuyangan Wangi Yogyakarta.
Mbah Slamet	Jln. Sukun Yogyakarta.
Achmad A. Darhan	Kauman (belakang Masjid be- sar) Yogyakarta.

PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

SKALA 1 : 30.000
TH 1756



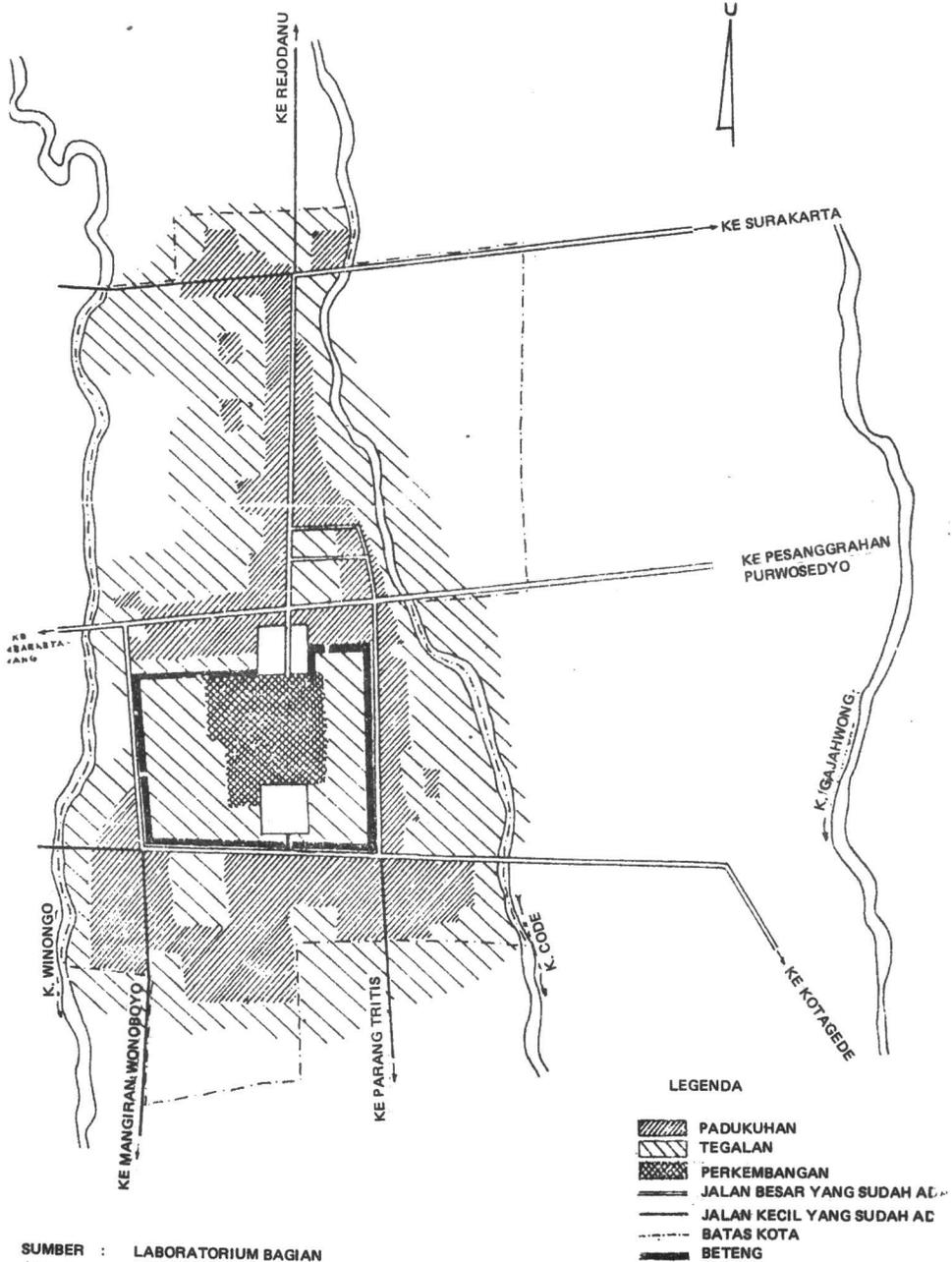
LEGENDA

- ==== JALAN BESAR YANG SUDAH ADA
- JALAN KECIL YANG SUDAH ADA
- - - - BATAS KOTA

SUMBER : LABORATORIUM BAGIAN
JAN 70 : ARSITEKTUR PT. UGM

PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

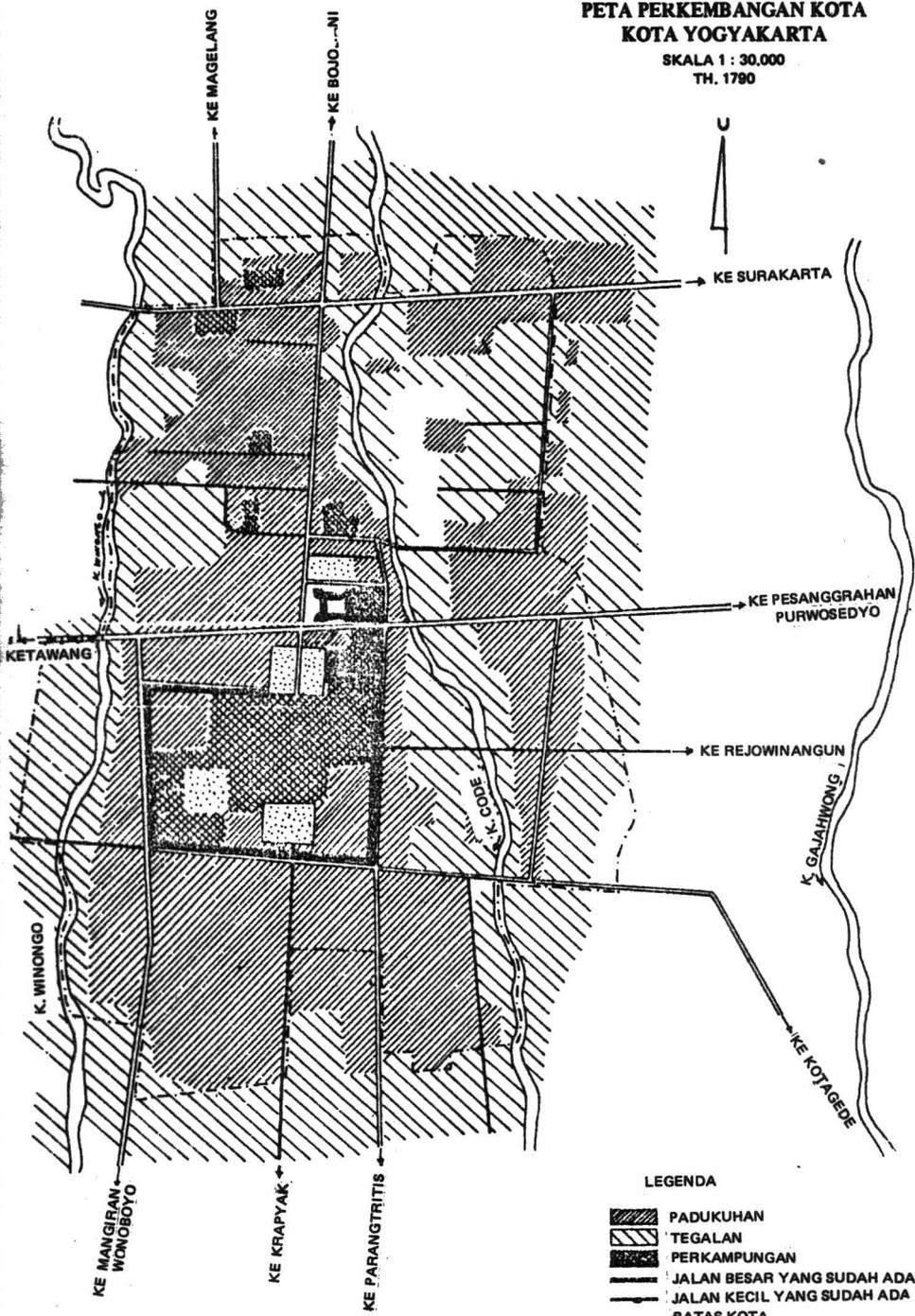
SKALA 1 : 30.000
TH. 1765



SUMBER : LABORATORIUM BAGIAN
JAN 70 : ARSITEKTUR PT. UGM

PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

SKALA 1 : 30,000
TH. 1790



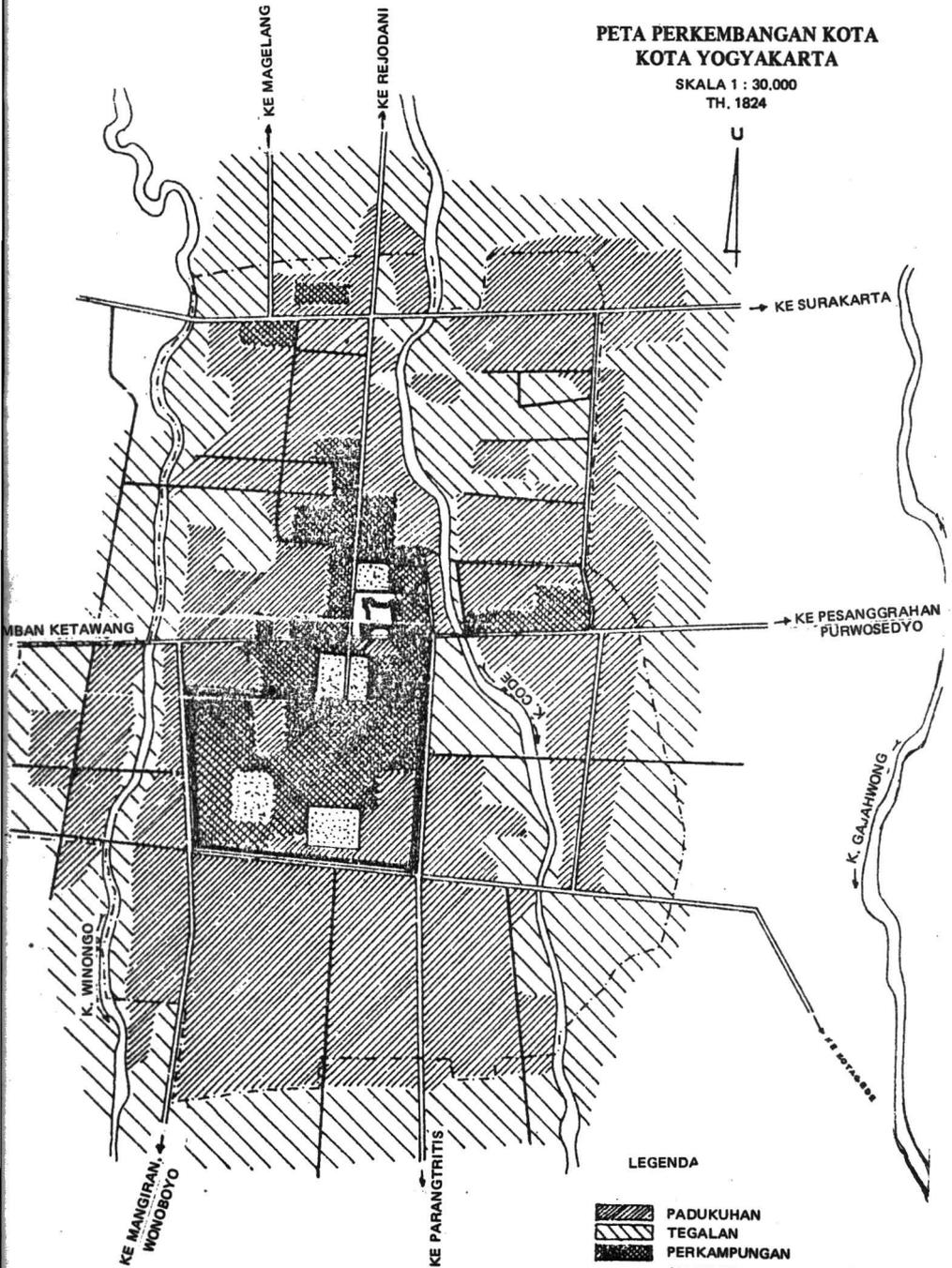
LEGENDA

-  PADUKUHAN
-  TEGALAN
-  PERKAMPUNGAN
-  JALAN BESAR YANG SUDAH ADA
-  JALAN KECIL YANG SUDAH ADA
-  BATAS KOTA
-  BETENG

SUMBER : LABORATORIUM BAGIAN
JAM. TO : ARSITEKTUR P.T. UGM

PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

SKALA 1 : 30.000
TH. 1824



LEGENDA

-  PADUKUHAN
-  TEGALAN
-  PERKAMPUNGAN
-  JALAN BESAR YANG SUDAH ADA
-  JALAN KECIL YANG SUDAH ADA
-  BATAS KOTA
-  BETENG

**STRUKTUR ORGANISASI
RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

